



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2026



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala karena atas berkat rahmat dan karuniaNYa penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ini dapat diselesaikan pada waktunya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai pada APBD di Tahun 2026. Dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan untuk pembangunan daerah.

Penyusunan RENJA Tahun 2026 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan. Oleh karena itu, dalam optimalisasi implementasinya diperlukan komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan dan sasaran RENJA Tahun 2026.

Akhirnya, tak lupa kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RENJA Tahun 2025 ini. Semoga dokumen RENJA Tahun 2025 ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 19 November 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,
Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar 1 Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I_PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II_HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	14
2.1 Hasil Evaluasi Renja Tahun 2025 Triwulan III.....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	23
2.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.....	29
2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah.....	31
2.2.3. Sumber Daya Sekretariat Daerah.....	57
2.2.4. Kinerja Utama.....	70
2.2.5. Kinerja Anggaran.....	72
2.2.6. Capaian Indikator Kinerja Kunci.....	76
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.....	79
2.4. Review Terhadap RKPD.....	88
2.5. Penelaahan Urusan Program dan Kegiatan Stakeholder.....	96
BAB III_TUJUAN DAN SASARAN.....	123
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	123
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah.....	132
3.3 Program dan Kegiatan.....	135
BAB IV_RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	159
BAB V PENUTUP.....	217
5.1. Kesimpulan.....	217
5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	219
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	220



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.....	7
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 Dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat s.d Triwulan III Tahun 2025.....	16
Tabel 2. 2 Neraca Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam 6 Tahun	63
Tabel 2. 3 Data Layanan Digital Lingkup Setda.....	66
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	77
Tabel 2. 6 Isu-isu pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah	82
Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Setda dalam RKPD Tahun 2026.....	88
Tabel 2. 8 Tujuan dan Sasaran dalam RKPD Tahun 2026 yang Diampu Setda.....	89
Tabel 2. 9 Tabel Program Pembangunan.....	90
Tabel 2. 10 Analisis Implikasi Terhadap Dokumen Rencana Kerja.....	93
Tabel 2. 11 Tujuan Dan Sasaran Dalam Ranwal Rkpd 2026 Yang Diampu Setda.....	96
Tabel 2. 12 Kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Layanan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.....	100
Tabel 2. 13 Kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Layanan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.....	108
Tabel 2. 14 Program Prioritas Perangkat Daerah Yang Membutuhkan Fasilitas Perumusan Dan Evaluasi Kebijakan Serta Pembentukan Kerjasama Daerah	110
Tabel 3. 1 Penjabaran Prioritas Nasional Ke Dalam Prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat	123
Tabel 3. 2 Tujuan Dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.....	131
Tabel 3. 3 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026.....	133



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar³ Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

Tabel 3. 4 Dukungan Biro Pada Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026.....	139
Tabel 4. 1 Target ‘Jumlah Produk Tersertifikasi Halal.....	161
Tabel 4. 2 Pagu Anggaran Sekretariat Daerah per Sasaran tahun 2026.....	166
Tabel 3. 3 Rencana Alokasi Anggaran per Biro Tahun 2026 (dalam Rp000).....	167
Tabel 4. 4 Rencana Kerja Dan Pendanaan Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.....	170



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar 4 Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.....	31
Gambar 2. 2 Grafik Data Kepegawaian Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Dan Kualifikasi.....	59
Gambar 2. 3 Grafik Data Kepegawaian Biro-Biro Di Sekretariat Daerah.....	61
Gambar 2. 4 Data Aset Tanah Setda.....	65
Gambar 2. 5 Data Aset Gedung Dan Bangunan Setda.....	65
Gambar 2. 6 Pagu Anggaran & Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024.....	74
Gambar 2. 7 Data Proporsi Pagu Anggaran Per Biro Lingkup Setda.....	75
Gambar 2. 8 Data Realisasi Anggaran Per Biro Lingkup Setda.....	75
Gambar 2. 9 Data Capaian Anggaran Per Biro Lingkup Setda.....	76
Gambar 4. 1 Rencana Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah per Program.....	169



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Dokumen ini menjadi instrumen perencanaan tahunan yang mengarahkan program dan kegiatan Sekretariat Daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan efisiensi, serta efektivitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Melalui perencanaan yang terarah, Renja diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Renja Tahun 2026 dilaksanakan sebagai tahapan wajib sebelum ditetapkan menjadi dokumen definitif. Proses perumusannya mengacu pada kerangka arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Awal Renja Setda dapat dilakukan secara simultan dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD, dengan titik berat pada pengkajian kondisi eksisting Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, serta analisis pencapaian kinerja Renstra perangkat daerah.

Selain bersandar pada kerangka regulatif, penyusunan Renja juga memperhatikan berbagai saran dan pertimbangan dari para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan BUMD. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap arah kebijakan yang tertuang dalam Renja responsif terhadap kebutuhan publik serta adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah. Renja Tahun 2026 juga dirumuskan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

dengan mempertimbangkan tantangan global dan nasional yang memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan daerah, sehingga strategi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks dan kompetitif.

Dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, dokumen Renja ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas bagi Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan tahun 2026, yang selaras dengan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik”.

Penyusunan Renja Setda Tahun 2026 juga dilandasi oleh hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya. Perkembangan yang dialami Provinsi Jawa Barat dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan—yang tercermin melalui berbagai Indikator Makro Pembangunan Daerah—menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan, prioritas program, serta strategi pencapaian kinerja yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi hasil. Berikut Capaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2024 tertuang pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Indikator Makro Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,14	74,92
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,67	4,95
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,34	7,46



4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,01	6,75
5.	Indeks Gini	Poin	0,394	0,421

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terdapat beberapa indikator makro pembangunan pada periode 2024 di Jawa Barat yang masih memerlukan upaya dalam mencapai target indikator makro diantaranya:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 mencapai 4,95 persen, masih kurang dari target yaitu 5,67 persen. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tersebut.
- b. Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 7,46 persen, masih tinggi dibandingkan dengan target 7,34. Untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat, diperlukan strategi yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat serta memperluas akses terhadap peluang ekonomi yang lebih inklusif.
- c. Angka Gini Ratio Jawa Barat tahun 2024 sebesar 0,421 tergolong kategori ketimpangan moderat dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Artinya distribusi pengeluaran antar penduduk di Jawa Barat semakin tidak merata.

Capaian beberapa indikator makro di atas menunjukkan bahwa pembangunan di Jawa Barat masih perlu memberikan perhatian yang besar terkait ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Oleh karena itu, Renja Setda Tahun 2026 disusun memperhatikan perkembangan tersebut, serta menetapkan perencanaan dan penganggaran yang cermat untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar 8 Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6



11. Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; dan
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja bagi Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah bertujuan untuk menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar0 Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.



1FCFCF7D7F

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Pada bagian ini mengulas mengenai isu-isu yang berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan tugas dan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Pada bagian ini digambarkan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan hasil analisis kebutuhan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah Renstra Setda 2025-2029. Proses perbandingan ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi sejauh mana konsistensi dan korelasi antar dokumen perencanaan level Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan level Perangkat Daerah, karena konsistensi perencanaan tersebut penting dalam memastikan terealisasinya kebijakan perencanaan tersebut sampai pada level terluar hingga berdampak pada peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Stakeholder

Terdapat hasil uraian kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).



BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan.

Memuat penjabaran program dan kebijakan serta penjelasan mengenai dasar penetapannya sebagai cara untuk mencapai sasaran.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026.

BAB V PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.



1FCFCF7D7F

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Renja Tahun 2025 Triwulan III

Sebelum dilaksanakan penyusunan program dan kegiatan Tahun 2026, maka terlebih dahulu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja untuk mengetahui sudah sejauh mana ketercapaian sasaran, program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang telah dilaksanakan, sehingga diharapkan penyusunan program/kegiatan Tahun 2026 telah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil evaluasi yang digunakan adalah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), maka evaluasi yang digunakan adalah evaluasi Renja Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi 8 (delapan) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan serta 88 (delapan puluh delapan) sub kegiatan, alokasi anggaran dari APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.741.567.811.722,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.680.324.320.240,00 dan Belanja Modal Rp.61.243.491.482,00 Penyerapan anggaran tersebut sampai dengan bulan September (Triwulan III) masing-masing adalah Rp.329.868.761.548,00 untuk Belanja Operasi atau 44,748% dan untuk Belanja Modal sebesar Rp.3.846.879.480,00 atau 3,27%. Dengan demikian total penyerapan anggaran tahun 2025 sampai dengan bulan September adalah sebesar Rp. Rp. 342.406.552.118,00 atau 46,17%. Nilai



tersebut menunjukkan bahwa capaian penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan belanja operasi maupun belanja modal termasuk baik.

Secara umum program dan kegiatan tersebut telah berhasil diselenggarakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Keberhasilan ini dapat berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama serta berdasarkan persentase penyerapan anggaran dan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025, dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama yaitu Proporsi Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, Tingkat Inflasi, Persentase BUMD Sehat, Indeks Reformasi Hukum, Nilai Kualitas Kebijakan Daerah, Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Pelayanan Publik, Nilai Evaluasi Kelembagaan, Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A, Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan, Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Berkaitan dengan indikator tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan konkrit dalam rangka mendukung ketercapaian kinerja sekretariat daerah provinsi.

Sekretariat Daerah melakukan berbagai program dan kegiatan sebagai penyelenggara perumusan kebijakan umum, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah kepada para perangkat daerah dan menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai penghubung antara Kepala Daerah dengan Perangkat daerah teknis.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, seperti yang dijabarkan dalam tabel 2.1.



Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025
Dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat s.d Triwulan III Tahun 2025

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)				
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH											
1	1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	50.25	N/A	50.15	62.72	125.06	50.20	50.20	99.90			
1	1	1	1	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang Diimplementasikan secara Tepat	51.01	N/A	50.00	50.00	100	50.50	50.50	99.00
1	1	1	2	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Diimplementasikan secara Tepat	51.01	N/A	50.00	50.00	100	50.50	50.50	99.00
1	1	1	3	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Diimplementasikan secara Tepat	99.51	N/A	97.55	50.00	100	98.53	98.53	99.01%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	87.21	N/A	85.50	89.78	105	86.35	86.35	99.01			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	N/A	100	100	100	100	100	100			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)			
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100		
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100		
1	1	2	BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA									
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Harmonis	87.99	N/A	87.10	100	114.81	N/A	85	N/A		
		Indeks Reformasi Hukum	87.99	N/A	N/A	N/A	N/A	83.41	85	96,60		
1	1	3	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pembentukan Hukum Daerah Provinsi	100	N/A	100	100	100	N/A		
1	1	3	1	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan HAM yang Difasilitasi	100	N/A	100	100	100.00	100.00%	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Hukum dan HAM	88.25	N/A	86.51	95.70	110.62	87.37	87.37	99.02%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	100	100	100	100.00	100.00%	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100.00	100.00%	



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100.00	100.00%
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT										
		Program Kesejahteraan Rakyat	50.25	N/A	50.15	78.72	156.96	50.20	50.20	99.90
		Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	71.41	N/A	70.00	70.00	100	70.70	70.70	99.00
		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	71.41	N/A	70.00	70.00	100	70.70	70.70	99.00
		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	71.41	N/A	70.00	70.00	100	70.70	70.70	99.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	92.25	N/A	90.44	77.34	85.51	91.34	91.34	99.01
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	N/A	100	100	100	100	100	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Biro yang Terlayani Arsip Dinamis	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
BIRO BADAN USAHA MILIK DAERAH, INVESTASI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD	50.25	N/A	50.15	78.06	155.65	50.20	50.20	99.90
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Investasi Daerah yang Diimplementasikan secara Tepat	51.01	N/A	50.15	72.18	143.93	50.50	50.50	99.00
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMN dan BLUD	Persentase Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD yang Diimplementasikan secara Tepat	51.01	N/A	50.15	83.94	161.49	50.50	50.50	99.00
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan lingkup Administrasi Pembangunan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Disampaikan	5	N/A	4	5	125	5	5	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	90.74	N/A	88.95	89.55	100.67	89.94	89.94	99.11
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	100	100	100	100	100.	100.
	Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai yang Meningkatkan Kompetensinya	100	N/A	100	100	100	100	100.	100.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100.	100.
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100.	100.
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tim Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Tenaga Teknis	100	N/A	100	100	100	100	100.	100.
	BIRO PEREKONOMIAN									
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	84.30	N/A	50.15	84.51	168.51	84.47	84.47	100.20
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian yang Diimplementasikan secara Tepat	84.30	N/A	50.00	91.94	183.88	84.47	84.47	100.20
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Diimplementasikan secara Tepat	84.30	N/A	50.00	94.46	188.92	84.47	84.47	100.20



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Perekonomian	95.39	N/A	95.20	97.50	102.41	95.29	95.29	99.89
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	100	100	100	100	100.	100.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Maturitas UKPBJ	3	3	3	3	100	3	3	100
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pemilihan Penyedia yang Tepat Waktu	100	N/A	96	100	96	96	96	96
		Persentase Pengadaan Barang Jasa yang Dilaksanakan Tepat Sasaran	100	N/A	96	100	96	96	96	96
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Peningkatan Fitur Sistem Informasi Pengadaan	100	N/A	96	100	96	96	96	96
		Persentase Layanan SPSE yang Dipenuhi	100	N/A	96	100	96	96	96	96



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Permasalahan Barang dan Jasa yang Diselesaikan	100	N/A	96	100	96	96	96	96
		Nilai Kematangan UKPBJ Dimensi Kelembagaan	3	N/A	3	3	100	3	3	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	97.01	N/A	96.82	98.33	101.55	96.91	96.91	99.89
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Meningkatkan Kompetensinya	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	BIRO ORGANISASI									
	Program Penataan Organisasi	Peringkat Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	4	N/A	3	4	133.33	3	3	75



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Presentase Perangkat Daerah yang Ditata Kelembagaannya	100	N/A	80	80	100	100	100	100
		Indikator Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	90	N/A	80	80	100	85	85	94.44
		Persentase Peta Jabatan Yang Sesuai Anjab Hasil Verifikasi	100	N/A	80	100	125	100	100	100
		Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Minimal Kategori "B"	100	N/A	92	100	108.69	94	94	94
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Kebijakan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang diinternalisasikan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perangkat Daerah dengan Pelaporan Kinerja Berkualitas	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kebijakan Sistem Kerja Dinamis yang Sesuai Ketentuan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Standar Pelayanan	100	N/A	85	100	117.64	85	85	85
		Nilai Pelaporan Kinerja	12.54	N/A	12.35	13.55	109.71	12.44	12.44	99.20
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Budaya Kerja Minimal "Baik"	100	N/A	65.79	100	151.99	100	100	100



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Sistem Kerja Dinamis	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik	100	N/A	80	100	100	100	100	100
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.47	N/A	87.71	92.17	108.80	88.59	88.59	99.01
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	N/A	100	100	100	100	100	100.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	N/A	100	100	100	100	100	100
			100	N/A	100	100	10	100	100	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN										



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Administrasi Pimpinan	94.80	N/A	94.61	96.03	101.50	94.71	94,71	99,05
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebutuhan Informasi dan Komunikasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Layanan Keprotokolan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	BIRO UMUM									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Umum	92.50	N/A	90.68	84.79	93.50	91.58	91.58	99.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran Sekretariat Daerah	26.20	N/A	26.15	28.20	107,63	26.18	26.18	99.92
		Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Nilai Komponen Pelaporan dan Evaluasi Sekretariat Daerah	16.14	N/A	16.11	18.95	117.62	16.13	16.13	99.93
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai dan Pimpinan yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	12	N/A	12	12	100	12	12	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah yang Diamankan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Terlayani Tepat Waktu	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pegawai yang Memenuhi Syarat Kompetensi Jabatan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase Biro yang Terlayani Arsip Dinamis	100	N/A	100	100	100	100	100	100



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2026 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Sekretariat Daerah yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah yang Dipelihara	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	100	N/A	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100	N/A	100	100	100	100	100	100



Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa terdapat perbedaan atau perubahan indikator untuk sub kegiatan tahun 2023, 2024 maupun tahun 2025, sehingga tabel diatas menjabarkan masing-masing capaian dari setiap indikator kegiatan masing-masing tahun, namun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 dan pelaksanaan sampai Tahun 2024 secara umum telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Renja Tahun 2024.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, dari hasil diatas dapat disampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Hampir seluruh program dan kegiatan mencapai target yang telah direncanakan.
2. Terdapat beberapa program dan kegiatan melebihi dari target realisasi yang telah direncanakan.
3. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak mencapai target yang telah direncanakan.

Berdasarkan capaian tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung terpenuhinya target kinerja yaitu pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, selain itu adanya monitoring berkelanjutan sehingga dimungkinkan adanya perubahan strategi dalam pencapaian output dapat lebih maksimal dalam hal dukungan waktu dan sumber penggunaan anggaran yang terukur.

Dengan tercapainya target program tersebut dapat disampaikan bahwa target perencanaan strategis lima tahunan perangkat daerah (Renstra PD) dapat terealisasi sesuai target yang telah disesuaikan dan penyesuaian-penyesuaian target yang telah ditetapkan.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan salah satu unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, sekretariat daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022, susunan organisasi sekretariat daerah terdiri dari sekretaris daerah, tiga asisten, sembilan biro, 12 bagian tata usaha, staf ahli, dan kelompok jabatan fungsional. Secara lebih rinci struktur tersebut terjabarkan sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 - 2.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - 2.1.1. Bagian Tata Usaha
 - 2.2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 2.2.1. Bagian Tata Usaha
 - 2.3. Biro Kesejahteraan Rakyat
 - 2.3.1. Bagian Tata Usaha
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 3.1. Biro Perekonomian
 - 3.1.1. Bagian Tata Usaha
 - 3.2. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
 - 3.2.1. Bagian Tata Usaha
 - 3.3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3.3.1. Bagian Tata Usaha
4. Asisten Administrasi Umum
 - 4.1. Biro Organisasi
 - 4.1.1. Bagian Tata Usaha



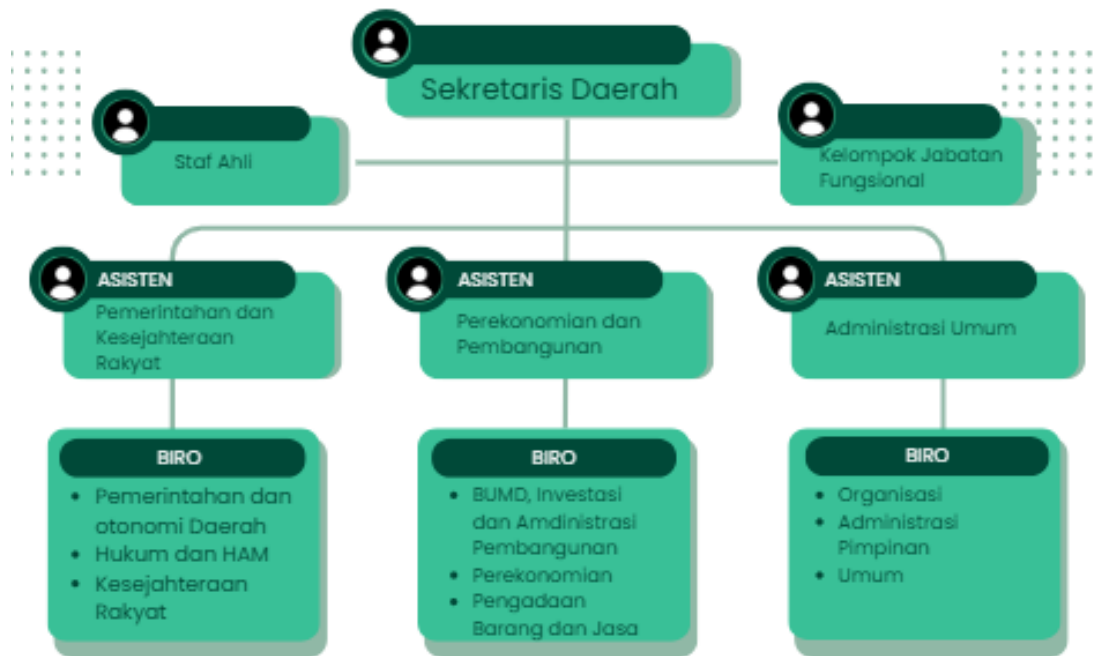
- 4.2. Biro Administrasi Pimpinan
 - 4.2.1. Bagian Tata Usaha
 - 4.2.2. Bagian Protokol
- 4.3. Biro Umum
 - 4.3.1. Bagian Tata Usaha
 - 4.3.2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset
 - 4.3.3. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah
5. Staf Ahli Gubernur
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya, tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 adalah bahwa sekretaris daerah selaku pimpinan unit memimpin, mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya. Kemudian, setiap pelaporan yang diterima sekretaris daerah dari bawahannya, perlu diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Untuk itu, sekretaris daerah wajib mengadakan rapat berkala. Disamping itu dalam rangka pembinaan dan pengawasan setiap pejabat struktural harus melaksanakan Sistem Pengendalian Intern sesuai ketentuan dan dalam melaksanakan tugas sekretariat daerah, Kepala Biro menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai kebutuhan.



Gambar 2. 1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

A. Sekretariat Daerah

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas lima elemen yaitu *strategic apex* (kepala daerah), *middle line* (sekretaris daerah), *operating core* (dinas daerah), *technostructure* (badan daerah), dan *supporting staff* (staf pendukung). Lalu ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa sekretariat daerah merupakan unsur staf. Berdasarkan regulasi tersebut, sekretaris daerah sebagai kepala sekretariat daerah merupakan *middle line* dan sekretariat daerah sebagai sebuah unit merupakan *supporting staff*.

Secara teori, elemen *middle line* merupakan lapisan organisasi yang menghubungkan *strategic apex* atau manajemen puncak (kepala daerah)



1FCFCF7D7F

dengan *operating core* atau dalam hal ini dinas teknis. Di dalam struktur organisasi, *middle line* bertanggung jawab dalam menerjemahkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh manajemen puncak ke tingkat operasional. Sehingga perannya adalah mengomunikasikan arahan strategis dari manajemen puncak kepada operasional dan umpan balik dari operasional ke manajemen puncak. Sementara itu, *supporting staff* merupakan lapisan organisasi yang menyediakan layanan pendukung untuk membantu organisasi berfungsi secara efektif dan efisien. Aktivitas *supporting staff* tidak berhubungan langsung dengan aktivitas utama operasional organisasi tetapi penting untuk mendukung fungsi organisasi secara keseluruhan.

Selanjutnya, peran *middle line* dan *supporting staff* tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tugas fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 yaitu bahwa tugas pokok sekretaris daerah adalah ‘merumuskan dan menetapkan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengoordinasian administratif, membina, mengawasi, mengendalikan, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas oleh perangkat daerah serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli gubernur’. Di dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi sekretariat daerah adalah:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah provinsi meliputi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum sebagai bahan penetapan kebijakan gubernur;
- 2) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum lingkup sekretariat daerah provinsi;
- 3) Penyelenggaraan kepemimpinan manajemen pada sekretariat daerah provinsi;



- 4) Penyelenggaraan koordinasi dan pelayanan administratif, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi oleh perangkat daerah; serta
- 5) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli gubernur.

Merujuk kepada peraturan gubernur (pergub) di atas, di dalam menjalankan perannya, sekretaris daerah dibantu oleh unit yang menangani urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum. Di dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022, nomenklatur unit tersebut adalah 'asisten' yang membawahkan biro-biro. Masing-masing 'asisten' memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 yaitu:

- a. Pasal 5 menyebutkan bahwa Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas pokok 'merumuskan, memonitor dan mengevaluasi kebijakan umum bidang pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat, serta kebijakan strategis program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi, melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian untuk memandu dan menyinergikan implementasinya oleh biro dan perangkat daerah lingkup tugasnya'. Adapun fungsinya adalah:
 - 1) Penyelenggaraan perumusan, monitoring, dan evaluasi kebijakan umum lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2) Penyelenggaraan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian serta fasilitasi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administratif lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;



- 4) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 5) Penyelenggaraan perumusan kebijakan strategis serta pemanduan dan penyinerjian pelaksanaan program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; serta
- 6) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Pasal 10 menyebutkan bahwa Asisten Perekonomian dan Pembangunan memiliki tugas pokok ‘merumuskan, monitoring dan evaluasi kebijakan umum bidang perekonomian, badan usaha milik daerah, investasi, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan strategis meliputi program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi, melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian untuk memandu dan menyinerjikan pelaksanaan program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi oleh biro dan perangkat daerah dalam lingkup tugasnya’. Adapun fungsinya adalah:

- 1) Penyelenggaraan perumusan, monitoring, dan evaluasi kebijakan umum lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian serta fasilitasi lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administrative lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 4) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 5) Penyelenggaraan perumusan kebijakan strategis serta pemanduan dan penyinerjian pelaksanaan program, kegiatan, atau pekerjaan



unggulan daerah provinsi lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan; serta

6) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Pasal 17 menyebutkan bahwa Asisten Administrasi Umum memiliki tugas pokok 'merumuskan, monitoring, evaluasi kebijakan umum bidang organisasi, administrasi pimpinan serta umum, serta kebijakan strategis program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi, melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian untuk memandu dan menyinergikan implementasinya oleh biro dan perangkat daerah dalam lingkup tugasnya'. Adapun fungsinya adalah:

- 1) Penyelenggaraan perumusan, monitoring, dan evaluasi kebijakan umum lingkup Asisten Administrasi Umum;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, supervise, pembinaan, dan pengendalian, serta fasilitasi lingkup Asisten Administrasi Umum;
- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan administratif dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Asisten Administrasi Umum;
- 4) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi lingkup Asisten Administrasi Umum;
- 5) Penyelenggaraan perumusan kebijakan strategis serta pemanduan dan penyinergian pelaksanaan program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan daerah provinsi lingkup Asisten Administrasi Umum; serta
- 6) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Dari uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tersebut, tugas asisten membantu sekretaris daerah dalam menjalankan perannya sebagai *middle line* adalah memandu, menyinergikan, mengawasi, membina, dan mengendalikan baik tugas-tugas perangkat daerah di bawah lingkup koordinasinya maupun program, kegiatan, atau pekerjaan unggulan Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, tugas asisten dalam menjalankan peran sekretariat daerah sebagai *supporting staff* adalah mengelola tugas biro-biro yang berada di bawah lingkup kewenangannya.

B. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok ‘memimpin, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah provinsi serta pelayanan administratif bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, meliputi otonomi daerah, pemerintahan dan kerja sama yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya’. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan
- 2) administratif dalam bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- 3) Penyelenggaraan administrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;



- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
- 5) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam hal fasilitasi otonomi daerah, karakter tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terbagi dua yaitu tugas ‘memfasilitasi’ serta tugas ‘menyusun’. Tugas ‘menyusun’ berkaitan dengan penyusunan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan bahan tindak lanjut evaluasi kecamatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan rencana tindak lanjut kapasitas daerah provinsi, penyusunan rekomendasi peningkatan kapasitas daerah kabupaten/kota, penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Jawa Barat, penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat, dan penyusunan dokumen standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tugas ‘memfasilitasi’ berkaitan dengan fasilitasi administrasi kepala daerah/wakil kepala daerah serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, fasilitasi peringatan hari jadi provinsi dan kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan pengawasan SPM provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam hal fasilitasi pemerintahan, dua karakter tugas dan fungsi pada fasilitasi otonomi daerah juga diterapkan. Dalam tugas ‘menyusun’, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan penyusunan laporan pelaksanaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), penyusunan kebijakan persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, penyusunan bahan penataan daerah, Sedangkan untuk tugas ‘memfasilitasi’, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan fasilitasi kesekretariatan gubernur dalam penyelenggaraan tugas dekonsentrasi, fasilitasi



perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan, fasilitasi administrasi penataan desa, fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, serta fasilitasi penamaan rupabumi. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga melaksanakan pengoordinasian dalam perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang penanggulangan bencana daerah dan satuan polisi pamong praja,

Adapun dalam hal fasilitasi kerja sama, karakter tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah ‘memfasilitasi’. Untuk itu, biro melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi naskah kerja sama baik dalam negeri, luar negeri, maupun pihak ketiga. Fasilitasi ini dilakukan tidak hanya untuk perangkat daerah provinsi namun juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terutama kerja sama yang bersifat antar daerah dan antar daerah dengan pihak luar negeri. Dalam melakukan fasilitasi tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga/instansi vertikal. Disamping itu, tugas biro juga meliputi fasilitasi penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, ASN, anggota DPRD baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi pendampingan kunjungan kerja gubernur/wakil Gubernur ke luar negeri, serta fasilitasi penerimaan kunjungan kerja mitra dan calon mitra kerja sama luar negeri.

C. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tugas pokok Biro Hukum dan HAM adalah ‘menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, analisis dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi produk hukum daerah provinsi,



kajian dan telaahan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya'. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022.

Dari kalimat tugas pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum, tugas pokok Biro Hukum dan HAM Setda Jabar melingkupi fasilitasi hukum daerah, yang mencakup penyusunan, pengkajian, serta evaluasi berbagai kebijakan hukum di tingkat daerah, bantuan dan konsultasi hukum, penyelesaian sengketa hukum, serta pembinaan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Adapun fungsi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, analisis, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 2) Penyelenggaraan administrasi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Terkait perumusan kebijakan umum di lingkup pemerintah daerah, Biro Hukum dan HAM memiliki peran dalam memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah (perda dan pergub). Tugas tersebut juga mencakup mengkaji dan menyusun rancangan peraturan daerah serta produk hukum lainnya, baik yang diinisiasi oleh perangkat daerah maupun legislatif. Sementara itu, dalam hal penanganan masalah hukum, Biro Hukum dan HAM berperan dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada pemerintah daerah yang juga meliputi menangani dan membantu penyelesaian sengketa



hukum yang melibatkan pemerintah daerah, baik di dalam maupun luar pengadilan.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta untuk memberikan akses informasi hukum bagi masyarakat, Biro Hukum dan HAM juga bertugas memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait hukum kepada masyarakat, perangkat daerah provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu juga mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan dan keputusan kepala daerah. Adapun terkait pengelolaan hak asasi manusia (HAM) di daerah, Biro Hukum dan HAM bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam mengoordinasikan dan mengelola kebijakan terkait hak asasi manusia di tingkat daerah, termasuk perlindungan HAM dan pemenuhan hak-hak warga negara.

D. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu biro yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 8 dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2022 menyatakan bahwa tugas pokok Biro Kesejahteraan Rakyat adalah ‘membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar’. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki empat fungsi yaitu:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) Penyelenggaraan administrasi Biro Kesejahteraan Rakyat;



- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan umum merujuk kepada perumusan regulasi bidang kesejahteraan rakyat. Di dalam pelaksanaan fungsi ini, Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dimulai dari penyusunan *policy brief*, pembahasan isi regulasi, hingga penetapannya. Pelibatan *stakeholder* dilakukan untuk memastikan regulasi telah mempertimbangkan setiap sudut pandang.

Selain itu dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, Biro Kesejahteraan Rakyat juga melakukan fasilitasi penyusunan regulasi oleh perangkat daerah. Fasilitasi yang dilakukan dimulai dari pelayanan administrasi yaitu pemberian paraf koordinasi untuk proses penetapan serta registrasi regulasi kepada Biro Hukum dan HAM hingga pemberian *review* dan tanggapan atas draf regulasi yang disampaikan perangkat daerah. Di dalam proses ini perangkat daerah mengundang Biro Kesejahteraan Rakyat dari sejak pembahasan draf awal hingga penetapan regulasi. Adapun perangkat daerah yang secara spesifik difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan unit kerja yang menangani urusan: kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian, perhubungan, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Masih berkaitan dengan penyelenggaraan rumusan kebijakan, setelah sebuah regulasi ditetapkan terutama yang diinisiasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, dilakukan monitoring dan evaluasi (*monev*) terhadap implementasinya. *Monev* terutama difokuskan kepada regulasi-regulasi yang bersifat strategis dan/atau prioritas dengan cara pengecekan pada instrumen *monev* yang



sebelumnya telah disusun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi benar-benar diimplementasikan sesuai tujuan dan kelompok sasarannya.

Selain berkoordinasi dan memfasilitasi perangkat daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat juga menangani urusan residual dengan melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan bina mental spiritual. Beberapa fasilitasi yang dilakukan adalah penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), pemberian hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Selain itu juga memfasilitasi dialog Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat serta pemberian hibah kepada lembaga keagamaan maupun lembaga pendidikan keagamaan. Hibah diberikan dalam rangka peningkatan kualitas lembaga-lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan peribadatan maupun pendidikan agama kepada masyarakat.

Selain pemberian hibah dan fasilitasi kegiatan keagamaan sebagaimana tersebut di atas, Biro Kesejahteraan Rakyat juga melakukan pengelolaan lembaga keagamaan yang menjadi aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Badan Pengelola Islamic Center (BPIC) yang mencakup Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) Jawa Barat, LPTQ, Masjid Atta'awun Bogor, Masjid Raya Bandung, dan Masjid Raudhatul Irfan Sukabumi. Peran Biro Kesejahteraan Rakyat berfokus pada pengelolaan pengurus lembaga seperti Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) pada masjid-masjid. Pengelolaan pengurus dilakukan untuk memastikan agar lembaga-lembaga tersebut aktif berkegiatan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

E. Biro Perekonomian

Sesuai Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022, Biro Perekonomian mempunyai tugas pokok 'menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas



perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang perekonomian meliputi sumber daya air, energi dan pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, infrastruktur daerah, penataan ruang, perumahan dan permukiman, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil, serta penanaman modal, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'. Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Perekonomian mempunyai fungsi yaitu:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Perekonomian;
2. Penyelenggaraan administrasi Biro Perekonomian;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Perekonomian;
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan umum merujuk kepada perumusan regulasi bidang perekonomian dan pembangunan. Di dalam pelaksanaan fungsi ini, Biro Perekonomian melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dimulai dari penyusunan *policy brief*, pembahasan isi regulasi, hingga penetapannya. Pelibatan *stakeholder* dilakukan untuk memastikan regulasi telah mempertimbangkan setiap sudut pandang.

Selain itu dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, Biro Perekonomian juga melakukan fasilitasi penyusunan regulasi oleh perangkat daerah. Fasilitasi yang dilakukan dimulai dari pelayanan administrasi yaitu pemberian paraf koordinasi untuk proses penetapan serta registrasi regulasi kepada Biro Hukum dan HAM hingga pemberian *review* dan tanggapan atas draf regulasi yang disampaikan perangkat daerah. Di dalam proses ini perangkat daerah mengundang Biro Perekonomian dari sejak pembahasan draf awal hingga penetapan regulasi. Adapun perangkat daerah yang secara spesifik



difasilitasi oleh Biro Perekonomian merupakan unit kerja yang menangani urusan: sumber daya air, energi dan pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, infrastruktur daerah, penataan ruang, perumahan dan permukiman, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil, serta penanaman modal.

Masih berkaitan dengan penyelenggaraan rumusan kebijakan, setelah sebuah regulasi ditetapkan terutama yang diinisiasi oleh Biro Perekonomian, dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasinya. Monev terutama difokuskan kepada regulasi-regulasi yang bersifat strategis dan/atau prioritas dengan cara pengecekan pada instrumen monev yang sebelumnya telah disusun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi benar-benar diimplementasikan sesuai tujuan dan kelompok sasarannya.

Selain berkoordinasi dan memfasilitasi perangkat daerah, Biro Perekonomian juga menangani urusan residual yaitu dengan melakukan koordinasi, fasilitasi, dan perumusan bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah, yang diantaranya melalui penerapan beberapa strategi kunci yaitu 1). Keterjangkauan harga yang dilakukan melalui intervensi harga yakni mengatur harga barang-barang pokok, dan atau penyediaan bantuan sosial untuk masyarakat; 2). Ketersediaan pasokan barang untuk menjaga kestabilan harga, melalui koordinasi pemantauan dan pengelolaan stok barang di pasar dan melakukan diversifikasi sumber pasokan melalui Kerjasama dengan berbagai sumber produksi untuk memastikan pasokan barang tidak terhambat; 3). Kelancaran jalur distribusi, melalui peningkatan infrastruktur dan koordinasi antar pemangku kepentingan; 4). Komunikasi efektif, salah satunya melalui Pengembangan berkelanjutan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat (SILINDA JABAR). Aplikasi ini diarahkan tidak hanya meng-*update* perkembangan harga kebutuhan pokok, tetapi juga menginformasikan potensi produksi dan pasokan pangan strategis, sehingga



terdapat integrasi aspek produksi, distribusi, perdagangan, dan manajemen stok.

Selain fungsi pengendalian inflasi, Biro Perekonomian juga menyelenggarakan fungsi koordinasi dan fasilitasi pembiayaan dan akses keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, Biro Perekonomian berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, sehingga memudahkan akses masyarakat dan UMKM terhadap sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Biro juga berupaya menjalin kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menciptakan program-program pembiayaan yang inovatif, serta memberikan informasi mengenai berbagai skema pembiayaan yang tersedia, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

F. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022, Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BUMD, Investasi, dan Adbang) mempunyai tugas pokok ‘menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pembinaan, pengoordinasian, dan evaluasi pelayanan administrasi bidang BUMD, investasi daerah, dan administrasi pembangunan, meliputi BUMD lembaga keuangan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), BUMD non lembaga keuangan, investasi daerah, dan administrasi pembangunan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan’. Biro BUMD, Investasi dan Adbang mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang BUMD, investasi, dan administrasi pembangunan;



- 2) Penyelenggaraan administrasi BUMD, investasi, dan administrasi pembangunan;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan; dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam hal perumusan kebijakan, Biro BUMD, Investasi, dan Adbang memfasilitasi penyusunan kebijakan untuk urusan BLUD, BUMD (lembaga keuangan dan lembaga non keuangan (LK/NLK)), dan investasi daerah. Untuk penyusunan kebijakan berkaitan BLUD, BUMD dan investasi daerah, Biro BUMD, Investasi, dan Adbang memiliki tim pendamping khusus. Hal ini dilakukan agar kebijakan dapat mencakup segala sisi.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada urusan administrasi pembangunan, Biro BUMD, Investasi, dan Adbang melakukan monev. Beberapa hal yang di monitor dan di evaluasi adalah pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemanfaatan penyaluran bantuan keuangan oleh kabupaten/kota penerima. Disamping itu, monev juga dilakukan terhadap urusan BUMD dan BLUD.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan terbaru yang diberlakukan oleh pemerintah pusat peran Biro BUMD, Investasi, dan Adbang dalam urusan inovasi pembiayaan adalah memberikan alternatif pembiayaan untuk membiayai urusan pemerintahan yang bersumber dari anggaran di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alternatif pembiayaan yang direkomendasikan memberikan akses bagi pihak ketiga untuk menyalurkan dana yang mereka miliki untuk digunakan dalam membiayai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD yang mayoritas bersumber dari perolehan pajak.

G. Biro Pengadaan Barang dan Jasa



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ) merupakan salah satu unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Biro PBJ bertanggungjawab atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Biro PBJ berpedoman pada peraturan-peraturan yang diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro PBJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif bidang pengadaan barang dan jasa, meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi utama Biro PBJ, diantaranya yakni:

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang meliputi:
 - Perencanaan pengadaan barang dan jasa, proses ini mencakup penyusunan rencana pengadaan berdasarkan kebutuhan dari seluruh perangkat daerah yang meliputi pengidentifikasian barang dan jasa yang dibutuhkan, perhitungan anggaran yang sesuai, serta memastikan bahwa pengadaan berjalan sesuai dengan prioritas daerah.
 - Pelaksanaan barang dan jasa, dimana biro bertugas melaksanakan pendampingan pada proses pengadaan. Proses ini mencakup penerbitan dokumen pengadaan; pelaksanaan pengadaan melalui



berbagai metode; seleksi penyedia barang dan jasa; pengelolaan kontrak pengadaan; serta pengawasan.

- Pengendalian dan pengawasan, fungsi ini mencakup pengawasan dan pengendalian baik sebelum, selama, maupun setelah kontrak pengadaan dilaksanakan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kualitas barang/jasa yang disediakan oleh penyedia, memastikan bahwa barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, dan bahwa proses pelaksanaan pengadaan berjalan tepat waktu dan sesuai anggaran.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan layanan pengadaan secara elektronik oleh dijalankan oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang merupakan bagian dari Biro PBJ. LPSE bertanggung jawab untuk untuk memfasilitasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya berdasarkan amanat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 3. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang mencakup:
 - Sosialisasi kebijakan dan pedoman pengadaan berdasarkan regulasi nasional yang ada yang mencakup prosedur, petunjuk teknis, serta memastikan bahwa peraturan tersebut dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan.
 - Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan, melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan keterampilan bagi petugas pengadaan agar mampu menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar profesional.

Biro PBJ memegang peran strategis dalam mengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan tugas yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga



evaluasi, Biro PBJ bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip efisiensi. Pemanfaatan sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari upaya Biro PBJ dalam meningkatkan kualitas pengadaan di Provinsi Jawa Barat.

H. Biro Organisasi

Biro Organisasi merupakan salah satu biro yang menjalankan peran *supporting staff*. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2022, tugas pokok Biro Organisasi adalah ‘menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang organisasi meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya’. Di dalam melaksanakan tugas pokok, Biro Organisasi memiliki fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang organisasi;
- 2) Penyelenggaraan administrasi Biro Organisasi;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Organisasi; dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian tugas pokok bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi Biro Organisasi mencakup bidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tata laksana.



Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kelembagaan, dilakukan perumusan kebijakan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta kebijakan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagai penjabaran dari regulasi pusat. Disamping itu, dilakukan pula fasilitasi pembentukan Cabang Dinas (Cabdin), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada level provinsi. Untuk fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Biro Organisasi memberikan pembinaan, pendampingan, dan rekomendasi dalam hal pembentukan organisasi dari penetapan struktur organisasi hingga uraian tugas. Rekomendasi kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pengesahan lebih lanjut.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang analisis jabatan, Biro Organisasi melakukan penyusunan analisis jabatan, kebijakan formasi jabatan, dan kebijakan standar kompetensi jabatan. Dilakukan juga evaluasi jabatan yang menetapkan kelas dan nilai jabatan yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran penghasilan yang wajar diterima oleh suatu jabatan. Hal-hal yang dilaksanakan pada level provinsi ini juga diterapkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui pembinaan, pendampingan, dan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang reformasi birokrasi, Biro Organisasi menyusun kebijakan penerapan reformasi birokrasi seperti roadmap reformasi birokrasi yang memuat rencana aksi implementasi. Untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi diterapkan secara menyeluruh, dilaksanakan pembinaan kepada perangkat daerah dan penilaian melalui evaluasi implementasi reformasi birokrasi oleh perangkat daerah. Pembinaan dan pendampingan juga dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Biro Organisasi juga menyusun strategi implementasi reformasi birokrasi terutama dalam lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kemudian untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang akuntabilitas kinerja, Biro Organisasi mengambil peran dalam mengoordinasikan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar 50
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

penyusunan arsitektur kinerja pembangunan pada level provinsi oleh perangkat daerah. Juga pendampingan dalam penyusunan arsitektur kinerja pada lingkup perangkat daerah. Disamping itu, mengoordinasikan pengukuran kinerja secara berkala secara bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan melalui sistem teknologi informasi. Berkenaan dengan pengukuran kinerja tahunan, Biro Organisasi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada level provinsi dan mendampingi penyusunan LKIP pada tingkat perangkat daerah untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB. Pengoordinasian juga dilakukan dalam penyusunan perjanjian kinerja jabatan pimpinan tinggi (JPT) pada perangkat daerah dan sebagaimana pada bidang lainnya, pendampingan dan pembinaan dilakukan untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Seperti halnya kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana, budaya kerja merupakan bidang yang termasuk dalam komponen pengukuran tingkat implementasi reformasi birokrasi. Budaya kerja adalah apa yang dicoba diubah dalam manajemen perubahan. Pengoperasionalannya oleh Biro Organisasi adalah pada penyusunan kebijakan berkaitan budaya kerja dan pengukuran budaya kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Barat.

Berlanjut kepada penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang tatalaksana, Biro Organisasi melakukan perumusan kebijakan terkait standar kerja seperti jam kerja, standar pakaian dinas, tata naskah dinas, dan tata hubungan kerja. Termasuk dalam bidang ini adalah penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta pendampingan penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) perangkat daerah. Selain terkait standar kerja, penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tatalaksana mencakup pembinaan tentang penerapan standar pelayanan publik oleh perangkat daerah. Kebijakan tentang penerapan pelayanan publik juga disusun oleh Biro Organisasi berikut koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi penerapan kebijakan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Baik terkait standar kerja maupun pelayanan publik, pembinaan kepada perangkat daerah juga dilakukan.



I. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan merupakan salah satu unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum. Dengan ditetapkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi, berimplikasi pada perubahan struktur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang kemudian ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022. Berbeda dengan biro-biro lain, Biro Administrasi Pimpinan membawahkan Bagian Tata Usaha dan Bagian Protokol (Pasal 8). Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022, Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas ‘membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif bidang administrasi pimpinan, meliputi tata usaha, materi dan komunikasi pimpinan, serta protokol yang menjadi kewenangan provinsi’. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan pelayanan administratif dalam bidang administrasi pimpinan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi Biro Administrasi Pimpinan;
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Administrasi Pimpinan; dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tugas terdapat tiga pengelompokan tugas utama Biro Administrasi Pimpinan yaitu pelayanan kerumahtanggaan, pelayanan keprotokolan, serta pelayanan materi dan komunikasi pimpinan. Penyelenggaraan tugas pelayanan kerumahtanggaan meliputi fasilitasi urusan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur pada ruang kerja dan rumah



jabatan serta penyiapan rencana kerja harian operasional gubernur dan wakil gubernur. Selain itu juga penyiapan penerimaan tamu dan istri/suami gubernur dan wakil gubernur.

Selanjutnya, penyelenggaraan tugas pelayanan keprotokolan mencakup fasilitasi acara yang dihadiri pimpinan dimulai dari penyiapan bahan acara/upacara, rapat dinas, resepsi, penyiapan bahan laporan pimpinan, penyusunan buku panduan acara, penyiapan koordinasi gladi lapangan dalam acara resmi dan acara kenegaraan, koordinasi ajudan pimpinan, pendokumentasian acara kegiatan pimpinan pemerintah provinsi, penyiapan tanda kenang-kenangan, serta pemantauan dan evaluasi pengaturan acara.

Selain itu juga memfasilitasi tamu mulai dari penyiapan bahan koordinasi persiapan penerimaan, akomodasi dan transportasi kunjungan, penyiapan bahan rencana agenda kunjungan tamu, perjalanan dinas pimpinan serta penyiapan bahan pelaporan kegiatan tamu. Lebih jauh, pelayanan dalam hal keprotokolan juga meliputi hubungan keprotokolan serta koordinasi dengan instansi yang memerlukan kegiatan keprotokolan

Terakhir, penyelenggaraan tugas pelayanan materi dan komunikasi pimpinan mencakup tiga objek, yaitu:

- 1) Fasilitasi penyiapan materi pimpinan berupa penyiapan materi kebijakan, penyusunan notulensi rapat, naskah sambutan dan pidato gubernur dan wakil gubernur serta penggandaan materi rapat;
- 2) Fasilitasi komunikasi pimpinan berupa menyelenggarakan hubungan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah untuk agenda yang bersifat khusus, fasilitasi aspirasi masyarakat kepada pimpinan berupa kajian, seminar, lokakarya, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan aspirasi langsung, termasuk menyelenggarakan kerja sama promosi, sosialisasi dan pemasangan advertorial iklan/iklan layanan masyarakat;
- 3) Fasilitasi dokumentasi pimpinan meliputi pendokumentasian kegiatan, fasilitasi peliputan, konferensi pers dan pelayanan media kegiatan gubernur dan wakil gubernur, serta program strategis gubernur dan wakil



gubernur. Selain itu juga menyiapkan penyiapan dan produksi bahan materi pimpinan untuk konten di kanal digital, media sosial, media elektronik, media *online*, media cetak dan media luar ruang termasuk penataan foto dan media digital di koridor/lorong lingkup gedung kantor dan rumah jabatan.

Berdasarkan poin-poin di atas, Biro Administrasi Pimpinan secara jelas bertanggung jawab langsung dalam memberikan pelayanan dalam bentuk administrasi dan fasilitasi kepada pimpinan baik itu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah ataupun pejabat yang mewakili pimpinan tersebut. Selain itu juga memberikan informasi dalam bentuk dokumentasi serta publikasi kegiatan pimpinan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui seluruh rangkaian kegiatan pimpinan.

J. Biro Umum

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022, Biro Umum mempunyai tugas pokok 'menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha'. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Umum mempunyai fungsi:

- 1) penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang umum;
- 2) penyelenggaraan administrasi Biro Umum;
- 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Umum; dan
- 4) penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Berbeda dengan karakter tugas pokok dan fungsi biro lainnya, cakupan tugas pokok dan fungsi Biro Umum adalah pengelolaan urusan internal sekretariat daerah. Terdapat tiga kelompok tugas utama yaitu kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta tata usaha. Ketiga kelompok tugas tersebut mencakup penyelenggaraan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan monev implementasi kebijakan yang mengatur internal sekretariat daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang tata usaha meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan kearsipan. Tugas dan fungsi pada bidang perencanaan meliputi diantaranya fasilitasi penyusunan rencana kerja sekretariat daerah baik yang bersifat strategis hingga operasional pada tingkat kegiatan dan sub kegiatan, pengoordinasian penyusunan arsitektur kinerja, pemantauan capaian kinerja, pengoordinasian penyusunan laporan kinerja baik itu bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Karakter tugas dan fungsi bidang perencanaan juga bernuansa *middle line* yang menyambungkan arahan sekretaris daerah (sebagai kepala sekretariat daerah) melalui para 'asisten' dengan biro-biro pada level operasional. Adapun fokus pengoordinasian adalah pada perumusan dan pencapaian kinerja sekretariat daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya tugas dalam pengelolaan kepegawaian meliputi pelayanan administrasi kepegawaian seperti fasilitasi kenaikan pangkat, fasilitasi pelaporan penilaian kinerja individu, serta fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sekretariat daerah. Selain fasilitasi administrasi, Biro Umum juga melakukan analisis terhadap kebutuhan dan pola karir serta dukungan pengembangan kompetensi pegawai sekretariat daerah. Sedangkan tugas pada pengelolaan kearsipan meliputi diantaranya fasilitasi penataan arsip pada biro-biro, fasilitasi pemusnahan arsip, serta pengelolaan arsip pada *record center*.

Selanjutnya Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum, pemantauan dan evaluasi bidang keuangan dan verifikasi Sekretariat Daerah Provinsi,



penatausahaan keuangan serta akuntansi dan pelaporan. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset merupakan salah satu bagian penting dalam struktur organisasi Biro Umum karena memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset lingkup Sekretariat Daerah serta memastikan bahwa keuangan dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta aset dimanfaatkan secara optimal.

Ketiga adalah Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum, koordinasi dan pelayanan administratif urusan dalam, penggunaan dan penyediaan barang milik daerah serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. Dengan karakteristik tugasnya yang secara garis besar adalah urusan pelayanan administratif dan dukungan terhadap organisasi, Bagian Rumah Tangga banyak menangani beberapa tugas residual terutama yang berkaitan dengan pelayanan pimpinan. Bagian Rumah Tangga memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran aktivitas sehari-hari di lingkungan Sekretariat Daerah. Bagian ini bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga, termasuk kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja.

Selain tugas pokok, Bagian Tata Usaha juga menangani urusan residual yaitu pengelolaan aset milik Sekretariat Daerah yang dimanfaatkan menjadi objek retribusi. Bagian Tata Usaha di Sekretariat Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran kegiatan administrasi dan operasional sehari-hari. Secara garis besar, bagian ini bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi umum dan ketatausahaan.

K. Staf Ahli Gubernur

Staf Ahli Gubernur dibagi ke dalam tiga bidang yaitu Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Bidang Ekonomi dan Pembangunan; serta Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Staf Ahli Gubernur memiliki tugas pokok memberikan telaahan, kajian, saran dan pertimbangan



kepada Gubernur mengenai masalah pemerintahan, hukum dan politik, ekonomi dan pembangunan, serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok, Staf Ahli Gubernur memiliki fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan telaahan, kajian, saran, pertimbangan, dan rekomendasi bidang pemerintahan, hukum politik, ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, sesuai bidang tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan penyampaian telaahan, kajian, saran, pertimbangan, dan rekomendasi bidang pemerintahan, hukum, politik, ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya; serta
- 3) Penyelenggaraan tugas membantu pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

L. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok ini dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk. Jenis, jenjang, dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu. Adapun tugas yang dilaksanakan adalah sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2.3 Sumber Daya Sekretariat Daerah

A. Gambaran Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) pada organisasi merupakan sebuah aset. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memahami bahwa pengelolaan SDM yang efektif dapat menjadi investasi jangka panjang dalam



meningkatkan mutu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Dengan demikian, gambaran kondisi SDM merupakan data krusial yang dapat mendukung pengelolaan secara efektif.

Berdasarkan data per Februari 2025, PNS Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berjumlah 649 orang yang terdiri dari satu orang pimpinan tinggi, satu orang staf ahli, 12 pejabat administrasi, 195 orang pejabat fungsional, dan 429 orang pelaksana. Dilihat dari kategori jenis kelamin perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 52% berbanding 48% dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 438 orang dan perempuan sebanyak 211 orang. Perbandingan jenis kelamin pada setiap jenis jabatan antara laki-laki dan perempuan adalah 1:1 pada jabatan administrasi, 128:67 pada jabatan fungsional, dan 98:45 pada jabatan pelaksana.

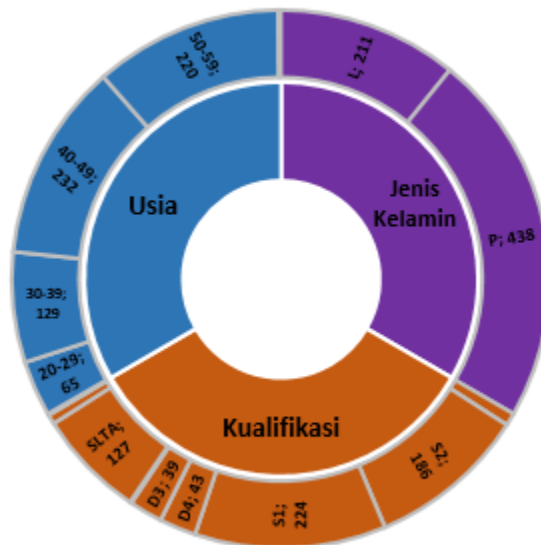
Pada kategori kelompok usia, pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mayoritas berada pada rentang usia 40-49 tahun yaitu 36% dari total jumlah pegawai dan merupakan pegawai dengan mayoritas masa kerja dalam rentang 11-20 tahun. Jika dilihat dari jenis jabatan, kelompok usia ini mayoritas menduduki jabatan pelaksana yaitu sebanyak 31% dari total jumlah seluruh pelaksana. Pada kelompok usia ini, 39% merupakan lulusan sarjana dengan jurusan terbanyak adalah Administrasi Negara.

Selanjutnya, dilihat dari tingkat kualifikasi mayoritas merupakan lulusan Sarjana sebanyak 425 orang atau 65,48% dari total jumlah pegawai. Para PNS ini mendominasi jabatan pelaksana sebanyak 215 orang atau 52,58% dari total jumlah pegawai berpendidikan Sarjana. Dari jumlah tersebut, 8,5% menempuh pendidikan jurusan Administrasi Negara.

Sementara itu pada jabatan fungsional, tingkat kualifikasi pegawai mayoritas adalah S2 sebanyak 108 orang atau 56% dari keseluruhan jumlah pejabat fungsional. Begitu pun mayoritas tingkat kualifikasi pada jabatan administrasi yaitu sebesar 83% dari total jumlah pejabat administrasi. Sedangkan tingkat kualifikasi S3 memenuhi jabatan administrasi sebesar 8,3% dari total pejabat administrasi atau 0,15% dari total seluruh pegawai.



Gambar 2. 2
Grafik Data Kepegawaian Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, dan Kualifikasi

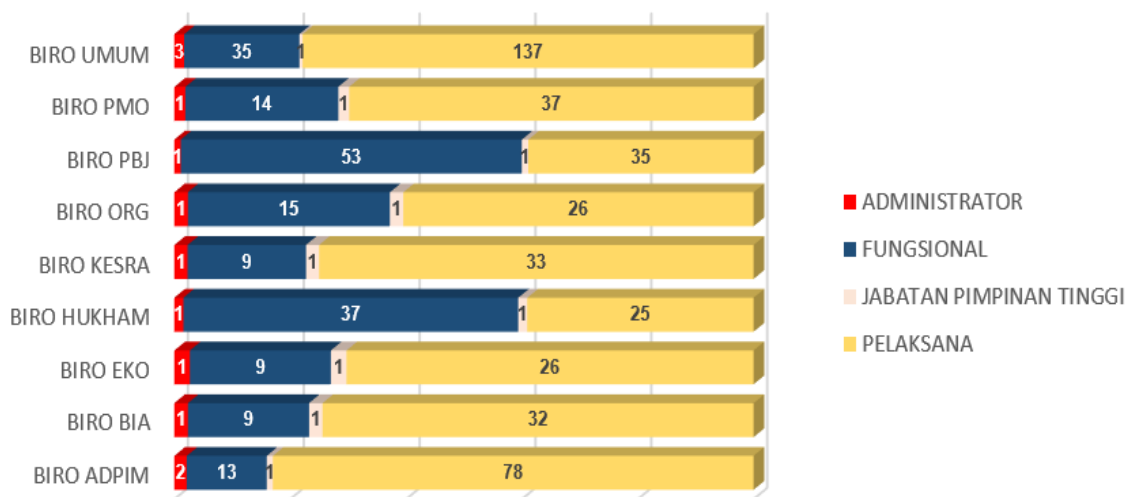


Berdasarkan biro, komposisi jumlah pegawai ditentukan oleh hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB ABK). Oleh karena itu, Biro Umum menjadi unit kerja dengan SDM terbanyak sebesar 27% dari total jumlah pegawai atau sejumlah 176 orang. Unit kerja lain dengan kuantitas SDM signifikan adalah Biro Administrasi Pimpinan dengan jumlah pegawai sebanyak 94 orang atau 14,48% dari total jumlah pegawai.

Dilihat dari jenis kelamin, Biro Organisasi merupakan unit dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan terbanyak yaitu 32:11 orang. Sementara dari segi kualifikasi, Asisten Daerah, Biro Hukum dan HAM, Biro Organisasi, serta Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan doctoral masing-masing sebanyak dua orang. Untuk pegawai berlatar belakang magister, Biro Umum serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa menjadi unit kerja dengan jumlah terbanyak yaitu secara berurutan 36 dan 34 orang. Sementara Biro Administrasi Umum merupakan unit dengan pegawai berlatar belakang sarjana terbanyak yaitu 46 orang.



Gambar 2. 3
Grafik Data Kepegawaian Biro-Biro di Sekretariat Daerah



Selanjutnya dari komposisi jenis jabatan, terdapat dua biro yang didominasi jabatan fungsional yaitu Biro Hukum dan HAM serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Pada Biro Hukum dan HAM terdapat lima jenis jabatan fungsional yang secara total berjumlah 37 orang. Sedangkan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, pegawai dengan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki kuantitas terbanyak yaitu 50 orang sementara total pejabat fungsional pada biro tersebut adalah 53 orang.

Sebaliknya pada tujuh biro lainnya, jumlah jabatan pelaksana mendominasi. Biro Umum memiliki 137 orang pelaksana atau sebesar 21,27% dari keseluruhan jumlah ASN biro. Disamping Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan juga memiliki pelaksana cukup signifikan jika dibanding jenis jabatan lainnya yaitu 12,11% dari total jumlah pegawai biro atau sebanyak 78 orang.

Kemudian, Biro Umum dan Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan merupakan unit kerja yang memiliki pegawai dengan rentang usia termuda yaitu 20-29 tahun terbanyak yaitu masing-masing 12 orang atau 1,8% dari total jumlah SDM biro. Pada rentang usia dengan masa kerja 10-30 tahun pun terdapat pada Biro Umum sebanyak 154 orang dengan umur



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

berkisar di rentang 33-59 tahun. Sementara itu, pegawai yang berada pada rentang usia 30-40 tahun ada pada Biro Administrasi Pimpinan sebanyak satu orang.

B. Gambaran Aset

Dalam Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 71 Tahun 2010, klasifikasi aset pemerintah sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. SAP mengklasifikasikan aset dalam Aset Tetap, Aset Lancar, dan Aset Lainnya. Adapun jumlah Aset per 31 Desember 2024 di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.081.171.768,00 dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):



Tabel 2. 2
Neraca Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam 6 Tahun

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kata-Kata Pertumbuhan (%)
Aset Lancar	1.612.464.551,06	1.603.010.130,67	1.087.709.794,96	1.393.834.725,08	1.236.504.510,00	2.129.013.475,00	3.955.512.746,00	0,20
Bantuan Pengeluaran	0	0	0	0	0	0	219.608.719,00	-
Piutang Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0	18.385.000,00	388.053.502,00	186.710.347,00	-
Beban Dibayar Dimuka	322.195.607,06	455.055.263,67	361.476.912,50	181.957.379,08	181.957.380,00	181.957.379,00	181.957.378,00	-0,11
Persediaan	1.290.268.944,00	1.147.954.867,00	726.232.882,46	1.211.897.346,00	1.036.162.130,00	1.559.602.594,00	3.366.536.302,00	0,21
Aset Tetap	720.258.873.051,04	750.355.511.287,30	729.993.718.683,93	839.209.799.720,29	997.997.321.626,00	1.064.029.817.692,00	1.076.532.396.004,00	0,08
Tanah	618.634.456.160,00	621.161.056.000,00	622.202.380.000,00	622.202.380.000,00	778.441.150.064,00	778.441.150.064,00	778.441.150.064,00	0,05
Peralatan dan Mesin	299.147.993.407,45	314.587.950.257,90	323.518.556.380,08	338.289.302.415,08	349.095.271.008,00	375.956.439.702,00	386.075.506.301,00	0,05
Gedung dan Bangunan	77.856.833.093,39	110.072.886.957,06	119.854.637.709,06	254.964.112.756,06	286.463.769.345,00	355.601.808.981,00	379.486.323.377,00	0,37
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.233.004.087,00	7.719.252.077,33	7.719.252.077,33	7.719.252.077,33	8.596.229.318,00	9.693.915.504,00	14.603.036.804,00	0,23
Aset Tetap Lainnya	4.184.618.364,00	5.628.618.364,00	5.579.469.196,00	5.633.269.196,00	5.940.740.115,00	5.940.740.115,00	5.949.896.115,00	0,07
Akumulasi Penyusutan	-284.798.032.060,80	-308.814.252.368,99	-348.880.576.678,55	-389.598.516.724,18	-430.539.838.224,00	-461.604.236.674,00	-488.023.516.657,00	0,11
Aset Lainnya	683.580.018,00	686.074.268,00	686.074.268,00	686.074.268,00	686.074.268,00	683.580.018,00	683.580.018,00	-
Aset Lain- lain	8.049.647.668,00	10.248.554.036,55	10.248.554.036,55	10.248.554.036,55	10.248.554.038,00	10.454.147.668,00	10.846.737.668,00	0,06
AKumulasi Penyusutan Aset Lain- lain	-7.366.067.650,00	-9.562.479.768,55	-9.562.479.768,55	-9.562.479.768,55	-9.562.479.770,00	-9.770.567.650,00	-10.163.157.650,00	0,07
Jumlah Aset	722.554.917.620,10	752.644.595.685,97	731.767.502.746,89	841.289.728.713,38	999.919.900.404,00	1.066.843.011.185,00	1.081.171.788.768,00	0,08
Kewajiban Jangka Pendek	335.211.408,00	782.804.197,00	326.046.094,00	318.715.761,00	975.017.786,00	1.104.227.965,00	1.008.480.530,00	0,25
Utang Belanja	335.211.408,00	782.804.197,00	326.046.094,00	318.715.761,00	473.054.036,00	386.191.465,00	495.801.031,00	0,08
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	501.963.750,00	718.036.00,00	512.679.499,00	-
Jumlah Kewajiban	335.211.408,00	782.804.197,00	326.046.094,00	318.715.761,00	975.017.786,00	1.104.227.965,00	1.008.480.530,00	0,25
Ekuitas	722.219.706.212,10	751.861.791.488,97	731.441.456.652,89	840.971.012.952,38	998.944.882.618,00	1.065.738.783.220,00	1.080.163.308.238,00	0,08
Jumlah Ekuitas	722.219.706.212,10	751.861.791.488,97	731.441.456.652,89	840.971.012.952,38	998.944.882.618,00	1.065.738.783.220,00	1.080.163.308.238,00	0,08
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	722.554.917.620,10	752.644.595.685,97	731.767.502.746,89	841.289.728.713,38	999.919.900.404,00	1.066.843.011.185,00	1.081.171.788.768,00	0,08



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

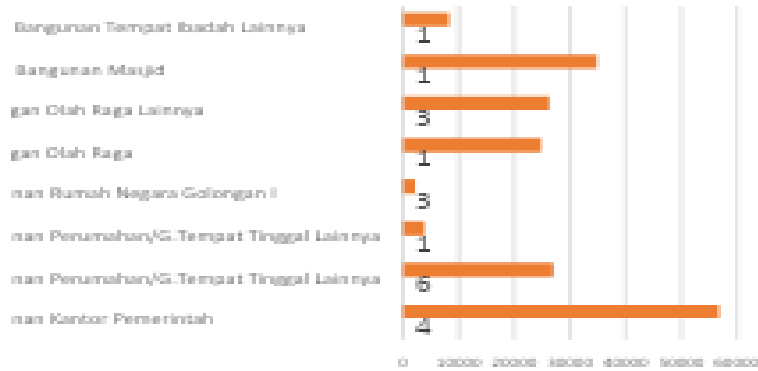
Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2018-2024 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,08%. Adapun rata-rata pertumbuhan dari masing-masing jenis aset seperti Aset Lancar mengalami kenaikan sebesar 0,20%, Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar 0,08%, sementara Aset Lainnya masih dalam kondisi stagnan. Kewajiban Sekretariat Daerah selama periode 2018-2024 mengalami kenaikan sebesar 0,25%. Peningkatan kewajiban secara signifikan berasal dari Pendapatan Diterima Dimuka, sedangkan rata-rata pertumbuhan Utang Belanja hanya sebesar 0,08%. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Hasil Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan yang terdiri dari:

1. Sewa Kantor Kas BJB yang diterima Tahun 2022 untuk periode sewa selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai Tahun 2026;
2. Sewa tanah di Gasibu untuk dipergunakan sebagai tempat Videotron untuk periode sewa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 28 Agustus 2023 sampai dengan 27 Agustus 2028.

Aset Tetap diklasifikasikan menjadi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: berwujud; mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan; biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset Tanah di Sekretariat Daerah terdapat 20 Bidang (18,4 hectare) yang tersebar di beberapa lokasi dengan 18 (delapan belas) bidang sudah bersertifikat dan 2 (dua) bidang belum bersertifikat dengan rincian sebagai berikut:

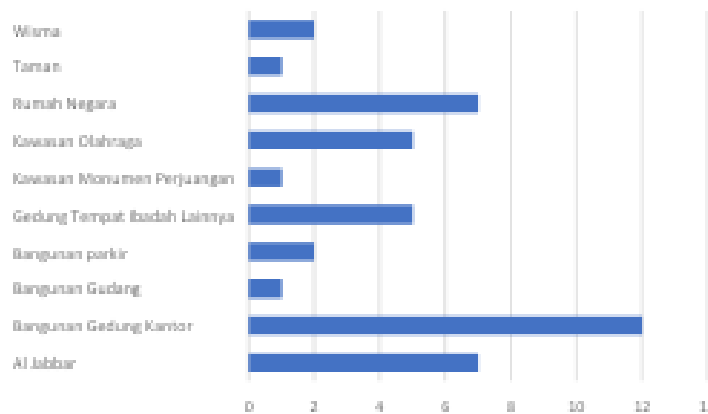


Diagram 2. 4
Data Aset Tanah Setda



Selain tanah, yang menjadi bagian dari klasifikasi Aset Tetap yaitu Gedung dan Bangunan. Nilai Gedung dan Bangunan hasil *audited* terdiri dari 43 unit yang dimanfaatkan untuk Gedung Kantor sebanyak 11 unit, Bangunan Peribadatan sebanyak 15 unit, Bangunan Rumah Negara (Rumah Dinas Pimpinan) sebanyak 3 unit, Bangunan Gedung Olahraga dan lainnya sebanyak 6 unit, Mess/Guest House sebanyak 4 unit, Bangunan Parkir sebanyak 2 unit, Taman Permanen sebanyak 1 unit dan Monumen sebanyak 1 unit. Adapun 43 unit Gedung Bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Diagram 2. 5
Data Aset Gedung Dan Bangunan Setda



C. Gambaran Pemanfaatan Informasi dan Teknologi

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pemanfaatan informasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan. Adapun aplikasi berbasis teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Data Layanan Digital Lingkup Setda

No	Nama	Deskripsi	Pengguna	Pemilik	Tahun Dibangun	Laman
1	Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi (JAPATI)	Aplikasi tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, pengendalian hingga evaluasi untuk mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat	PD	Biro Organisasi	2023	http://kinerja.jabarprov.go.id/sakip
2	Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Platform digital yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik	Masyarakat Umum	Biro Organisasi	2022	http://skm.jabarprov.go.id
3	Sistem Pengukuran Reformasi dan Birokrasi Terintegrasi (SURABI)	Sistem informasi berbasis website yang terintegrasi untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien, serta sebagai alat yang efektif dan efisien untuk mengukur kinerja RB pada Perangkat Daerah secara realtime	PD	Biro Organisasi	2022	https://surabi.jabarprov.go.id/
4	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta	Masyarakat Umum	Biro Hukum dan HAM		https://jdih.jabarprov.go.id/



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

No	Nama	Deskripsi	Pengguna	Pemilik	Tahun Dibangun	Laman
		merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.				
5	Sistem Database Bantuan Hukum Daerah (SIDBANKUMDA)	Layanan bantuan keuangan bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai masalah hukum, dimana pendaftaran online bantuan hukum dan layanan konsultasi hukum dilakukan secara online	Masyarakat Umum	Biro Hukum dan HAM	2021	https://sidbankumda.jabarprov.go.id/
6	Sistem Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (SIPEDANG)	Layanan Pengajuan Nomor Naskah Produk Hukum Pengaturan dan Penetapan dan digunakan untuk menyusun perencanaan dan pemrosesan usulan produk hukum agar dapat dilacak dan disimpan sesuai dengan ketentuan kearsipan	PD	Biro Hukum dan HAM	2022	https://sipedang.jabarprov.go.id
7	Fasilitasi aspirasi masyarakat terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan (AKSES PASTI)	Layanan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Penyediaan media informasi berbasis web untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap produk hukum daerah, dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan serta memberikan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat	Masyarakat Umum	Biro Hukum dan HAM	2020	https://jdih.jabarprov.go.id/aksespasti/
8	Website Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat	Situs resmi dari Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dirancang untuk menyediakan informasi di lingkungan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat.	Masyarakat Umum	Biro Hukum dan HAM		https://birohukum.jabarprov.go.id/



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

9	Sistem Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum (E-Darkum)	Aplikasi yang berfungsi untuk menghimpun data desa/kelurahan yang sudah atau belum ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum serta untuk memverifikasi dan validasi data dukung indikator penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam melaksanakan penilaian desa/kelurahan sadar hukum.	Desa/Kelurahan	Biro Hukum dan HAM	2018	http://103.147.222.245/darkum/
10	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan manajemen kontrak untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/PD termasuk untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	PD	Biro PBJ		https://lpse.jabarprov.go.id
11	Website Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Situs resmi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirancang untuk menyediakan informasi terkait layanan, agenda kegiatan dan kontak di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat	Masyarakat Umum	Biro PBJ	2019	https://biopbj.jabarprov.go.id/
12	Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jawa Barat (SILINDA DI JABAR)	Sistem yang digunakan untuk melihat informasi harga komoditas di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan data Tim Pengendali Inflasi Daerah di seluruh Jawa Barat	PD	Biro PBJ	2022	https://silinda.jabarprov.go.id/
13	Website Biro Perekonomian	Situs resmi dari Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirancang untuk menyediakan informasi terkait tupoksi, prestasi, agenda dan berita pimpinan serta artikel di Biro	Masyarakat Umum	Biro Perekonomian	2024	https://bioperekonomian.jabarprov.go.id/



		Perekonomian Provinsi Jawa Barat				
14	Inovasi Pencatatan Inventaris dan Stock barang secara Digital dan Implementasi Kartu Inventaris Digital Bangunan dan Gedung (PIKSEL)	Aplikasi ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan barang dan stock opname agar menjadi lebih mudah dan monitoring persediaan barang menjadi lebih efektif.			2024	
15	Sistem Penerimaan Tamu Terintegrasi Sekretariat Daerah (EMMERITA)	Aplikasi sistem antrian berbasis website yang dibuat untuk membantu meningkatkan pelayanan publik di One Stop Service (OSS) PINTU GESAT	Masyarakat Umum	Biro Umum		-
16	Website Biro Administrasi Pimpinan	Situs resmi dari Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirancang untuk menyediakan informasi terkait tupoksi, prestasi, agenda dan berita pimpinan serta artikel di Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat	Masyarakat Umum	Biro Administrasi Pimpinan	2022	https://bit.ly/WebsiteAdpim
17	E-Clip	Aplikasi media monitoring yang dirancang khusus untuk memantau pemberitaan daring terkait Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Jawa Barat.	Masyarakat Umum	Biro Administrasi Pimpinan	2019	https://eclip.jabarprov.go.id/
18	Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR)	Aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Nama Rupabumi di seluruh pemerintah daerah.	Kabupaten/ Kota	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2019	https://sinar.big.go.id/



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

19	Sistem Tata Kelola Bantuan Hibah (SITABAH)	Sistem informasi yang mengelola data hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk untuk mengelola proses pemberkasan pencairan bantuan hibah, pengelolaan hibah sampai dengan kontroling penggunaan hibah.	Calon penerima bantuan hibah	Biro Kesejahteraan Rakyat	2021	https://sitabah.kesrajabar.id/
20	Dashboard Potensi Lembaga Keagamaan (DPLEGA)	Sistem informasi berbasis aplikasi untuk menghimpun semua data lembaga keagamaan di Jawa Barat		Biro Kesejahteraan Rakyat		
21	Website Biro Kesejahteraan Rakyat	Situs resmi dari Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirancang untuk menyediakan informasi terkait tupoksi, prestasi, agenda dan berita pimpinan serta artikel di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat	Masyarakat Umum	Biro Kesejahteraan Rakyat	2024	https://biokesra.jabarprov.go.id/
22	Kuliah Kerja Nyata (KKN) JABAR CAANG	Layanan informasi KKN Tematik Jabar Caang merupakan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang diharapkan mampu mengidentifikasi potensi sekaligus menangani masalah seperti stunting dan food waste dengan program KKNT	Masyarakat Umum	Biro Kesejahteraan Rakyat	2024	https://jabarprov.go.id/layanan/kknjabarcaang
21	Layanan Informasi Hibah Keagamaan	Media informasi pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Badan dan Lembaga Bidang Keagamaan	Masyarakat Umum	Biro Kesejahteraan Rakyat	2023	https://biokesra@jabarprov.go.id/layanan/bantuanhibahkeagamaan

2.2.4 Kinerja Utama

Pada masa perencanaan transisi pemerintahan, merujuk kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, kinerja sekretariat daerah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

mendukung pencapaian tujuan ‘terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah’ dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Penjabarannya pada sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 kepada satu sasaran yaitu ‘meningkatnya praktik baik reformasi birokrasi’ dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi General. Reformasi Birokrasi General merupakan salah satu komponen penilaian penyelenggaraan reformasi birokrasi. Fokus terhadap komponen ini disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan peran sekretariat daerah dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Hasil kinerja tahun 2024 memperlihatkan performa yang memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 109,18% dengan target sebesar 80,75 poin dapat direalisasikan sebesar 88,16 poin. Berdasarkan laporan evaluasi KemenPANRB, dalam ruang lingkup kewenangan sekretariat daerah, ketercapaian kinerja ini didukung oleh keberadaan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi general yang telah diformalkan dengan target yang menantang dan kinerja yang terus meningkat, akuntabilitas kinerja yang semakin memuaskan, ITKP yang meningkat, budaya kerja yang sehat, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Capaian kinerja ini memperlihatkan bahwa progres penyelenggaraan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada pada jalur yang benar dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi ‘Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif’ sebagaimana tercantum dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024.

Secara diagnostik, keberhasilan pencapaian Nilai RB General ini didorong oleh sejumlah faktor kunci yang saling memperkuat, terutama melalui penguatan peran kolaboratif perangkat daerah leading institutions pengampu indikator komponen indeks reformasi birokrasi. Penguatan ini terbukti mampu menghantarkan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu yang terbaik secara nasional pada sejumlah komponen pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi,



antara lain Indeks Sistem Merit, Indeks Pelayanan SPBE, dan Opini BPK. Selain itu, komponen penting lainnya yang turut mendukung capaian RB General meliputi Indeks BerAKHLAK, Indeks Pelayanan Publik, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Tata Kelola Reformasi Birokrasi melalui SURABI. Melalui tujuh komponen utama ini, Setda berkomitmen untuk memimpin dan mengawal konsistensi arah kebijakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Lebih lanjut, peningkatan tata kelola pemerintahan juga berkontribusi terhadap capaian Indeks Inovasi Daerah sebesar 81,27 poin dengan predikat Sangat Inovatif (peringkat 3 nasional) serta Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,88 poin melampaui rata-rata nasional (3,43 point). Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah mendorong percepatan inovasi, efisiensi pelayanan, dan daya saing daerah. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi General menjadi cerminan dari efektivitas peran strategis Sekretariat Daerah dalam memimpin transformasi birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil, serta memastikan reformasi pemerintahan berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

2.2.5 Kinerja Anggaran

Secara keseluruhan, pagu anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2018, anggaran sekretariat daerah sebesar Rp398.242.387.895,00 dan meningkat 33,99% menjadi Rp533.589.165.365,00 pada tahun 2019. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pagu kembali meningkat sebesar 50,80% seiring adanya perbaikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 2021. Kenaikan juga diakibatkan dari pelimpahan belanja hibah yang sebelumnya dianggarkan pada perangkat daerah lain. Pada Tahun 2022 dan 2023, anggaran sekretariat daerah mengalami peningkatan berturut-turut



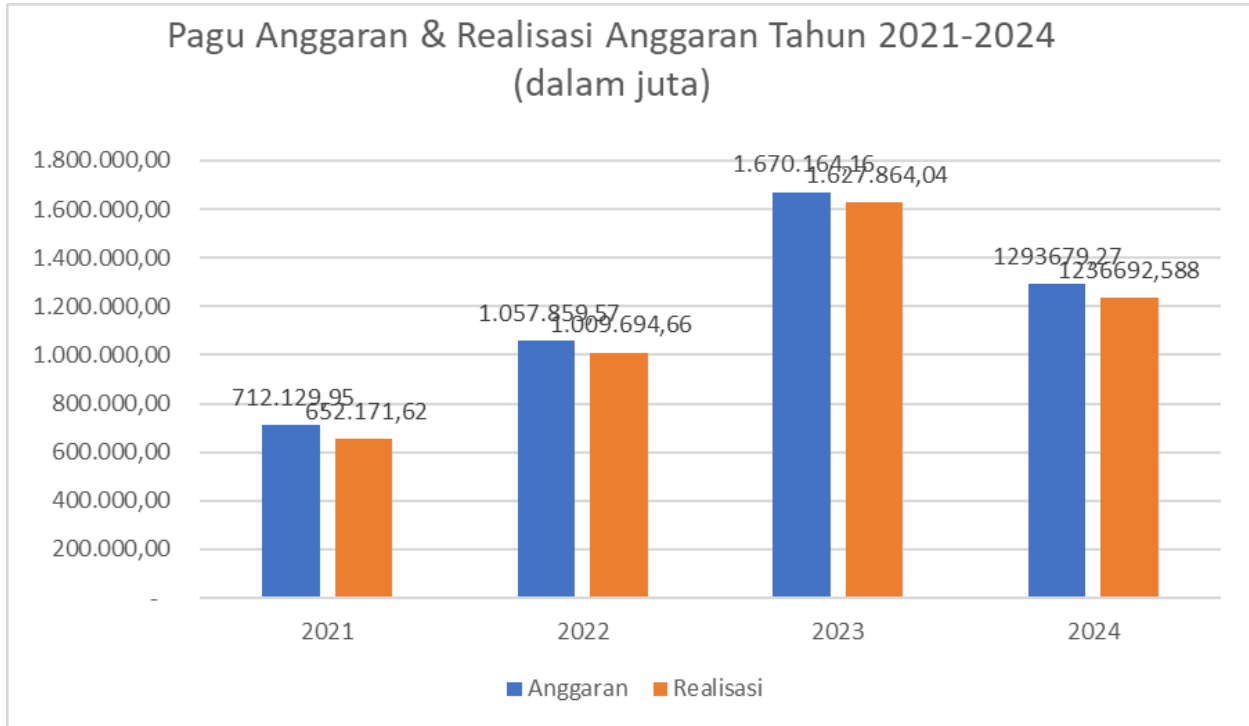
sebesar 48,55% dan 57,88% dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.057.859.572.097,00 dan Rp1.670.164.158.655,00. Sedangkan pada tahun 2024 turun kembali menjadi Rp.1.293.679.269.902,00.

Realisasi belanja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018-2023. Grafik realisasi belanja Sekretariat Daerah sejalan dengan jumlah anggaran yang hampir selalu meningkat selama 6 (enam) tahun terakhir. Realisasi belanja pada tahun 2018 sebesar Rp375.586.486.768,00 (94,31%), dan meningkat di tahun 2019 sebesar 27,18% bila dibandingkan realisasi anggaran tahun 2018 dengan jumlah Rp477.684.241.049,00. Namun, capaian realisasi anggaran pada tahun 2019 tersebut mengalami penurunan, hanya dicapai sebesar 89,52%. Pada tahun 2020, realisasi anggaran turun 12,03% yaitu sebesar Rp420.216.799.205,00 dari realisasi anggaran tahun 2019. Capaian kinerja anggaran pada tahun 2020 tersebut hanya mencatatkan tercapai 88,98%, sedangkan realisasi belanja tahun 2021 meningkat 55,20% dari tahun sebelumnya. Realisasi belanja tersebut meningkat dikarenakan adanya realisasi belanja hibah. Kinerja anggaran pun mulai meningkat pasca covid-19 dimana persentase realisasi belanja sebesar 91,58% terhadap anggaran.

Selanjutnya, realisasi belanja tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp1.009.694.655.506,00 (54,82%) dibandingkan realisasi belanja tahun 2021, dan meningkat menjadi 95,45% terhadap anggaran tahun 2022. Tahun 2023, realisasi belanja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat meningkat pesat, dengan terjadinya peningkatan sebesar 61,22% dari jumlah realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp.1.627.864.042.657,00 (97,47%). Namun bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024, capaian anggaran mengalami penurunan, yaitu hanya tercapai 95,59% dari realisasi sebesar Rp.1.236.692.588.435,00, atau turun sebesar 1,88% dari capaian tahun 2023.



Gambar 2. 6
Pagu Anggaran & Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024



Berdasarkan anggaran per biro pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, seluruh biro mengalami fluktuasi pagu anggaran selama kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2024. Peningkatan pagu anggaran terjadi pada tahun 2019 untuk setiap biro, namun pada tahun anggaran 2020 terjadi penurunan, yang disebabkan terjadinya Covid-19 serta pemulihan Covid-19, bahkan sampai dengan tahun 2021, kecuali untuk pagu anggaran pada Biro Umum. Kondisi pagu anggaran ini meningkat kembali pada tahun-tahun selanjutnya yaitu mulai tahun 2022.

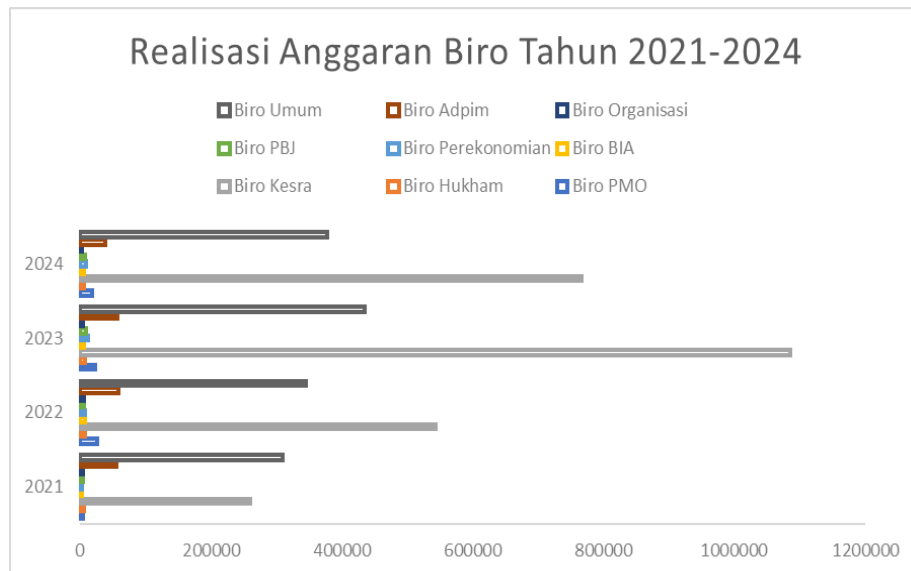


Gambar 2. 7
Data Proporsi Pagu Anggaran Per Biro Lingkup Setda



Berdasarkan pagu anggaran yang dilaksanakan oleh biro, Biro Kesejahteraan Rakyat mendapatkan proporsi pagu anggaran terbesar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, mulai tahun 2022 sampai tahun 2024, yaitu diatas 54% dari total pagu anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, karena adanya kenaikan belanja hibah.

Gambar 2. 8
Data Realisasi Anggaran Per Biro Lingkup Setda

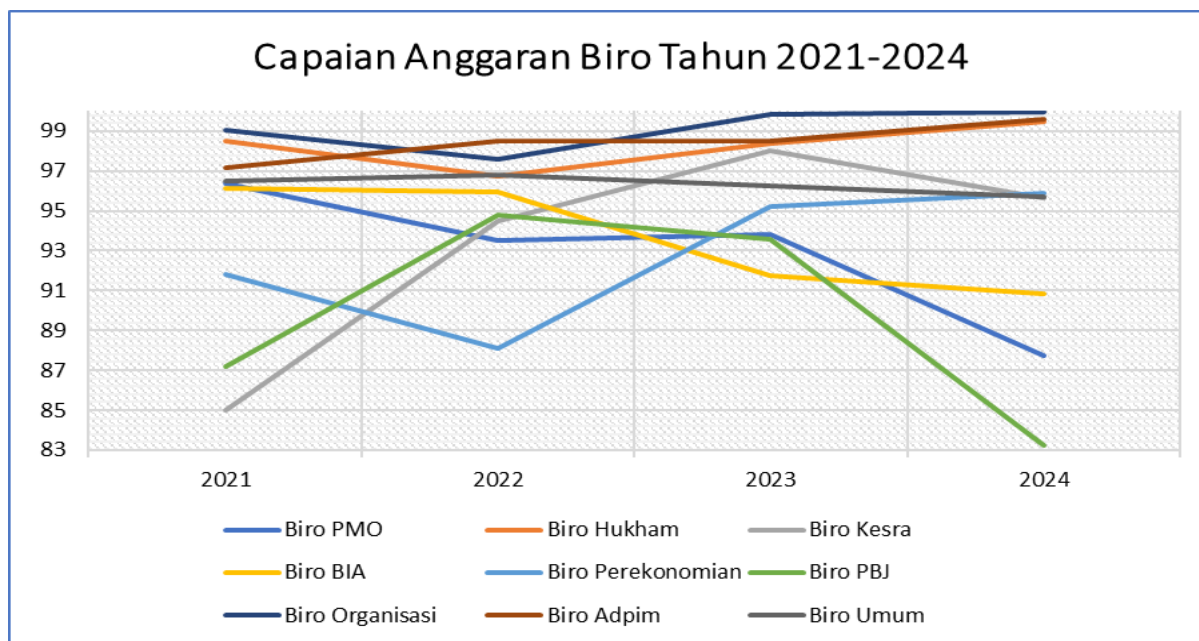


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

Dilihat dari realisasi anggaran, Biro Organisasi merealisasikan pagu anggaran sebesar 99,96% dari total pagu anggaran biro pada tahun 2024, sedangkan realisasi terendah dialami oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2024, dimana realisasi anggaran hanya tercapai sebesar 83%.

Gambar 2. 9
Data Capaian Anggaran Per Biro Lingkup Setda



2.2.6 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain sebagai alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, IKK juga dapat digunakan untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, menjadi dasar dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah (EKPPD), dan mendukung penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). Dengan



demikian, IKK digunakan dalam penyusunan LPPD, pelaksanaan EKPPD, monitoring capaian kinerja daerah, serta sinkronisasi kinerja pusat dan daerah. Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020, IKK yang digunakan untuk mengukur kinerja sekretariat daerah difokuskan pada kinerja penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. IKK untuk urusan ini dirancang untuk mengukur efektivitas dan efisiensi proses pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	IKK Outcome	Rumus	Realisasi 2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun } n}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun } n}$	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Total belanja operasi dan modal}}$	32,69
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}}$	61,27
4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi tahun } n}{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi tahun } n-1} - \frac{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi tahun } n-1}{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi tahun } n-1}$	13,62

Hasil evaluasi atas IKK setiap tahunnya tidak dapat menginformasikan tren kenaikan atau penurunan kinerja. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, terutama adanya perbedaan jenis data yang dibutuhkan, periode pengumpulan data, dan yang lainnya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.



Tabel 2.5
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasiona l	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahu n 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
1	Nilai Reformasi Birokrasi General			N/A	80,75	80,83	80,91	N/A	88,16	80,83	80,91	Proyeksi dihitung berdasarka n kenaikan sebesar 0.08 poin
2	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama		IKK	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	
3	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		IKK	N/A	N/A	N/A	N/A	78,04	32,69	N/A	N/A	
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		IKK	N/A	N/A	N/A	N/A	34,41	61,27	N/A	N/A	
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah		IKK	N/A	N/A	N/A	N/A	177,57	13,62	N/A	N/A	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2026, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menghadapi sejumlah isu strategis yang bersifat dinamis, baik karena faktor eksternal seperti kebijakan nasional dan dinamika global seperti ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, serta kemajuan teknologi digital termasuk kecerdasan buatan, maupun faktor internal seperti penguatan tata kelola pemerintahan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan reformasi birokrasi tematik. Kondisi tersebut menuntut Sekretariat Daerah untuk mengakselerasi peran koordinatif dan fasilitatif dalam memastikan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sebagai tahun kedua penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, Tahun 2026 menjadi momen strategis untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam program dan kegiatan yang berdampak nyata. Dalam situasi ini, Sekretariat Daerah perlu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, kolaboratif, dan berbasis data agar mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di tingkat global, nasional, maupun lokal.

Adapun isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- . Penyesuaian Fiskal Akibat UU HKPD, Inpres 1 Tahun 2025, dan Kebijakan Anggaran Kepala Daerah Terpilih



Meskipun penyesuaian terhadap UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sudah dimulai sejak 2025, dampaknya masih akan sangat terasa pada tahun 2026. Pemerintah Daerah perlu mengelola struktur pendapatan dan belanja secara lebih efisien di tengah keterbatasan ruang fiskal yang ada. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, meskipun berlaku untuk pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, tetap memberikan pengaruh terhadap penganggaran tahun 2026. Dalam praktiknya, belanja perjalanan dinas tahun 2026 mengacu pada batas atau standar tahun sebelumnya, sehingga tetap mengharuskan daerah berhati-hati dalam menaikkan anggaran yang tidak langsung berdampak pada masyarakat, khususnya belanja perjalanan dinas. Kebijakan kepala daerah terpilih menuntut adaptasi terhadap prioritas baru yang berbasis kebutuhan masyarakat. Tahun 2026 menjadi momen penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah dapat mengarahkan ulang program dan kegiatan yang berorientasi kepada masyarakat dan seimbang antara pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan.

B. Dinamika Global

Isu-isu global turut memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ketegangan geopolitik internasional, ketidakpastian ekonomi global, volatilitas harga energi dan pangan, serta dampak perubahan iklim mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas adaptif dan ketahanan dalam menghadapi gejolak eksternal. Respons yang cepat dan terukur dari pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pembangunan di tengah dinamika global.

C. Penguatan Kebijakan Berbasis Bukti

Meskipun proses perumusan kebijakan berjalan secara reguler, pendekatan berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*) masih belum



menjadi praktik baku di seluruh perangkat daerah. Seringkali, kebijakan disusun tanpa analisis data yang memadai atau tidak diiringi dengan evaluasi mendalam terhadap hasil dan dampaknya. Hal tersebut menyebabkan potensi deviasi antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat. Standarisasi penggunaan data dalam seluruh siklus kebijakan perlu diperkuat agar pengambilan keputusan lebih akurat dan berdaya guna.

D. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Kebijakan dan program strategis daerah kerap kali bersifat lintas sektor dan membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah. Namun dalam praktiknya, koordinasi seringkali masih bersifat sektoral, parsial, dan belum terstruktur dengan baik. Kurangnya platform koordinasi terpadu dan lemahnya mekanisme pemantauan bersama menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program prioritas. Akibatnya, tumpang tindih program dan inefisiensi sumber daya masih sering terjadi.

E. Penguatan Reformasi Birokrasi Tematik

Mulai tahun 2025, reformasi birokrasi nasional bertransformasi ke arah yang lebih tematik dan berbasis hasil (*outcome-based bureaucracy*). Fokus diarahkan pada pencapaian dampak nyata bagi masyarakat dengan beberapa bidang prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, dan percepatan prioritas presiden. Pelaksanaan RB Tematik bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi koordinasi lintas perangkat daerah dituntut tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

F. Pemanfaatan Teknologi dan Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan big data analytics membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Namun demikian, pemanfaatannya di lingkungan Sekretariat Daerah masih terbatas. Diperlukan penguatan kapasitas SDM, infrastruktur digital, serta strategi transformasi digital yang menyeluruh agar teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga pendorong utama perubahan tata kelola pemerintahan yang modern, cepat, dan responsif.

G. Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah

Secara internal, implementasi reformasi birokrasi belum terjadi secara merata di seluruh unit kerja Setda. Beberapa unit telah melakukan perbaikan tata kelola, namun sebagian lainnya masih berjalan secara konvensional. Pembangunan Zona Integritas pun belum menunjukkan perkembangan signifikan, yang mencerminkan belum tertanamnya nilai-nilai akuntabilitas, integritas, dan pelayanan prima sebagai budaya kerja yang menyeluruh. Hal tersebut berisiko menghambat upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Adapun isu-isu yang berada pada masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat antara lain:

Tabel 2.6
Isu-isu pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah

No	Biro	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Penerapan kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah belum berkualitas	Kepatuhan perangkat daerah dalam menerapkan kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah belum seluruhnya baik	Masih terdapat kebijakan yang belum harmonis dengan kebijakan terkait



			Belum optimalnya pemenuhan penataan urusan	Kewenangan urusan daerah belum sepenuhnya tertata
			Amanat kerjasama daerah kerap tidak selaras dengan perencanaan perangkat daerah	Kerjasama daerah tidak didasarkan pada <i>grand design</i> yang mengacu kepada dokumen perencanaan menengah yang terintegrasi dan dikomunikasikan
			Koordinasi dalam evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah belum dilaksanakan secara lebih efisien	Pelaksanaan koordinasi tidak didukung oleh sistem pemerintahan berbasis elektronik
			Penyelenggaraan fungsi biro belum optimal	Mobilisasi sumber daya yang belum efektif dan efisien
2	Biro Hukum dan HAM	Fasilitasi produk hukum daerah Provinsi Jawa Barat belum optimal	Terjadinya keterlambatan pada proses penyusunan kebijakan daerah	Fasilitasi penyusunan kebijakan belum disusun berdasarkan tingkatan prioritas
			Kualitas produk hukum belum seluruhnya sesuai standar	Kuantitas pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan belum terpenuhi
		PNS Pemda Provinsi Jawa Barat rentan terlibat kasus hukum	Pembinaan kesadaran hukum kepada ASN Pemda Prov Jabar masih kurang	Kuantitas penyuluh hukum belum terpenuhi
		Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota kurang memuaskan	Proses pengkajian rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota membutuhkan waktu lama	Kuantitas pejabat fungsional analis hukum belum terpenuhi
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	Penerapan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat belum berkualitas	Penerapan kebijakan kesejahteraan rakyat belum efektif berdampak positif	Koordinasi dalam perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat belum berjalan dengan optimal



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

			kepada pembangunan	
				Evaluasi terhadap implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat belum dijalankan secara konsisten

		Pencairan hibah belum seluruhnya akuntabel	Penggunaan hibah tidak sesuai pengajuan	Aplikasi pengajuan dan pencairan tidak secara efektif menyaring pengusul hibah sesuai ketentuan
				Pemahaman pengusul hibah terhadap urgensi ketepatan penggunaan hibah masih kurang
				Monev pemanfaatan hibah belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkala disebabkan keterbatasan SDM pengelola hibah
4	Biro Perekonomian	Penerapan kebijakan bidang perekonomian belum berkualitas	Penerapan kebijakan perekonomian belum seluruhnya efektif berdampak positif kepada pembangunan	Koordinasi dalam perumusan kebijakan bidang perekonomian belum berjalan dengan optimal
				Evaluasi terhadap implementasi kebijakan bidang perekonomian belum dijalankan secara konsisten
				Aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pengendalian inflasi belum seluruhnya terintegrasi



				Sinkronisasi roadmap terkait kebijakan perekonomian antara provinsi dan kabupaten/kota belum optimal
5	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	Kontribusi BUMD terhadap pembangunan belum optimal	Belum seluruh BUMD berstatus sehat	Pengelolaan BUMD belum seluruhnya memenuhi prinsip <i>good corporate governance</i>
		Evaluasi kinerja belum efektif memberikan masukan perbaikan terhadap pembangunan	Laporan evaluasi kinerja tidak disertai dengan analisis mendalam	Pelaporan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam pembangunan belum terintegrasi
				SDM biro belum dapat memenuhi kebutuhan monitoring dan evaluasi pembangunan yang menyeluruh dan mendalam
		Inovasi pendapatan daerah belum terselenggara	Alternatif pembiayaan belum dapat dilaksanakan	Penetapan kebijakan bergantung kesepakatan dengan pihak legislatif
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Tata kelola pengadaan barang/jasa belum optimal	Pengetahuan sumber daya manusia perangkat daerah terhadap proses pengadaan barang/jasa masih minim	Disenimasi pengadaan barang/jasa belum dilakukan secara menyeluruh
				Fungsi PPK di perangkat daerah belum berjalan dengan optimal
			Pemanfaatan SPSE belum optimal	Kepatuhan perangkat daerah dalam melaporan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem masih rendah
				Produk barang/jasa yang tayang di eKatalog belum cukup variatif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

			Monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa belum dapat memberikan perbaikan strategi pengadaan barang/jasa	Laporan monitoring dan evaluasi tidak disertai dengan analisis mendalam dan rekomendasi perbaikan
7	Biro Organisasi	Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik belum menjiwai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Penyelenggaraan tata kelola yang baik oleh perangkat daerah belum membudaya	Perangkat daerah belum seluruhnya memahami substansi tata kelola pemerintahan yang baik
			Proses perwujudan penyelenggaraan tata kelola yang baik sangat dipengaruhi oleh dinamisasi lingkungan eksternal	Ketidakpastian kondisi yang muncul sebagai dampak penataan organisasi mengalihkan fokus perangkat daerah dalam penerapan tata kelola yang baik
			Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas belum menyeluruh terjadi pada seluruh perangkat daerah	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik belum memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja perangkat daerah
		Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara rata-rata berada pada rentang Kategori B	Pelaksanaan SAKIP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum seluruhnya berkualitas	Belum seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memahami urgensi kolaborasi dalam penyelenggaraan SAKIP
				Belum seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki arsitektur kinerja sesuai amanat pemerintah pusat
				Belum seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki instrument pengukuran kinerja



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

				Belum seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyajikan analisis yang lengkap dalam pelaporan kinerja
				Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum terintegrasi dengan SPBE
8	Biro Administrasi Pimpinan	Pengelolaan fasilitasi pimpinan belum optimal	Mekanisme fasilitasi pimpinan belum terstandarisasi dengan baik	tata kelola organisasi belum terinternalisasi secara menyeluruh
			Proses koordinasi antar tim dalam mendukung kebutuhan pimpinan belum berjalan optimal	Koordinasi antar tim belum terintegrasi dengan baik
9	Biro Umum	Layanan fasilitasi internal Sekretariat Daerah dan perangkat daerah belum optimal	Pelaksanaan layanan belum terstandarisasi dengan baik	SOP belum dipedomani secara keseluruhan
			Penyelenggaraan tugas dan pelaksanaan layanan masih belum efektif	Lemahnya koordinasi internal
		kinerja tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat masih jauh dari perwujudan <i>good governance</i>	belum optimalnya akuntabilitas kinerja di Setda	kualitas pelaporan kinerja yang belum sepenuhnya memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya



2.4 Review terhadap RKPD

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 berdasarkan analisis kebutuhan dana, dimana program yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2026.

Tabel 2. 7
Indikator Kinerja Setda dalam RKPD Tahun 2026

No	RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program	Pagu Indikatif	Program	Kebutuhan Dana
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	7.759.635.390	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	7.759.635.390
2	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.037.061.303	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.037.061.303
3	Program Kesejahteraan Rakyat	88.146.902.648	Program Kesejahteraan Rakyat	88.146.902.648
4	Program Perekonomian dan Pembangunan	7.629.149.800	Program Perekonomian dan Pembangunan	7.629.149.800
5	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	350,000,000	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	350,000,000



6	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.760.977.941	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.760.977.941
7	Program Penataan Organisasi	1.589.000.000	Program Penataan Organisasi	1.589.000.000
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tidak dicantumkan dalam dokumen secara spesifik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	443.238.362.794

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, dalam hal ini Tujuan dan Sasaran dalam RKPD yang dapat diampu oleh Setda, adalah:

Tabel 2. 8
Tujuan dan Sasaran dalam RKPD Tahun 2026 yang Diampu Setda

Tujuan	Sasaran
(1) Terwujudnya sumber daya manusia yang cagEUR, bageur, bener, pinter, dan singer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Terbentuknya individu beragama, beretika, dan berbudaya 3. Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum 4. Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan 5. Terbentuknya individu kreatif dan cekatan
(2) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi berbasis sumber daya lokal dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing 2. Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas 3. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

Tujuan	Sasaran
	<p>swasembada pangan serta kesejahteraan petani/nelayan</p> <p>4. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta aktivitas usaha ekonomi kerakyatan dan tenaga kerja kompeten</p> <p>5. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro</p> <p>6. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing</p>
(3) Terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial, dan ekonomi berbasis lingkungan	<p>1. Meningkatnya layanan infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan sekitar kawasan konservasi, serta penataan perkotaan berbasis lingkungan</p> <p>2. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat</p>
(4) Terwujudnya masyarakat mandiri dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi	<p>1. Meningkatnya penerapan IPTEK, riset, dan inovasi dalam pembangunan</p> <p>2. Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan</p>
(5) Terwujudnya birokrasi yang gesit dan berorientasi pelayanan	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif

Program Pembangunan Daerah dalam RKPD yang diamanatkan kepada Setda, adalah:

Tabel 2. 9
Tabel Program Pembangunan

No.	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Unit Kerja



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Poin	50,15	Biro Perekonomian
		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, Investasi dan BLUD	Poin	50,15	
2.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Lingkup Administrasi Pembangunan	Persen	100	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.	Program Penataan Organisasi	Peringkat Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur	Peringkat	3	Biro Organisasi
		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik	Persen	80	
		Nilai Pelaporan Kinerja	Poin	12,55	
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Budaya Kerja Minimal "Baik"	Persen	65,79	
		Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Perangkat Daerah Minimal Kategori "B"	Persen	92	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Sistem Kerja Dinamis	Persen	100	
4.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Poin	96,91	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
5.	Program Kesejahteraan Rakyat		Poin	50,15	Biro Kesejahteraan Rakyat
6.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Poin	50,2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Poin	86,35	
7.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persen	87,12	Biro Hukum dan HAM
			Persen	87,37	
8.	Program Penunjang			50,20	Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum
				91,34	

Sumber: Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Stakeholder

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah (Setda) Tahun 2026 merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang harus memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Masukan ini menjadi instrumen penting dalam penyempurnaan dokumen agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Telaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

rekomendasi strategis terhadap masukan yang telah diterima sehingga menghasilkan dokumen yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Masukan stakeholder ini diperoleh dari hasil penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025. Metode pengumpulan masukan dilakukan melalui penyebaran format dan kuesioner kepada para stakeholder selama hampir tiga pekan. Proses ini berhasil menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, perwakilan kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, serta civitas akademika.

Identifikasi Stakeholder Dan Kategori Masukan

Stakeholder yang memberikan masukan dalam penyusunan dokumen rencana kerja Setda 2026 terdiri dari berbagai elemen, yaitu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyampaikan aspek regulasi, kebijakan daerah, termasuk memberikan masukan terkait efektivitas kebijakan serta optimalisasi anggaran daerah serta integrasi program kerja lintas sektor. Akademisi dan Lembaga Penelitian menyumbangkan kajian berbasis data untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat memberikan perspektif kebutuhan dunia usaha terkait investasi, perizinan, dan ekosistem ekonomi daerah. Kementerian dan Lembaga menyoroti aspek transparansi, inklusivitas kebijakan, serta dampak sosial dari program kerja pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan aspirasi terkait pembinaan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan daerah termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kategori masukan yang telah dikumpulkan mencakup aspek kebijakan dan regulasi, program dan kegiatan prioritas, pelayanan publik dan tata kelola, sinergi dan kolaborasi, serta digitalisasi dan inovasi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

Analisis Implikasi Terhadap Dokumen Rencana Kerja

Masukan dari stakeholder menunjukkan perlunya revisi kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi dan sosial, yang berdampak pada penyempurnaan kebijakan strategis dalam dokumen perencanaan. Optimalisasi anggaran untuk program pembangunan ekonomi khususnya pada pendukung Program Jabar Istimewa perlu diterapkan melalui penyesuaian alokasi anggaran pada program prioritas. Peningkatan kualitas layanan digital diperlukan untuk efisiensi birokrasi, sehingga kebijakan transformasi digital dalam di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus dirumuskan dengan baik. Penguatan kerja sama dengan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur mendorong peningkatan program kemitraan strategis. Pemanfaatan AI dan big data dalam perencanaan daerah akan menjadi dasar penyusunan roadmap transformasi digital di Setda.

Tabel 2. 10
Analisis Implikasi Terhadap Dokumen Rencana Kerja

Kategori	Masukan Stakeholder	Implikasi terhadap Rencana Kerja
Kebijakan dan Regulasi	Perlu revisi kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi dan sosial	Penyempurnaan kebijakan strategis dalam dokumen perencanaan
Program dan Kegiatan Prioritas	Optimalisasi anggaran untuk program pembangunan ekonomi khususnya pada pendukung Program Jabar Istimewa	Penyesuaian alokasi anggaran pada program prioritas
Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas layanan digital untuk efisiensi birokrasi	Perumusan kebijakan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Sinergi dan Kolaborasi	Penguatan kerja sama dengan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur	Peningkatan program kemitraan strategis
Digitalisasi dan Inovasi	Pemanfaatan AI dan <i>big data</i> dalam perencanaan daerah	Fasilitasi Penyusunan kebijakan/roadmap transformasi digital



Berdasarkan hasil analisis terhadap masukan stakeholder, beberapa rekomendasi strategis yang perlu diakomodasi dalam dokumen rencana kerja Setda tahun 2026 meliputi peningkatan keterpaduan kebijakan dengan integrasi kebijakan lintas sektor serta penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Penajaman program prioritas perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis hasil (*outcome-based budgeting*) guna meningkatkan efektivitas anggaran, serta fokus pada program-program unggulan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Optimalisasi pelayanan publik dapat dicapai melalui implementasi digitalisasi layanan dengan pendekatan berbasis data dan penguatan kapasitas SDM dalam menghadapi transformasi digital. Peningkatan sinergi multipihak harus dilakukan dengan memperluas jaringan kerja sama dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, serta meningkatkan peran Setda dalam memfasilitasi kemitraan strategis antar pemangku kepentingan. Transformasi digital dan inovasi perlu diarahkan pada pengembangan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

Masukan dari stakeholder memberikan wawasan berharga dalam penyempurnaan dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2026. Dengan mengakomodasi berbagai perspektif dan rekomendasi yang telah disampaikan, Setda dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih inklusif, inovatif, serta responsif terhadap tantangan dan peluang pembangunan daerah. Telaahan masukan *Stakeholder* ini akan menjadi referensi utama dalam finalisasi dokumen agar lebih adaptif terhadap kebutuhan stakeholder serta dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang. Di bawah ini dicantumkan daftar kebutuhan dan masukan stakeholder dalam rangka penyempurnaan rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026.



Tabel 2. 11
Kebutuhan Perangkat Daerah Terhadap Layanan Sekretariat Daerah
Tahun 2025-2029

No	Biro	Layanan yang Dibutuhkan	Perangkat Daerah
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi	Penguatan terkait LPPD (IKK Banjir, IKK Abrasi dan IKK Irigasi)	DSDA
		Penyusunan naskah kerja sama dengan pihak ketiga	
		Penyusunan naskah kerja sama antar pemerintah daerah	
		PKS dengan kabupaten/kota	DISKOMINFO
		PKS dengan BPS, kabupaten/kota, desa	
2	Biro Hukum dan Ham	Penyusunan Pergub Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	DBMPR
		Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	
		Peraturan Daerah Kebijakan Teknis Kehutanan	DISHUT
		Peraturan Daerah Tentang Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan sektor Kelautan dan Perikanan Kewenangan Pemerintah Provinsi	DKP
		Kajian Pengelolaan Tata Kelola Wilayah Pesisir	
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama	DISNAKERTRANS
		Fasilitasi Pembinaan Pengupahan Di India, Kamboja, Vietnam, dan Jawa Tengah	
		Fasilitasi Pembinaan Pengupahan Bagi Perusahaan Yang Tidak Mampu Membayar Upah Minimum	
4	Biro Perekonomian	Perlu analisis kemungkinan perubahan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	DSDA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

5	Biro Organisasi	Pembentukan UPTD Penilaian Kompetensi dan Potensi ASN Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat	BKD
		1. Memanfaatkan data hasil pengukuran ikk untuk memperbaiki kebijakan pemprov jika dimungkinkan menjadi IKU Sekda. 2. Mendisiminasikan pemahan tentang tata kelola kebijaka publik yang berkualitas kepada seluruh pengambil kebijakan. 3. Mendorong tiap asisten memfasilitasi PD di bawah koordinasinya menerapkan IKK dalam mengelola perda/pergub yang diampunya.	BP2D
		Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik PD	DBMPR
		Penguatan terkait Refornasi Birokrasi	DSDA
		Penguatan terkait SAKIP	
		Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Di Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	DISDUKCAPIL
		Penguatan Sakip Perangkat Daerah Di Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	
		Pembinaan Penerapan Budaya Kerja Di Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	
		Pembinaan Implementasi Kebijakan Tatalaksana Di Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	
		Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	
		Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Di Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	
		Pembinaan penerapan budaya kerja	DPMPSTP
		Pembinaan implementasi kebijakan tata laksana	
		Pembinaan pelayanan publik Perangkat Daerah	
Penataan Kelembagaan UPTD di lingkup Disperindag	DISINDAG		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

		Pendampingan Pembangunan Zona Integritas di DKP Jabar dan unit kerja	DKP
		Pendampingan SAKIP Perangkat Daerah	
		Pendampingan untuk kajian SOTK DKP Jabar agar sesuai tupoksi	
6	Biro Administrasi Pimpinan	<i>Entry meeting</i> Pemeriksaan LKPD	INSPEKTORAT
		Pemeriksaan Kinerja Pemda oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri	
		<i>Entry meeting</i> Pemeriksaan Kepatuhan	
		Anugerah PNS Berprestasi 2026 Tingkat Provinsi	BKD
		Fasilitasi Pelantikan Struktural	
		Fasilitasi Pelantikan Fungsional	
		Pembekalan Penerimaan Lulusan IPDN	
		Sumpah Janji PNS Formasi TAHUN 2024	
		Apel Pagi yang dirangkaikan dengan Penyerahan SK Pensiun	BAKESBANGPOL
		Fasilitasi Peringatan Hari Bela Negara	
		Fasilitasi Peringatan Hari Lahir Pancasila	
		Pengukuhan Paskibraka Tingkat Provinsi Jawa Barat	
		Fasilitasi Pelantikan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Provinsi Jawa Barat	
		Fasilitasi Hari Peduli Sampah Nasional	DLH
Fasilitasi Hari Lingkungan Hidup			
Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Barat "Raksa Prasada"			
7	Biro Administrasi Pimpinan	Penyerahan Pemenang Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota de Jawa Barat "Adminduk Istimewa"	DISDUKCAPIL
		Fasilitasi <i>West Java Investment Summit</i>	DPMPTSP
		Gebyar Pelayanan Terpadu	DISINDAG
		Promosi Bersama	
8	Biro Umum	Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	INSPEKTORAT



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	<p>Pemeriksaan Kinerja Pemda oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri</p> <p>Pemeriksaan Kepatuhan Pemda Oleh BPK RI</p> <p>Acara Puncak Hari Antikorupsi Sedunia</p> <p>Anugerah PNS Berprestasi 2026 Tingkat Provinsi</p> <p>Fasiliatasi Pelantikan Struktural</p> <p>Pelantikan Fungsional</p> <p>Pembekalan Penerimaan Lulusan IPDN</p> <p>Pelantikan CASN</p> <p>Apel Pagi yang dirangkaikan dengan Penyerahan SK Pensiun</p>	BKD
	<p>Peringatan Hari Bela Negara</p> <p>Peringatan Hari Lahir Pancasila</p> <p>Pengukuhan Paskibraka Tingkat Provinsi Jawa Barat</p> <p>Pengenalan Sejarah Duplikat Bendera Pusaka Paskibraka Tingkat Provinsi Jawa Barat</p> <p>Kunjungan Museum Paskibraka Tingkat Provinsi Jawa Barat</p> <p>Pelantikan Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Provinsi Jawa Barat</p>	BAKESBANGPOL
	<p>Hari Gizi Nasional</p> <p>Hari Kanker Sedunia</p> <p>Hari Tuberkulosis Sedunia</p> <p>Pekan Imunisasi Dunia</p> <p>Hari Lanjut Usia Nasional</p> <p>Hari Anak Nasional</p> <p>Pekan Menyusui Sedunia</p> <p>Hari Remaja Internasional</p> <p>Hari Kesehatan Nasional</p>	DINKES
	<p>Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Barat "Raksa Prasada"</p> <p>Penyerahan Sertifikat Proper Provinsi Jawa Barat</p>	DLH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

		Penyerahan Pemenang Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota di Jawa Barat "Admindak Istimewa"	DISDUKCAPIL
		Penyerahan dokumen kependudukan untuk para Purna tugas	
		Forikan dan Gerakan Memasyarakatkan makan Ikan (Bazar Perikanan)	DKP

Tabel 2. 13
Kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Layanan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

No	Biro	Layanan yang Dibutuhkan	Kabupaten/Kota
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi	Penyelesaian Batas Daerah dengan Kabupaten yang berbatasan Tahun 2025 menerbitkan Kesepakatan antar Kepala Daerah dan selanjutnya untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku	Bandung
		Laporan Penerapan SPM melalui aplikasi	
		DOB Kabupaten Bandung Timur	
		PAW KDH/WKDH/DPRD	
		Pembentukan 7 desa persiapan Tahun 2024 telah disiapkan 2 desa yaitu desa cinunuk kecamatan cileunyi dan desa girimekar kecamatan cilengkrang	
		DOB Kabupaten Bandung Timur	Garut
		Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan Cara penerapan dan pembuatan laporan SPM . dalam rangka menuju penilaian SPM a Word Tahun 2025	
Bimbingan berkaitan dengan dalam pengisian Indikator SPM			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

		Pendampingan terhadap regulasi penetapan PBU dan penyusunan terkait nama-nama rupabumi (alami dan buatan)	Pangandaran
		1. Pembinaan Sistematis Penyusunan SPM Kabupaten Pangandaran	
		2. Pembinaan Pendampingan RAD Kabupaten Pangandaran terkait dengan anggaran dan evaluasi kinerja	
		Pendampingan terkait regulasi usulan cuti KDH dan Wakil KDH dan Anggota DPRD Kabupaten, pemberhentian dan pengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran	
		Pendampingan rencana pembentukan kelurahan	Kota Banjar
		1. Fasilitasi usulan perubahan Permendagri tentang batas daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap 2. Fasilitasi Bimbingan Teknis Penamaan Rupabumi	
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM secara Triwulan	
		1. Fasilitasi Perjalanan Ke Luar Negeri dengan alasan penting (ibadah agama) 2. Fasilitasi Peresmian Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD	
		Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD berdasarkan regulasi/permendagri terbaru	
		Evaluasi batas wilayah dan PNR	Karawang
2	Biro Hukum dan Ham	Peningkatan kualitas regulasi di daerah melalui fasilitasi dan evaluasi yang lebih efektif	Bandung
		Bimbingan Teknis dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Garut



		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan penyusunan produk hukum daerah bersifat pengaturan; 2. Pembinaan Peningkatan Pemahaman tentang Penilaian JDIH; 3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana ruangan JDIH; 4. Pembinaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi ASN dan Masyarakat Miskin 	Kota Banjar
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Penyusunan Produk Hukum 2. Bimtek Legal Drafting 3. Proses Fasilitasi/Evaluasi secara Luring/Daring 4. Bimtek Pengelola JDIH 5. Bimtek Pengisian IRH 6. Sosialisasi Produk Hukum Pusat dan Daerah 7. Pembinaan Sadar Hukum Kelurahan 8. Diklat Pendidikan Khusus Profesi Advokat 	Kota Tasikmalaya
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi	Penyelesaian Batas Daerah dengan Kabupaten yang berbatasan Tahun 2025 menerbitkan Kesepakatan antar Kepala Daerah dan selanjutnya untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku	Bandung
		Laporan Penerapan SPM melalui aplikasi	
		DOB Kabupaten Bandung Timur	
		PAW KDH/WKDH/DPRD	
		Pembentukan 7 desa persiapan Tahun 2024 telah disiapkan 2 desa yaitu desa cinunuk kecamatan cileunyi dan desa girimekar kecamatan cilengkrang	Garut
		DOB Kabupaten Bandung Timur	
		Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan Cara penerapan dan pembuatan laporan SPM . dalam rangka menuju penilaian SPM a Word Tahun 2025	Pangandaran
		Bimbingan berkaitan dengan dalam pengisian Indikator SPM	
Pendampingan terhadap regulasi penetapan PBU dan penyusunan terkait nama-nama rupabumi (alami dan buatan)			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Sistematis Penyusunan SPM Kabupaten Pangandaran 	



		2. Pembinaan Pendampingan RAD Kabupaten Pangandaran terkait dengan anggaran dan evaluasi kinerja	
		Pendampingan terkait regulasi usulan cuti KDH dan Wakil KDH dan Anggota DPRD Kabupaten, pemberhentian dan pengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran	
		Pendampingan rencana pembentukan kelurahan	
		1. Fasilitasi usulan perubahan Permendagri tentang batas daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap 2. Fasilitasi Bimbingan Teknis Penamaan Rupabumi	Kota Banjar
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM secara Triwulan	
		1. Fasilitasi Perjalanan Ke Luar Negeri dengan alasan penting (ibadah agama) 2. Fasilitasi Peresmian Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD	
		Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD berdasarkan regulasi/permendagri terbaru	
		Evaluasi batas wilayah dan PNR	Karawang
2	Biro Hukum dan Ham	Peningkatan kualitas regulasi di daerah melalui fasilitasi dan evaluasi yang lebih efektif	Bandung
		Bimbingan Teknis dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Garut
		1. Pembinaan penyusunan produk hukum daerah bersifat pengaturan; 2. Pembinaan Peningkatan Pemahaman tentang Penilaian JDIH; 3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana ruangan JDIH; 4. Pembinaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi ASN dan Masyarakat Miskin	Kota Banjar
		1. Bimtek Penyusunan Produk Hukum 2. Bimtek Legal Drafting 3. Proses Fasilitasi/Evaluasi secara Luring/Daring 4. Bimtek Pengelola JDIH 5. Bimtek Pengisian IRH 6. Sosialisasi Produk Hukum Pusat dan Daerah	Kota Tasikmalaya



		<p>7. Pembinaan Sadar Hukum Kelurahan</p> <p>8. Diklat Pendidikan Khusus Profesi Advokat</p>	
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi	<p>Penyelesaian Batas Daerah dengan Kabupaten yang berbatasan Tahun 2025 menerbitkan Kesepakatan antar Kepala Daerah dan selanjutnya untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku</p>	Bandung
		Laporan Penerapan SPM melalui aplikasi	
		DOB Kabupaten Bandung Timur	
		PAW KDH/WKDH/DPRD	
		<p>Pembentukan 7 desa persiapan Tahun 2024 telah disiapkan 2 desa yaitu desa cinunuk kecamatan cileunyi dan desa girimekar kecamatan cilengkrang</p>	Garut
		DOB Kabupaten Bandung Timur	
		<p>Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan Cara penerapan dan pembuatan laporan SPM . dalam rangka menuju penilaian SPM a Word Tahun 2025</p>	Pangandaran
		Bimbingan berkaitan dengan dalam pengisian Indikator SPM	
<p>Pendampingan terhadap regulasi penetapan PBU dan penyusunan terkait nama-nama rupabumi (alami dan buatan)</p>			
		<p>1. Pembinaan Sistematika Penyusunan SPM Kabupaten Pangandaran</p> <p>2. Pembinaan Pendampingan RAD Kabupaten Pangandaran terkait dengan anggaran dan evaluasi kinerja</p> <p>Pendampingan terkait regulasi usulan cuti KDH dan Wakil KDH dan Anggota DPRD Kabupaten, pemberhentian dan pengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran</p>	
		<p>Pendampingan rencana pembentukan kelurahan</p>	



		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi usulan perubahan Permendagri tentang batas daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap 2. Fasilitasi Bimbingan Teknis Penamaan Rupabumi 	Kota Banjar
		Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM secara Triwulan	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Perjalanan Ke Luar Negeri dengan alasan penting (ibadah agama) 2. Fasilitasi Peresmian Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD 	
		Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD berdasarkan regulasi/permendagri terbaru	
		Evaluasi batas wilayah dan PNR	Karawang
2	Biro Hukum dan Ham	Peningkatan kualitas regulasi di daerah melalui fasilitasi dan evaluasi yang lebih efektif	Bandung
		Bimbingan Teknis dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Garut
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan penyusunan produk hukum daerah bersifat pengaturan; 2. Pembinaan Peningkatan Pemahaman tentang Penilaian JDIH; 3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana ruangan JDIH; 4. Pembinaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi ASN dan Masyarakat Miskin 	Kota Banjar
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Penyusunan Produk Hukum 2. Bimtek Legal Drafting 3. Proses Fasilitasi/Evaluasi secara Luring/Daring 4. Bimtek Pengelola JDIH 5. Bimtek Pengisian IRH 6. Sosialisasi Produk Hukum Pusat dan Daerah 7. Pembinaan Sadar Hukum Kelurahan 8. Diklat Pendidikan Khusus Profesi Advokat 	Kota Tasikmalaya
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pemberian program Beasiswa ti Bupati (BESTI) bagi Masyarakat Kabupaten Bandung	Bandung
		Fasilitasi pemberian Hibah kepada Ormas keagamaan dan Lembaga keagamaan	



		Klasifikasi dan Standarisasi Besaran Dana Hibah Kepada Lembaga Keagamaan Dari Biro Kesra Provinsi Jawa Barat	Garut
		Bimbingan Teknis Bagi Seluruh Aparatur Yang Berkaitan dengan Hibah Keagamaan dalam Hal Penyusunan Standarisasi Terhadap Satuan Harga Barang. (Yang akan dipergunakan dalam Pembangunan secara fisik	GARUT
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut pembinaan terkait TP UKS/M Kabupaten Pangandaran 2. Pembinaan Fasilitasi Ormas Islam dan Organisasi Kepemudaan Islam 3. Pembinaan Fasilitasi Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji 4. Pembinaan Fasilitasi ODGJ 	Pangandaran
		Fasilitasi koordinasi implementasi kebijakan sektor kesehatan pendidikan dan keagamaan kabupaten/kota	Kota Depok
4	Biro Perekonomian	fasilitasi kegiatan pengendalian inflasi daerah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan TPID	Bandung
		fasilitasi pembinaan BUMD pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pengelolaan dan pembinaan kegiatan usaha BUMD	
		fasilitasi pengelolaan dan konsultasi kegiatan DBHCHT pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengelolaan dan peraturan DBHCHT	
		fasilitasi pembinaan BLUD pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pembinaan dan pengelolaan BLUD	
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pemberian program Beasiswa ti Bupati (BESTI) bagi Masyarakat Kabupaten Bandung	Bandung
		Fasilitasi pemberian Hibah kepada Ormas keagamaan dan Lembaga keagamaan	
		Klasifikasi dan Standarisasi Besaran Dana Hibah Kepada Lembaga Keagamaan Dari Biro Kesra Provinsi Jawa Barat	Garut



		Bimbingan Teknis Bagi Seluruh Aparatur Yang Berkaitan dengan Hibah Keagamaan dalam Hal Penyusunan Standarisasi Terhadap Satuan Harga Barang. (Yang akan dipergunakan dalam Pembangunan secara fisik	GARUT
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut pembinaan terkait TP UKS/M Kabupaten Pangandaran 2. Pembinaan Fasilitasi Ormas Islam dan Organisasi Kepemudaan Islam 3. Pembinaan Fasilitasi Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji 4. Pembinaan Fasilitasi ODGJ 	Pangandaran
		Fasilitasi koordinasi implementasi kebijakan sektor kesehatan pendidikan dan keagamaan kabupaten/kota	Kota Depok
4	Biro Perekonomian	<p>fasilitasi kegiatan pengendalian inflasi daerah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan TPID</p> <p>fasilitasi pembinaan BUMD pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pengelolaan dan pembinaan kegiatan usaha BUMD</p> <p>fasilitasi pengelolaan dan konsultasi kegiatan DBHCHT pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengelolaan dan peraturan DBHCHT</p> <p>fasilitasi pembinaan BLUD pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pembinaan dan pengelolaan BLUD</p>	Bandung
		fasilitasi, koordinasi, implementasi kebijakan di bidang Sumber Daya Alam fasilitasi, koordinasi, mplementasi kebijakan di bidang SDA seperti : peningkatan angka rasio elektrifikasi, kuota JBT, JBKP, elpiji 3 Kg, pupuk bersubsidi, penataan kawasan pertambangan	



		<p>Pembuatan Buku Panduan yang berkaitan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sinergi dan membantu distribusi dan pemasaran komoditas pangan dalam upaya ketersediaan pangan, stabilisasi harga serta potensi daerah lainnya. 2. Mempercepat distribusi dan pemasaran komoditas pangan serta sebagai langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah 	Garut
		Kebijakan optimalisasi potensi energi baru terbarukan (EBT)	Kuningan
		Kebijakan pengaturan disitribusi hasil pertanian dari daerah produsen	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Asistensi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2. Koordinasi dan Asistensi Kebijakan pertanian, kehutanan kelautan dan perikanan 3. Koordinasi dan Asistensi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup 4. Koordinasi dan Asistensi Kebijakan Energi dan Air" 	Kota Banjar
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Asistensi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2. Koordinasi dan Asistensi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)" 	
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan Maturisasi UKPBJ Menuju Level 4 Strategis	Bandung
		Pembinaan Mengenai Upaya Pemenuhan SDM JF PPBJ di Daerah	
		Pembinaan SDM Pengelola LPSE	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Administrator Sistem LPSE 2. Bimtek Pengelolaan LPSE 3. Bimtek Pelaksanaan dan Evaluasi Clearing House 4. Bimtek Perencanaan PBJ 5. Bimtek Monev PBJ 6. Bimtek Monev E-Purchasing 	Bekasi



		Pendampingan Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Garut
		Pendampingan Pemenuhan Bukti Dukung Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Area pengadaan Barang/Jasa Monitoring Center For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kompetensi Kepala UKPBJ 2. Pelatihan Kompetensi Penjurangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3. Bimtek Penggunaan aplikasi/sistem Pengadaan Barang/Jasa 4. Bimtek Reviu HPS untuk pekerjaan Jasa Konstruksi 5. FGD terkait peningkatan nilai ITKP 6. FGD terkait peningkatan nilai MCP KPK 7. Pelatihan Kompetensi bagi Pengelola LPSE 8. FGD terkait dengan Clearing House 9. Pelatihan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 10. Pelatihan Pelaku Usaha 11. Pelatihan Manajemen Kontrak 	Kota Cirebon
		Pembinaan UKPBJ Kab/Kota:1. Pembinaan pencapaian tingkat kematangan level 42. Pembinaan pemenuhan personil JF PPBJ3. Pembinaan pemenuhan personil pengelola LPSE4. Pembinaan pelaksanaan PBJ melalui katalog v6 "	Ciamis

6	Biro Organisasi	Pelaksanaan Kebijakan RB (Surabi)	Bandung
		Pendampingan SAKIP	
		Pendampingan Peningkatan Pelayanan Publik agar merata di setiap perangkat daerah	
		Perubahan atas Undang-undang 23/2014 dan peraturan pemerintah 18/2016 pasca penyederhanaan birokrasi Tidak Relevan	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

		Bimbingan Teknis dalam rangka pengoptimalan manajemen sumber daya aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya reformasi birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.	Garut
	Biro Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pemenuhan dalam Penyusunan Rencana Aksi RB General dan Rencana Aksi RB Tematik 2. Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Kota 3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tim reformasi Birokrasi dan Tim Audit Reformasi Birokrasi; 4. Pembinaan dalam pemenuhan Praktik Baik; 5. Pembinaan dan Pemenuhan dalam Aplikasi SURABI PD 	Kota Banjar
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Peningkatan kapasitas Tim SAKIP Kota 2. Pembinaan dan Peningkatan kapasitas Perangkat Daerah dalam pemenuhan Dokumen SAKIP 3. Pembinaan dan Fasilitasi Pemenuhan Nilai AKIP Kota dan SAKIP Perangkat Daerah 4. Pembinaan dan Fasilitasi Perangkat Daerah pada Aplikasi SAKIP 5. Bimbingan Penyusunan Perjanjian Kinerja 6. Bimbingan Penyusunan LKIP Pemda dan LKIP Perangkat Daerah 7. Bimbingan Penyusunan Cascading Pemda dan Cascading Perangkat Daerah 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Peningkatan Indeks BerAKHLAK 2. Bimbingan Internalisasi BerAKHLAK 3. Bimbingan Penyusunan Evaluasi Budaya Kerja 	



1FCFCF7D7F

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis (PROBIS) 2. Bimbingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Tata Naskah Dinas 4. Monitoring dan Evaluasi Sistem Kerja 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan tentang kompetensi pelaksana pada penyelenggara pelayanan publik 2. Fasilitasi Pembinaan terhadap pengelola pengaduan pada penyelenggara pelayanan publik 3. Fasilitasi Aplikasi SKM Online 4. Fasilitasi Sistem Informasi Penyelenggara Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) 	
	Biro Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan penyusunan struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah 2. Pembinaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah 3. Pelatihan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) 4. Pelatihan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 5. Pembinaan dan pelatihan evaluasi jabatan 	Kota Banjar
		<p>Peningkatan Kompetensi Agen Perubahan pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Implementasi PKO 2. Pendampingan Penyusunan LKIP 3. Pendampingan Penyusunan Cascading Kinerja 4. Penguatan core value Berakhlak pada Kabupaten/Kota 	Kota Bogor

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pembinaan terkait Penerapan Budaya Pelayanan Prima 	
		Pembinaan terkait Implementasi:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian Dinas 	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

		2. Tata Naskah Dinas	
		3. Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP	
		4. Survei Kepuasan Masyarakat	
		5. Pembinaan terkait implmentasi Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik (Ombudsman RI)	
		6. Pembinaan terkait Implementasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP)	
		7. Fasilitasi Evaluasi Kinerja MPP dan Implementasi MPP Digital	
		8. Pembinaan terkait Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	
		9. Pembinaan Penyusunan Anjab dan ABK Perangkat Daerah	
		10. Pembinaan terkait Evaluasi Kelembagaan	
		1. Pendampingan Standar Operasional Prosedur, Proses Bisnis dan Sistem Kerja pada perangkat daerah 2. Penyediaan pedoman dan standar pelayanan publik sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dan memperbaiki sistem pelayanan publiknya.	Kota Cirebon
		1. Pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah tentang prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. 2. Peningkatan inovasi pelayanan publik	
		Pendampingan Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kota Bandung	Kota Bandung
		Pendampingan Penguatan SAKIP Kota Bandung	
7	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	Sosialisasi Bantuan Keuangan Provinsi dan Tata Cara Penghitungan Realisasi Fisik Kegiatan yang bersumber pada Bantuan Keuangan Meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pelatihan penghitungan realisasi fisik	Bekasi



1FCFCF7D7F

		Bimbingan Teknis Yang berkaitan dengan Pembinaan, Pelaksanaan, Monitiring dan Evaluasi Realisasi Fisik Bantuan Keuangan Provinsi	Garut
		Penyehatan PT. LKM dengan penambahan penyertaan modal	Kuningan
		Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Cianjur
8	Biro Administrasi Pimpinan	Bimtek keprotokolan di Setda dapat meliputi pelatihan protokoler, <i>Master of Ceremony</i> (MC), dan komunikasi publik. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur di bidang humas pemerintahan daerah	Garut
		Hari Jadi Garut	
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Keprotokolan dan <i>Master of Ceremony</i> (MC)	Pangandaran
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Dokumentasi Pimpinan dan Konseptor Pimpinan	
		1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Keprotokolan dan MC 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Komunikasi pimpinan	Kota Banjar
		1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Dokumentasi Pimpinan 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Konseptor Pimpinan	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Keprotokolan dan MC 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Komunikasi pimpinan 	Karawang
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Dokumentasi Pimpinan 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Konseptor Pimpinan 	
7	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	Sosialisasi Bantuan Keuangan Provinsi dan Tata Cara Penghitungan Realisasi Fisik Kegiatan yang bersumber pada Bantuan Keuangan Meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pelatihan penghitungan realisasi fisik	Bekasi
		Bimbingan Teknis Yang berkaitan dengan Pembinaan, Pelaksanaan, Monitiring dan Evaluasi Realisasi Fisik Bantuan Keuangan Provinsi	Garut
		Penyehatan PT. LKM dengan penambahan penyertaan modal	Kuningan
		Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Cianjur
8	Biro Administrasi Pimpinan	Bimtek keprotokolan di Setda dapat meliputi pelatihan protokoler, <i>Master of Ceremony</i> (MC), dan komunikasi publik. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur di bidang humas pemerintahan daerah	Garut
		Hari Jadi Garut	
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Keprotokolan dan <i>Master of Ceremony</i> (MC)	Pangandaran
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Dokumentasi Pimpinan dan Konseptor Pimpinan	



		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Keprotokolan dan MC 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Komunikasi pimpinan 	Kota Banjar
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Dokumentasi Pimpinan 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Konseptor Pimpinan 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Keprotokolan dan MC 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Komunikasi pimpinan 	Karawang
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Dokumentasi Pimpinan 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Konseptor Pimpinan 	
7	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	Sosialisasi Bantuan Keuangan Provinsi dan Tata Cara Penghitungan Realisasi Fisik Kegiatan yang bersumber pada Bantuan Keuangan Meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pelatihan penghitungan realisasi fisik	Bekasi
		Bimbingan Teknis Yang berkaitan dengan Pembinaan, Pelaksanaan, Monitiring dan Evaluasi Realisasi Fisik Bantuan Keuangan Provinsi	Garut
		Penyehatan PT. LKM dengan penambahan penyertaan modal	Kuningan



		Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Cianjur
8	Biro Administrasi Pimpinan	Bimtek keprotokolan di Setda dapat meliputi pelatihan protokoler, <i>Master of Ceremony</i> (MC), dan komunikasi publik. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur di bidang humas pemerintahan daerah	Garut
		Hari Jadi Garut	
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Keprotokolan dan <i>Master of Ceremony</i> (MC)	Pangandaran
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Dokumentasi Pimpinan dan Konseptor Pimpinan	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Keprotokolan dan MC 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Komunikasi pimpinan 	Kota Banjar
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Dokumentasi Pimpinan 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Konseptor Pimpinan 			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Keprotokolan dan MC 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Komunikasi pimpinan 	Karawang



	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Dokumentasi Pimpinan 2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Konseptor Pimpinan 	
--	--	--

Tabel 2. 12
Masukan Badan Usaha Milik Daerah Untuk Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

No	Masukan BUMD
1	Membentuk Tim Pendamping lintas SKPD untuk mengevaluasi dan mendukung pengembangan BUMD
2	Peningkatan kualitas BUMD dapat dilakukan dengan pengelolaan GCG yang semakin baik, optimalisasi model bisnis, penguatan modal dan akses pendanaan
3	Rapat koordinasi bagi seluruh BUMD di sektor usaha masing-masing setiap bulan.
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten
5	Kemudahan dalam penyediaan dana dan pendanaan
6	Birokrasi yang cepat dan mudah
7	Inovasi dan adaptasi teknologi
8	Regulasi yang konsisten dan fleksibel
9	Kolaborasi antara BUMD dan BUMN
10	Pemimpin yang profesional
11	Mengedepankan tata kelola perusahaan (GCG)
12	Lakukan terus pembinaan dan pengawasan secara optimal terhadap semua BUMD di lingkungan Provinsi Jawa Barat baik itu terhadap BUMD Lembaga Keuangan maupun BUMD Non Lembaga Keuangan tanpa pilih kasih dan akan kelihatan mana BUMD yang sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga akan terlihat mana BUMD yang bisa diselamatkan, mana BUMD yang bisa diprivatisasi dan mana BUMD yang tidak bisa diselamatkan
13	Diperlukannya pelatihan dan pendidikan untuk BUMD
14	Penganggaran sarana prasarana maksimal
15	Penetapan arah dan strategi untuk setiap BUMD
16	Keleluasaan memanfaatkan aset
17	Kemitraan strategis dan inovasi bisnis kerjasama <i>start up</i> , BUMN, swasta, dukungan teknologi informasi agar mempunyai daya saing yang tinggi dan inovatif sesuai potensi
18	Lakukan diagnosa mendalam terhadap persoalan masing masing BUMD sehingga didapat obat yang tepat, lakukan penggantian direksi dengan yang lebih punya daya akses kuat terhadap pasar dan kebijakan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

Tabel 2. 13
Masukan Kementerian/Lembaga Untuk Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Tahun 2025-2029

No	Kementerian/Lembaga	Masukan
1	Kementerian & Lembaga	Sebaiknya rumusan tujuan dan sasaran itu dikembangkan dengan meng-cascade dari setiap misi yang ada terkait dengan bidang tugas pada masing-masing asisten. Jadi akan kelihatan setiap asisten itu tujuan dan sasaran satrategisnya terkait dengan misi yang mana saja. Misi mana (yang ke berapa saja) yang menjadi acuan bagi Asisten I, Asisten II, dan Asisten III
2	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI	<p>1 laju pertumbuhan ekonomi belum mencapai target sesuai RPD 2024, disamping itu pertumbuhan masih terkonsentrasi pada wilayah aglomerasi. Pemprov agar mendorong realisasi investasi secara merata di wilayah2 jawa barat di luar aglomerasi sehingga akan menjadi motor pemerataan pertumbuhan sekaligus mengatasi ketimpangan/gini ratio yg cenderung naik.</p> <p>2 Inflasi perlu dijaga. deflasi yg terus menerus perlu dilakukan mitigasi karena bisa mengindikasikan menurunnya daya beli masyarakat</p>
		<p>3 pemprov agar mengurangi hibah ke K/L dan mengalihkan penganggaran dana bantuan keuangan ke Desa untuk meningkatkan kapasitas BUMDes yang sangat strategis dalam pengelolaan 20% dana desa untuk program ketahanan pangan untuk renja 2026, berkaitan dengan anggaran pendidikan, bercermin dari kebijakan pencadangan dana perimbangan yang berdampak pada tidak adanya alokasi DAK Fisik untuk bidang konektivitas di tahun 2025 perlu dimitgasi hal yg sama akan terjadi di th 2026, sehingga untuk menjamin terpeliharanya kondisi jalan provinsi, pemprov agar menyediakan alokasi anggaran pemeliharaan jalan dengan sumber pendanaan dr PAD untuk mengkompensasi ketiadaan DAK F infrastruktur.</p>
3	Kanwil Bank Indonesia Provnsi Jawa Barat	<p>Pertumbuhan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Indonesia Jabar mendukung program prioritas Jawa Barat yang berfokus pada Pembangunan jalan mulus, jabar caang, dan sarana Pendidikan. Pembangunan infrastruktur dan interkoneksi antar Daerah merupakan hal krusial dan sangat penting sebagai faktor yang berkontribusi pada perekonomian. Dalam rangka mendukung



		<p>pembangunan infrastruktur dan interkoneksi antar Daerah, penting untuk membentuk BUMD Pengelolaan Transportasi dan Terintegrasi (termasuk sistem pembayarannya) Bank Indonesia Jabar siap bersinergi dalam memfasilitasi pembayaran transportasi yang terintegrasi di Jawa Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di tengah divergensi ekonomi dunia berlanjut dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti pariwisata, ekonomi syariah, hilirisasi, dan keuangan hijau - Bank Indonesia mendorong peningkatan kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yaitu antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan dan pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau <p>Inflasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank Indonesia siap bersinergi dalam berkolaborasi dalam upaya pengendalian inflasi baik yang bersifat seasonal maupun struktural, a.l dukungan pelaksanaan GPM melalui subsidi ongkos angkut dan sarana prasarana pendukung, memfasilitasi kegiatan KAD - Memperhatikan menurunkan kondisi unsur harga tanah akibat penggunaan pupuk kimia, perlu adanya sosialisasi dan gerakan mengajak penggunaan pupuk ramah lingkungan - Dalam hal akan terjadi kenaikan harga yang diatur Pemerintah, diperlukan koordinasi penetapan tarif dengan berbagai pihak sehingga perubahan harga yang dilakukan pada waktu yang tepat. - Bank Indonesia Jabar dapat mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan antara lain melalui pemberian capacity building digital farming, hilirisasi baik melalui diversifikasi produk, pemrosesan produk untuk menekan food waste and loss, serta sosialisasi dan pendampingan mekanisme pertanian <i>urban farming</i>. <p>Digitalisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi masyarakat, dan digitalisasi di seluruh aspek perlu didorong dan diharapkan dapat memperlancar transaksi ekonomi sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi, menambah efisiensi, dan efektivitas kegiatan ekonomi
--	--	--



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	<ul style="list-style-type: none"> - Bank Indonesia Jabar siap bersinergi dalam menyusun peta jalan untuk memperkuat mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean governance) sesuai dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah - Bank Indonesia Jabar mendukung pengembangan kualitas SDM melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperkuat Ekonomi Keuangan Digital untuk menyiapkan SDM yang unggul. - Dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan teknologi, BI Jabar siap mendorong perluasan implementasi QRIS di masyarakat untuk mendorong Ekonomi Kreatif.
--	--

Tabel 2. 14
Program Prioritas Perangkat Daerah Yang Membutuhkan Fasilitas
Perumusan Dan Evaluasi Kebijakan Serta Pembentukan Kerjasama Daerah

No	Perangkat Daerah	Program Prioritas	Biro Penanggungjawab
1	DISDUKCAPIL	Penilaian Kinerja Disdukcapil Kabupaten/Kota de Jawa Barat "Admindak Istimewa"	Biro Kesra
2	DISKOMINFO	percepatan perwujudan transformasi digital di lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat	Biro Kesra
		penyediaan data mikro berbasis keluarga dan desa	Biro Kesra
3	DPMPTSP	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Perda Investasi dan Kemudahan Berusaha	Biro Perekonomian
		Program Promosi Penanaman Modal	Biro Perekonomian
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Biro Perekonomian
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Biro Perekonomian
4	DISHUT	Penyusunan Peraturan Daerah Kebijakan Teknis Kehutanan	Biro Perekonomian



5	DKP	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Biro Perekonomian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Biro Perekonomian
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Daerah Tentang Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan sektor Kelautan dan Perikanan Kewenangan Pemerintah Provinsi	Biro Perekonomian
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Biro Perekonomian
		Program Pengolahan dan Pemasaran	Biro Perekonomian
6	DSDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rencana Tata Tanam Global Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dan Kewenangan Daerah Provinsi pada Wilayah Kerja Komisi Irigasi Daerah Provinsi Jawa Barat Musim Tanam 2024/2025	Biro Perekonomian
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rencana Tata Tanam Global Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dan Kewenangan Daerah Provinsi pada Wilayah Kerja Komisi Irigasi Daerah Provinsi Jawa Barat Musim Tanam 2024/2025	Biro Perekonomian
		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Rencana Alokasi Air Tahunan pada Daerah Aliran Sungai Cipalebuh di Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki Tahun 2024-2025 dan Rencana Alokasi Air Tahunan pada Daerah Aliran Sungai Cikaso di Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno Tahun 2024-2025	Biro Perekonomian
		Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air	Biro Perekonomian



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

		Permukaan, Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, Harga Dasar Air Permukaan, dan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	
--	--	--	--



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 ditetapkan delapan Prioritas Nasional (PN) yang menjadi pelaksanaan dari kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Untuk tahun 2026, PN meliputi:

1. PN1: **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM** dengan sasaran ‘Terwujudnya kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia’. Adapun fokus dari prioritas ini adalah:
 - a. Memperkuat toleransi dan keberagaman dalam kehidupan sosial.
 - b. Penguatan peran masyarakat sipil dan demokrasi partisipatif.
 - c. Peningkatan pemahaman dan implementasi HAM dalam kebijakan pemerintah.

2. PN2: **Memantapkan Sistem Pertahanan, Keamanan Negara, dan Kemandirian Bangsa** dengan fokus dalam mendorong:
 - a. terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan;
 - b. terbangunnya eco-region Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal;
 - c. meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih;
 - d. menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi;



- e. terwujudnya pengembangan ekonomi digital terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB);
 - f. meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
 - g. pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru
3. **PN3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi** dengan sasaran mendorong:
- a. Perwujudan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan;
 - b. Peningkatan total aset sektor keuangan terhadap PDB;
 - c. Peningkatan nilai tambah pariwisata;
 - d. Peningkatan lapangan kerja yang berkualitas; dan
 - e. Perwujudan pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB
4. **PN4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas** dengan sasaran mendorong:
- a. Pendidikan berkualitas yang merata
 - b. Kesehatan untuk semua
 - c. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
 - d. IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi
 - e. Peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga



1FCFCF7D7F

5. PN5: **Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri** dengan sasaran berfokus dalam mendorong:
- Peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan
 - Penguatan kinerja layanan konektivitas backbone dan sistem logistik nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestic dan global
 - Integrasi ekonomi domestik dan global
6. PN6: **Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan** dengan sasaran mendorong:
- Percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan
 - Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
 - Perwujudan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
 - Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
7. PN7: **Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan** dengan sasaran mendorong:
- Perwujudan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui penyusunan fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi
 - Perwujudan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
 - Perwujudan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
 - Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan



- e. Perwujudan tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan
 - f. Pencapaian peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi
 - g. Pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
8. PN8: **Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur** dengan sasaran: a) mendorong praktek beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju; serta b) resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Kedelapan PN di atas dijabarkan dalam perencanaan prioritas daerah Provinsi Jawa Barat dalam prioritas daerah dan sasaran serta indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Penjabaran Prioritas Nasional Ke Dalam Prioritas Daerah
Provinsi Jawa Barat

PN	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN1	P2 Penyelenggaraan Birokrasi yang Jujur, Bersih, dan Tulus Melayani Masyarakat	



	S19 Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Daerah Indeks Demokrasi Indonesia
PN2	P2 Penyelenggaraan Birokrasi yang Jujur, Bersih, dan Tulus Melayani Masyarakat	
	P7 Memperluas Lapangan Pekerjaan melalui Investasi, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Pengembangan Smart City	
	P6 Perwujudan Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri, Penataan Kampung Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan, Pelabuhan Pendaratan Kapal Nelayan, serta Normalisasi Udara di Pesisir Jawa Barat	
	S18 Meningkatnya Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah	Efektivitas Kerjasama Internasional Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat
	S20 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	S15 Meningkatnya Ketahanan Pangan, Air, dan Energi	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
		Konsumsi Listrik per Kapita
		Kapasitas Air Baku
	S14 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	S10 Mewujudkan Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Informasi dan Komunikasi
	S9 Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	Indeks Ekonomi Hijau Daerah
	S14 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
	S16 Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: a. Kumulatif b. Tahunan
	S14 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
	S9 Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	Indeks Ekonomi Hijau Daerah
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia
PN3	P1 Pembangunan Infrastruktur Jalan ke Pelosok Desa dan Permukiman Perkotaan serta Jaringan Irigasi ke Seluruh Wilayah Pertanian	
	S13 Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	Indeks Kualitas Infrastruktur
	S10 Mewujudkan Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	S15 Meningkatnya Ketahanan Pangan, Air, dan Energi	Konsumsi Listrik per Kapita
PN4	P3 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Berkarakter melalui Penambahan Ruang Kelas Baru, SMA/SMK Gratis, dan Pemberian Beasiswa dalam Rangka Mencetak 10.000 Manajer Putra Daerah	



1FCFCF7D7F

	P4 Terjaminnya Seluruh Layanan Kesehatan Masyarakat melalui Pemenuhan Layanan Khusus di RSUD Kabupaten/Kota, Beasiswa Dokter Spesialis, dan Industri Pengobatan Kearifan Lingkungan	
	S1 Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk di Atas Usia 15 Tahun
		Harapan Lama Sekolah
	S2 Meningkatnya Layanan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata	Usia Harapan Hidup
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita
	S5 Meningkatnya Kualitas Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
		Indeks Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Pemuda
Indeks Pembangunan Gender		
S6 Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah yang Ramah Lingkungan	Tingkat Pengangguran Terbuka	
S21 Meningkatnya Penerapan IPTEK, Riset, dan Inovasi dalam Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	
PN5	P5 Terciptanya Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik melalui Konektivitas Pertanian Berbasis Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	
	S6 Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah yang Ramah Lingkungan	Rasio PDRB Industri Pengolahan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	S7 Meningkatnya Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto
		Ekspor Barang dan Jasa
		Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi
PN6	P7 Memperluas Lapangan Pekerjaan melalui Investasi, Pengembangan Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, serta Pengembangan Smart City	
	P8 Penguatan Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan	
	S3 Meningkatnya Ketahanan Nasional Masyarakat yang Berbudaya Maju	Persentase Penduduk Miskin
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi
	S11 Meningkatnya Pembentukan Kawasan Perkotaan yang Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
	S12 Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri
S22 Memperkuat Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan	Indeks Desa Membangun	
PN7	P2 Penyelenggaraan Birokrasi yang Jujur, Bersih, dan Tulus Melayani Masyarakat	
	S17 Meningkatnya Pemerintahan Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Indeks Integritas Nasional
		Indeks Pelayanan Publik
	S8 Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Tingkat Inflasi



1FCFCF7D7F

PN8	P3 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Berkarakter melalui Penambahan Ruang Kelas Baru, SMA/SMK Gratis, dan Pemberian Beasiswa dalam rangka Mencetak 10.000 Manajer Putra Daerah	
	P6 Perwujudan Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri, Penataan Kampung Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan, Pelabuhan Pendaratan Kapal Nelayan, serta Normalisasi Udara di Pesisir Jawa Barat	
	S4 Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama dan Pemajuan Kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama
		Indeks Pembangunan Kebudayaan
	S16 Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana

Dari delapan prioritas pembangunan daerah pada tabel di atas, terdapat dua yang dijabarkan ke dalam kinerja Sekretariat Daerah yaitu:

- 1.2 P2 Penyelenggaraan Birokrasi yang Jujur, Bersih, dan Tulus Melayani Masyarakat didukung oleh tiga program pada tiga biro; dan
- 2.2 P7 Memperluas Lapangan Pekerjaan melalui Investasi, Pengembangan Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, serta Pengembangan Smart City didukung oleh empat program pada empat biro.

Selanjutnya, di samping prioritas nasional, terdapat arah kebijakan nasional yang membutuhkan perhatian yaitu pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan nasional tahun 2026. RPJMN Tahun 2025-2029 telah menetapkan empat pengarusutamaan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif yaitu pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, serta modal sosial dan transformasi digital. Pengarusutamaan pembangunan nasional bertujuan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dari fokus pembangunan, memberikan akses



pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Pada pengarusutamaan aspek pertama yaitu pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 pada Sekretariat Daerah dijabarkan dalam Program Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Fasilitas dan Koordinas Hukum, serta Program Penataan Organisasi. Empat program ini dirancang untuk mendukung ketercapaian Goal 1, Goal 7, Goal 8, Goal 10, Goal 11, dan Goal 16 dari pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk pengarusutamaan aspek kedua yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sekretariat Daerah terdapat satu program yang mendukung ketercapaiannya yaitu Program Penataan Organisasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagai unit kerja yang bertugas merumuskan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai penghubung utama antara kepala daerah dengan perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan peran ini, Sekretariat Daerah memastikan bahwa kebijakan daerah diimplementasikan secara optimal guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sekretariat Daerah juga berperan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan prinsip *good governance*. Hal ini mencakup penguatan koordinasi tidak hanya antar perangkat daerah, tetapi juga dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Optimalisasi perumusan kebijakan berbasis data dan bukti, serta peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi kebijakan, menjadi



langkah penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan lebih terarah, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sekretariat Daerah juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan daerah tidak hanya bersifat administratif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang lebih berbasis bukti dan partisipatif menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan visi pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, Sekretariat Daerah menetapkan serangkaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2026. Melalui peran strategisnya, Sekretariat Daerah diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin adaptif terhadap perubahan dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan peran tersebut, Sekretariat Daerah telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026. Tujuan dan sasaran ini mencerminkan komitmen Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Adapun tabel tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Tahun 2026 disajikan sebagai berikut.



Tabel 3. 2
Tujuan Dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2026

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target
Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,75%
Terkendalnya Stabilitas Ekonomi Makro	Tingkat Inflasi	Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	1,5 - 3,5 %
Terkendalnya Stabilitas Ekonomi Makro	Terkendalnya Stabilitas Ekonomi Makro	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	81.08%
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Persentase Capaian RB General	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	90,23 poin
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	77,43 persen
		Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah	63,51 persen



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

			dengan Deviasi Kinerja => 0%	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90,31 poin
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	4,77 poin
		Kelembagaan Agile	Nilai Evaluasi Kelembagaan	73,093 poin
		Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	92 persen
		Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	13,61 poin
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori Tinggi

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan sumber daya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

yang tersedia. Dalam melaksanakan suatu program dibutuhkan suatu indikator program dimana indikator sangat diperlukan agar setiap pelaku sebuah kegiatan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukannya telah

berkembang/berubah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif.

RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah Tahun 2026 agar target-target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. Dukungan program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, modal, sosial budaya dan transformasi digital, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 3
Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026



Pengarusutamaan (mainstreaming)	Program Prioritas Tahun 2026	Perangkat Daerah
Aspek I: Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)		
Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Biro Perekonomian; 2. Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
Goal 7 Energi Bersih dan Terjangkau	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Biro Perekonomian; 2. Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
Goal 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Biro Perekonomian; 2. Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan

Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
Goal 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum dan HAM
	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
Aspek II: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 diimplementasikan melalui program prioritas dan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan Jawa Barat. Untuk menjamin sinergitas program pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, penyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat didasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yang telah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dengan memperhatikan indikator ruang

fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah). Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Pembangunan Infrastruktur Jalan ke Pelosok Desa dan Permukiman Perkotaan serta Jaringan Irigasi ke Seluruh Wilayah Pertanian;
- 4.3 **Prioritas 2**, yaitu Penyelenggaraan Birokrasi yang Jujur, Bersih dan Tulus Melayani Masyarakat;
- 5.3 **Prioritas 3**, yaitu Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Berkarakter melalui Penambahan Ruang Kelas Baru, SMA/SMK Gratis, dan Pemberian Beasiswa dalam Rangka Mencetak 10.000 Manajer Putra Daerah;
- 6.3 **Prioritas 4**, yaitu Terjaminnya Seluruh Layanan Kesehatan Masyarakat melalui Pemenuhan Layanan Khusus Di RSUD Kabupaten/Kota, Beasiswa Dokter Spesialis, dan Industri Pengobatan Kearifan Lingkungan;
- 7.3 **Prioritas 5**, yaitu Terciptanya Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik melalui Konektivitas Pertanian Berbasis Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan;



1. **Prioritas 6**, yaitu Perwujudan Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri, Penataan Kampung Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan, Pelabuhan Pendaratan Kapal Nelayan serta Normalisasi Udara di Pesisir Jawa Barat;
2. **Prioritas 7**, yaitu Memperluas Lapangan Pekerjaan melalui Investasi, Pengembangan Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif serta Pengembangan *Smart City*;
3. **Prioritas 8**, yaitu Penguatan Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan.

Perwujudan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dalam hal ini dinamakan **9 Langkah Ngawangun Jabar Istimewa** yang berisikan:

1. **Langkah ka hiji**: Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Permukiman Perkotaan;
2. **Langkah ka dua**: Pembangunan Jaringan Irigasi di Seluruh Wilayah Pertanian, serta Mendorong Terciptanya Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik, melalui Konektivitas Pertanian berbasis Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan;
3. **Langkah ka tilu**: Pengembangan Pendidikan Berkarakter, SMA/SMK Gratis, dan Penambahan Ruang Kelas Baru guna Menjaga Kesetaraan Jumlah Ruang Kelas Sekolah Negeri SD, SMP, dan SMA/SMK;
4. **Langkah ka opat**: Pengembangan Lapangan Kerja Baru dengan Mendorong Investasi di Wilayah Kabupaten/Kota Bertata Ruang Industri serta Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan *Smart City*;
5. **Langkah ka lima**: Penyempurnaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus seperti Kesehatan Ibu dan Anak, Penyakit Jantung, Sarana Cuci Darah, Kanker, Penanganan Stroke dengan Sarana Bedah Syaraf, Layanan Operasi dan layanan lainnya yang selama ini tersentralisasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung serta Pemberian Beasiswa Dokter Spesialis Putra



Daerah sesuai dengan Kelangkaan dan Karakteristik Penyakit Masyarakat;

6. **Langkah ka genep:** Pengembangan Industri Pengobatan berbasis Kearifan Lingkungan;
7. **Langkah ka tujuh:** Mencetak 10.000 Manajer Putra Daerah melalui Beasiswa di Politeknik Berorientasi Terapan;
8. **Langkah ka dalapan:** Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri sampai dengan Tingkat RT (Rukun Tetangga), Penataan Kampung Nelayan, Tempat Pelelangan Ikan, Pelabuhan Pendaratan Kapal Nelayan serta Normalisasi Muara di Pesisir Jawa Barat;
9. **Langkah ka salapan:** Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu,
10. Guru Agama, Ajengan serta Penguatan Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi Berdampak.

Adapun keterkaitan dari perwujudan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mencapai kondisi:

1. Infrastruktur Istimewa;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Istimewa;
3. Pendidikan Istimewa;
4. Kesehatan Istimewa;
5. Pertanian Istimewa;
6. Lingkungan Hidup Istimewa;
7. Ekonomi dan Tata Ruang Istimewa;
8. Kesejahteraan Perangkat Desa Istimewa.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.



Adapun program, kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 berjumlah 8 (delapan) program, yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan 93 (subkegiatan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp569.975.460.000,00 (lima ratus enam puluh Sembilan miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada RKPD Tahun 2026 ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah lingkup Sekretariat Daerah disajikan pada tabel berikut.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F

Tabel 3. 4
Dukungan Biro Pada Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Unggulan Gubernur	Program Pembangunan Daerah	Bentuk Dukungan Biro/Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Program Peningkatan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Langkah Kelima: Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus, serta Pemberian Beasiswa Dokter Spesialis, sesuai dengan Kelangkaan dan Karakteristik Penyakit Masyarakat	Program Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Provinsi Jawa Barat; 2. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Bahan Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting.	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama		Program Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi pelaksanaan Haji; 2. Fasilitasi kegiatan hari besar keagamaan	Biro Kesejahteraan Rakyat



		<p>Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi</p>	<p>Langkah Ketiga: Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, Serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat.</p>	<p>Program Kesejahteraan Rakyat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa untuk Lulusan SMA/SMK/SLB (Perguruan Tinggi); 2. BPMU dengan Syarat Ijazah Tuntas untuk MA Negeri dan Swasta; 3. Kerja Sama Perguruan Tinggi; 4. Optimalisasi Layanan Program Pendidikan Pesantren melalui Penyaluran Bantuan Operasional Santri Kurang Mampu/Beasiswa Santri. 	<p>Biro Kesejahteraan Rakyat</p>
--	--	---	---	-------------------------------------	---	----------------------------------



1FCFCF7D7F

2	P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengadaan Pra DPA untuk melakukan proses pemilihan penyedia sebelum DPA disahkan; 2. Pendampingan Persiapan Proses PBJ sebagai upaya percepatan pengadaan barjasi di Perangkat Daerah; 3. Pendampingan Pemanfaatan Katalog Elektronik; 4. Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 5. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa; 6. Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa diantaranya Dashboard Monev Pengadaan 7. Fasilitasi pembentukan PBJ Desa dan West Java <i>Digital Marketplace</i>; 	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
---	---	---	--	---	---	--------------------------------



					<p>8. Optimalisasi pengelolaan informasi PBJ untuk percepatan pengadaan barjas;</p> <p>9. Pendampingan penggunaan SPSE (Sirup, Katalog elektronik, SPSE) kepada pelaku pengadaan;</p> <p>10. Pembinaan Kelembagaan PBJ menuju PKP-BJ Proaktif;</p> <p>11. Penguatan SDM PBJ;</p> <p>12. Pembentukan <i>Probity Advice</i> berupa layanan pendampingan khusus bagi paket pengadaan barjas;</p> <p>13. Optimalisasi layanan <i>Clearing House</i> bagi pelaku pengadaan yang memerlukan fasilitasi layanan aspek hukum.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



1FCFCF7D7F

		Program Stabilitas Ekonomi Makro Daerah serta Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD		Program Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kolaborasi dalam rangka menjaga stabilitas pangan; 2. Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan pengendalian inflasi daerah; 3. Penguatan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang mendukung pencapaian sasaran inflasi tahunan dan pembinaan TPID kabupaten/kota; 4. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah untuk komoditas pangan strategis; 5. Pemantauan implementasi Roadmap Pengendalian Inflasi untuk Rencana Aksi tahun 2025; 6. Interoperabilitas data harga dan neraca pangan Jawa Barat melalui SILINDA JABAR dengan pemerintah pusat (1 	Biro Perekonomian
--	--	---	--	--------------------------------------	--	-------------------



					<p>Kementerian/Lembaga);</p> <p>7. Monitoring penginputan data dari Kabupaten/kota terkait data ketersediaan, kebutuhan, dan data harga pangan di aplikasi neraca akses pangan secara realtime per bulan (27 kab/kota);</p> <p>8. Koordinasi dan evaluasi kinerja tahunan TPID;</p> <p>9. Koordinasi rutin lintas instansi dan TPID, komunikasi antarwilayah, serta pemanfaatan media untuk membentuk persepsi positif masyarakat terhadap kondisi harga dan pangan;</p> <p>10. Advokasi integrasi kegiatan pengendalian inflasi;</p> <p>11. Koordinasi pemastian jumlah produk bersertifikat halal di Provinsi Jawa Barat</p>	
--	--	--	--	--	---	--



1FCFCF7D7F

					<p>12. Tim Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan di Jawa Barat</p> <p>13. Pengembangan Lapangan Kerja Baru dengan mendorong investasi di wilayah kab/kota bertata ruang industri;</p> <p>14. Program Pengendalian Pemanfaatan Lahan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat - Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan lahan di Provinsi Jawa Barat.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				Program BUMD Sehat	<p>1. GCG Campaign dan Penilaian GCG BUMD;</p> <p>2. Pelaksanaan Audit Kinerja BUMD;</p> <p>3. Pengesahan Perda Peningkatan Modal Dasar BUMD (PT BJB dan PT Agronesia);</p> <p>4. Pendampingan Penugasan BUMD;</p> <p>5. Kajian Restrukturisasi BUMD;</p> <p>6. Fasilitasi PKS antara BUMD Provinsi Jawa</p>	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan
--	--	--	--	--------------------	--	--



					<p>Barat dengan Kejati Jawa Barat;</p> <p>7. Fasilitasi Penyertaan Modal kepada BUMD;</p> <p>8. Optimalisasi Pengelolaan Aset BUMD;</p> <p>9. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum di BUMD;</p> <p>10. Transformasi BPR Merger menuju BUMD Kelas Istimewa (Meningkatnya Kualitas GCG dengan Memenuhi Standar Profesional);</p> <p>11. Penguatan Modal dan Ekspansi Layanan Keuangan BPR Hasil Merger.</p>	
3	P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Program Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (Lansia dan Penyandang Disabilitas)		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang efektif dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan (Lansia dan Penyandang Disabilitas) berkolaborasi dengan perangkat daerah teknis.	Biro Kesejahteraan Rakyat



1FCFCF7D7F

	<p>P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i></p>	<p>Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan <i>Good Governance</i>, serta Kerjasama Daerah dan Internasional</p>	<p>Langkah Kesembilan: Kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak</p>	<p>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaharui dan meningkatkan Kerjasama di 3 (tiga) negara; 2. Penguatan soft diplomacy Jawa Barat dengan Peringatan Konferensi Asia Africa ke-71; 3. Memfasilitasi penyusunan naskah kerja sama meliputi peninjauan, negosiasi, drafting dan penandatanganan naskah kerja sama; 4. Monitoring dan evaluasi implementasi, konsistensi dan keberlanjutan kerjasama di Jawa Barat; 5. Melakukan Penilaian terhadap Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Rangka Penguatan Peran Kecamatan untuk Mendukung Pelaksanaan Program Strategis Pemerintahan 	<p>Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</p>
--	--	---	--	--	---	---



					<p>Daerah Provinsi Jawa Barat;</p> <p>6. Fasilitasi Pemanfaatan Fungsi NGO di Jawa Barat;</p> <p>7. Tindaklanjut penataan daerah - penguatan kapasitas daerah untuk calon daerah persiapan otonomi baru.</p> <p>8. Fasilitasi Penataan daerah (kabupaten, kota,kecamatan,desa, dan kelurahan)</p> <p>9. Fasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah di Jawa Barat</p> <p>10. Fasilitasi kebijakan pertanahan di Jawa Barat</p>	
				Program Kesejahteraan Rakyat	<p>1. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang efektif dalam Mendukung Pembangunan;</p> <p>2. Hibah Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>3. Fasilitasi Pengusulan Calon Pahlawan Nasional.</p>	Biro Kesejahteraan Rakyat



1FCFCF7D7F

				<p>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembuatan produk hukum daerah provinsi; 2. Fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kab/Kota; 3. Penanganan Perkara secara litigasi; 4. Penanganan Perkara secara Non Litigasi; 5. Pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat melalui posko Bale Pananggeuhan; 6. Pengelolaan JDIH melalui penataan serta pengembangan website JDIH melalui <i>Artificial Intelligent</i>; 7. Pelatihan penyuluhan hukum (tematik) kepada Paralegal Desa sebanyak 1.200 orang. 	<p>Biro Hukum dan HAM</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------



				<p>Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbanyak etalase katalog, penyedia katalog, dan memperbanyak transaksi di katalog; 2. Pembinaan Implementasi PBJ desa di Jawa Barat (Bale Desa West Java Digital Marketplace); 3. Pembuatan dashboard ITKP dan P3DN; 4. Pemberian preferensi harga terhadap penggunaan produk dalam negeri; 5. Pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri (PDN); 6. Pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan pengadaan secara elektronik; 7. Pembuatan dashboard monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa lingkup perangkat daerah dan 	<p>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</p>
--	--	--	--	--	---	---------------------------------------



1FCFCF7D7F

					<p>kabupaten/kota di Jawa Barat.</p> <p>8. Renovasi Gedung LPSE</p> <p>9. Lisensi Software keamanan informasi</p>	
				<p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p>	<p>Fasilitasi kajian, telahaan, pembahasan, formulasi dan monitoring evaluasi usulan kebijakan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah dari perangkat daerah dalam rangka mendukung pembangunan.</p> <p>1. Koordinasi sertifikasi produk halal</p> <p>2. Koordinasi Alih fungsi lahan</p>	<p>Biro Perekonomian</p>

				<p>Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</p>	<p>3. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah yang Efektif dalam mendukung pembangunan;</p> <p>4. Fasilitasi pembentukan Holding BUMD</p> <p>5. Mendorong kinerja perangkat daerah</p>	<p>Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan</p>
--	--	--	--	---	---	---



					<p>mencapai target dengan cara memberikan rekomendasi akselerasi kinerja;</p> <p>6. Inisiasi Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Daerah untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur Daerah;</p> <p>7. Penilaian Kinerja BLUD RSUD Jabar;</p> <p>8. Fasilitasi Usulan Penerapan BLUD pada UPTD di Lingkungan Provinsi Jabar;</p> <p>9. Perumusan Kebijakan Pembentukan BLUD Tahura; Balai Benih Padi; urusan pendidikan;</p> <p>10. Perumusan Peraturan Gubernur tentang pembinaan dan pengawasan BLUD</p> <p>11. Perumusan Peraturan Gubernur tentang pedoman pengadaan</p>	
--	--	--	--	--	--	--



1FCFCF7D7F

					barang/jasa BLUD Provinsi Jawa Barat	
					12. Perumusan peraturan gubernur tentang Tata Cara Kerjasama BLUD Provinsi Jawa Barat.	

				Program Penataan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Proses Bisnis yang selaras dengan SPBE Provinsi dan PD d Lingkungan Pemerintah; 2. Optimalisasi kelembagaan dan sumber daya aparatur; 3. Optimalisasi Tata Kelola Layanan Publik; 4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam satu sistem yang terintegrasi antara Pemprov Jabar dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat; 	Biro Organisasi
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Administrasi Pimpinan
					<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan Pengamanan Gedung 	Biro Umum



					<p>Sate sebagai Aset Cagar Budaya Heritage dan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;</p> <p>2. Optimalisasi Layanan sarana dan prasarana Bale Pananggeuhan;</p> <p>3. Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Gedung Negara Pakuan; Bale Sri Baduga; Bale Pakuan Padjadjaran; Bale Dewa Niskala; dan Bale Jaya Dewata.</p> <p>4. Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas Layanan Publik Sekretariat Daerah;</p> <p>5. Peningkatan Kompetensi Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;</p> <p>6. Optimalisasi Unit Kearsipan dan <i>Record Center</i> Setda dalam Pengamanan & Penyelamatan Arsip Vital;</p> <p>7. Optimalisasi Layanan Museum Gedung Sate;</p>	
--	--	--	--	--	--	--



1FCFCF7D7F

					8. Penataan Kantor Pemerintahan.	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perwujudan tujuan dan sasaran strategis pembangunan akan dicapai melalui pelaksanaan kinerja operasional yang dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Ketercapaian kinerja operasional ini secara bertingkat akan mendukung ketercapaian *output*, *immediate outcome*, *intermediate outcome*, dan *ultimate outcome* yang akan berkontribusi terhadap ketercapaian *outcome* pembangunan sebagaimana diukur dalam target sasaran pembangunan. Pada akhirnya berkontribusi dalam memberikan *impact* kepada masyarakat. Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 serta dokumen RKPD Tahun 2026. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup urusan penunjang pemerintahan daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja *outcome* atau *impact* yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran



capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan RKPD.

Penerapan penjabaran kinerja dalam struktur pada Setda diterjemahkan ke dalam lima jenjang yang ditempatkan pada level sekretaris daerah (*ultimate outcome*), asisten, kepala biro (*intermediate outcome/program*), bagian/jabatan fungsional madya (*immediate outcome/kegiatan*), dan jabatan fungsional muda/ketua tim (*output/sub kegiatan*). Penjabaran sesuai struktur ini kemudian diintegrasikan dalam tingkatan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Merujuk aturan tersebut, Setda memiliki delapan program yang terdiri dari tujuh program utama dan satu program pendukung, 29 kegiatan dan 93 sub kegiatan.

Kesuksesan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan direncanakan melalui pemanfaatan sumber daya. Penetapan alokasi sumber daya baik manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran didasarkan kepada indikasi aktivitas yang dibutuhkan untuk dilaksanakan dalam menjamin ketercapaian target tujuan dan sasaran. Pengalokasian sumber daya manusia diperlihatkan dalam penjenjangan kinerja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang didukung oleh indikasi anggaran pada setiap level. Dari hasil evaluasi pemanfaatan anggaran dan indikasi rencana aksi yang diperlukan untuk satu tahun ke depan Setda mengindikasikan kebutuhan anggaran secara total sebesar Rp. 569.975.460,00. Selanjutnya untuk memastikan akuntabilitas kinerja, ketercapaian target dalam dokumen ini dipantau dalam aplikasi Japati.

Penjabaran operasional untuk ketercapaian SR1: 'Meningkatnya Proporsi Penduduk Jawa Barat yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi' adalah meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketercapaian target kinerja diperoleh melalui pelaksanaan Program Kesejahteraan Rakyat dengan indikator 'persentase partisipasi penduduk usia 15 tahun ke atas yang melanjutkan ke pendidikan tinggi'. Penciptaan kondisi ini akan dicapai melalui penyediaan dan implementasi



kebijakan program afirmasi pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat jenius dan kurang mampu. Upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah pemastian bahwa kebijakan program afirmasi pendidikan tinggi dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat dengan didukung oleh data valid.

Penjabaran operasional untuk SR2: 'Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat' pada level program adalah memastikan bahwa kebijakan pengendalian inflasi responsive terhadap isu peningkatan harga barang di masyarakat. Dengan demikian kebijakan dapat secara efektif mengendalikan inflasi. Ketercapaian target kinerja diperoleh melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator 'persentase kebijakan pengendalian inflasi yang diimplementasi'. Pihak yang melakukan implementasi kebijakan dalam hal ini adalah perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah pemastian bahwa kebijakan pengendalian inflasi dirumuskan secara tepat dengan didukung oleh data dan analisa yang mendalam.

Selanjutnya penjabaran operasional untuk SR3: 'Meningkatnya Kinerja BUMD' pada level program adalah meningkatkan kualitas tata kelola keuangan BUMD. Fokus pada tata kelola keuangan BUMD beranjak dari kinerja keuangan sebagai salah satu aspek yang mendukung Tingkat kesehatan BUMD. Selain itu penjabaran operasional yang berfokus kepada tata kelola keuangan BUMD sejalan dengan amanat RPJMN atas pengukuran *Return on Asset (RoA)* BUMD sehingga selaras dengan dengan pengukuran RoA BUMN pada PN7. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja operasional ini diukur dengan RoA BUMD dan dicapai melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan. Adapun upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah pemastian bahwa aset BUMD dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi yang akan menghasilkan rekomendasi yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BUMD melalui penetapan kebijakan daerah.



Selanjutnya penjabaran operasional untuk ketercapaian SR4: ‘Regulasi yang Adaptif’ adalah pemastian regulasi daerah Jawa Barat adaptif. Perwujudan kondisi tersebut untuk memastikan bahwa regulasi Jawa Barat dapat adaptif terhadap perubahan sehingga efektif sebagai solusi bagi permasalahan masyarakat. Ketercapaian target kinerja diperoleh melalui pelaksanaan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan indikator ‘Indeks Reformasi Hukum’. Adapun upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan adalah peningkatan kualitas harmonisasi kebijakan serta deregulasi daerah. Harmonisasi kebijakan mengarah kepada kesesuaian kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan pusat maupun kebijakan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan. Hal ini untuk mencegah adanya tumpang tindih kebijakan maupun kebijakan yang saling bertentangan. Sementara itu, deregulasi kebijakan mengarah kepada pembaharuan terhadap regulasi yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Disamping harmonisasi dan deregulasi kebijakan, terdapat pula indikator ‘Indeks Kepatuhan Daerah’ yang menjadi salah satu indikator pada level immediate outcome. Pengukuran indikator ini merujuk kepada amanat RPJPD Tahun 2025-2045 yang menjadikan indikator ini sebagai indikator proxy dari ‘Indeks Pembangunan Hukum’. Secara umum, indikator ini digunakan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan berkualitas baik, tepat sasaran, dapat diimplementasikan secara efektif, dan dengan demikian memiliki dampak terhadap masyarakat.

Penjabaran operasional untuk SR5: ‘Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan’ adalah peningkatan kualitas kebijakan khususnya yang disusun oleh Setda. Fokus kinerja diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan perumusan kebijakan untuk memastikan kebijakan disusun berbasis data, bukti, dan melibatkan stakeholder terkait.



Fokus ke dua adalah pada kualitas evaluasi implementasi kebijakan untuk memastikan kebijakan diimplementasi secara tepat dan memiliki dampak sesuai yang diharapkan. Fokus ke dua ini merupakan pelaksanaan fungsi Setda dalam melakukan pengendalian implementasi kebijakan.

Ketercapaian target kinerja dilaksanakan melalui tiga program yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator 'Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah' serta 'Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah'. Kedua adalah Program Kesejahteraan Rakyat dengan indikator 'Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat' serta 'Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat'. Ketiga adalah Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator 'Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah', 'Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah', 'Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah' serta 'Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan BUMD, BLUD, dan Investasi Daerah'. Adapun upaya yang dilaksanakan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah pemastian bahwa kebijakan berbasis data, bukti, dan pelibatan stakeholder melalui salah satunya penyusunan naskah akademik serta laporan evaluasi dampak kebijakan.

Ketercapaian SR5 pada pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator 'Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah' terdapat amanat RPJMN yang dilaksanakan. PN2 pada SU5 yaitu 'Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan' dengan indikator 'Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global' menginginkan semua daerah untuk turut mendukung program peningkatan UMKM bersertifikasi halal. Untuk itu, sebagai bagian dari pengendalian regulasi ekonomi syariah Provinsi Jawa Barat dilakukan pengendalian terhadap pemastian jumlah produk bersertifikasi halal di Provinsi Jawa Barat. Untuk ketercapaian output ini, dilakukan koordinasi



intensif dengan tiga unit kerja yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan disamping kolaborasi bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1. Target ‘Jumlah Produk Tersertifikasi Halal’

Tahun	2026	2027	2028	2029
Target (produk)	880	949	969	968

Sumber: Biro Perekonomian, Agustus 2025

Kemudian, penjabaran operasional untuk ketercapaian SR6: ‘Kinerja Perangkat Daerah mencapai Target’ adalah pemastian bahwa kinerja perangkat daerah berjalan sesuai perencanaan. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan indikator ‘persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi akselerasi kinerja’. Adapun Upaya yang dilaksanakan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah pengendalian terhadap kinerja perangkat daerah untuk memastikan implementasi sesuai dengan rencana yang ditunjukkan melalui deviasi kinerja yang diperoleh setiap bulan. Pengendalian terhadap progres kinerja akan dilengkapi dengan rekomendasi terhadap akselerasi yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah dan diharapkan dalam mendorong pencapaian sasaran.

Kemudian penjabaran operasional untuk ketercapaian SR7: ‘Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa’ adalah meningkatkan kapabilitas tata kelola UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa). Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator ‘Tingkat Kematangan UKPBJ’. Adapun upaya yang akan dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan antara lain adalah dengan meningkatkan



1FCFCF7D7F

efektivitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa terutama dalam pemanfaatan SPSE, meningkatkan kapasitas SDM pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Penjabaran operasional untuk SR8: 'Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat' adalah pemastian bahwa penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah memenuhi ekspektasi masyarakat. Target kinerja dicapai melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan indikator 'persentase perangkat daerah provinsi dengan nilai IKM minimal Sangat Baik'. Upaya yang dilaksanakan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah memastikan bahwa perangkat daerah memenuhi standar pelayanan dan di dalamnya terdapat pemanfaatan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat yang terintegrasi sebagai salah satu akses partisipasi publik dalam peningkatan kualitas layanan. Selain itu juga memastikan bahwa perangkat daerah Provinsi Jawa Barat menerapkan hasil pembinaan pelayanan publik secara tepat yang akan berdampak kepada kepuasan pengguna layanan mereka.

Kemudian penjabaran operasional untuk SR9: 'Kelembagaan Agile' adalah pemastian bahwa kelembagaan Provinsi Jawa Barat tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Perwujudan kondisi ini untuk mendukung peningkatan efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan indikator 'Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur' dan 'Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Proses'. Adapun upaya yang dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah penataan struktur organisasi, penataan proses bisnis, serta penyediaan jabatan yang dapat mendorong pembentukan organisasi berbasis kinerja.



Penjabaran operasional pada SR10: 'Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah' adalah meningkatkan kualitas tata kelola reformasi birokrasi. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan indikator 'persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi'. Adapun upaya yang dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah memastikan perangkat daerah menerapkan kebijakan rekomendasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi. Disamping itu, fokus juga akan diarahkan kepada memastikan kebijakan budaya kerja diimplementasi secara efektif oleh perangkat daerah.

Pada SR11: 'Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan' dijabarkan secara operasional dengan memastikan pelaporan kinerja berkualitas dan bermanfaat. Selain itu, memastikan agar perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja terintegrasi. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi dengan indikator 'Nilai Pemenuhan, Kualitas, dan Kebermanfaatan Pelaporan Kinerja' serta 'Persentase Tindak Lanjut LHE SAKIP dari KemenPANRB'. Adapun upaya yang dilakukan pada level kegiatan dan sub kegiatan adalah memastikan bahwa pelaporan kinerja baik milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun perangkat daerah memenuhi standar tujuh informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya SR12: 'Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi' dijabarkan kepada tujuh kinerja level operasional yaitu (1) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, (2) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, (3) meningkatkan kualitas dukungan teknis dan administratif dalam persiapan penataan daerah dan penataan desa, (4) meningkatkan efektivitas pelaksanaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), (5) meningkatkan efektivitas kerja sama daerah, (6) meningkatkan efektivitas kerja



sama internasional, serta (7) meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan. Ketercapaian target dilakukan melalui pelaksanaan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator (1) persentase capaian indikator kinerja kunci (IKK) urusan pemerintahan daerah provinsi yang meningkat, (2) persentase kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengalami peningkatan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) persentase dokumen persiapan penataan daerah dan penataan desa yang dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti, (4) persentase rekomendasi kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP yang terimplementasi, (5) persentase kerja sama daerah yang efektif, (6) persentase kerja sama internasional yang efektif, serta (7) persentase layanan administrasi pemerintahan daerah yang sesuai standar.

Kinerja operasional ‘meningkatkan efektivitas kerja sama internasional’ dengan indikator ‘persentase kerja sama internasional yang efektif’ selain merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas dan fungsi juga sebagai aplikasi dari amanat RPJMN. PN2 pada SU1: ‘Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan’ dengan indikator ‘*Asia Power Index (Diplomatic Influence)*’ menginginkan adanya peran pemerintah daerah dalam perwujudannya. Maka, kinerja ini juga menjadi salah satu amanat IUP.

Untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas kinerja dalam pencapaian sasaran Renstra, ditetapkan pula kinerja pendukung. Sebagai pelaksanaan salah satu fungsi pelayanan internal ditetapkan sasaran ‘Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan’ dengan indikator ‘Persentase Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi’. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Pada level kegiatan dan sub kegiatan upaya yang dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan rumah tangga pimpinan, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi pimpinan, serta meningkatkan kualitas layanan keprotokolan.



Fungsi pelayanan internal Setda yang ke dua dijabarkan dalam sasaran 'Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah'. Sasaran ini berfokus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas pada lingkup Setda dengan indikator 'Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah'. Ketercapaian target kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi dan realisasi ketercapaian diperoleh melalui evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan demikian, Setda juga merupakan unit kerja yang harus melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi dan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi yang diberikan.

Unit kerja yang menjadi koordinator utama dalam pencapaian sasaran reformasi birokrasi internal Setda adalah Biro Umum dan didukung oleh kinerja internal delapan biro lain. Dengan itu, masing-masing biro memiliki sasaran kinerja internal yang tidak hanya mendorong peningkatan tata kelola lingkup biro itu sendiri namun juga berkontribusi terhadap perwujudan tata kelola Setda yang berkualitas. 'Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro' dengan indikator 'persentase capaian kinerja intervensi reformasi birokrasi Setda lingkup biro' merupakan sasaran yang ditetapkan dan diamanatkan untuk dicapai oleh seluruh biro. Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan tata kelola biro akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan tata kelola Setda sehingga kolaborasi, komunikasi, dan integrasi harus terus ditingkatkan.

Selanjutnya untuk rencana alokasi anggaran, rata-rata anggaran yang akan dibutuhkan pada tahun 2026 adalah Rp 569.975.460.000,00. Adapun komposisi antara anggaran teknis dan penunjang adalah 21% dan 79%. Jika dilihat dari total keseluruhan pagu, anggaran teknis sebesar Rp 120.682.311.000,00 sementara anggaran penunjang termasuk fasilitasi pimpinan adalah sebesar Rp 449.293.148.000,00.



Tabel 4.2.
Pagu Anggaran Sekretariat Daerah per Sasaran tahun 2026

Total Pagu	2025	2026
		757,529,597
Teknis	223,776,422	120,682,311
SR1	8,180,000	50,000,000
SR2	785,543	1,004,180
SR3	352,100	480,260
SR4	2,122,061	2,037,061
SR5	201,471,164	55,737,325
SR6	137,035	500,000
SR7	3,100,486	2,700,000
SR8	193,118	121,000
SR9	316,659	1,105,000
SR10	185,799	242,000
SR11	123,168	121,000
SR12	6,809,289	6,634,485
Penunjang	533,753,176	449,293,148

Pada anggaran teknis, alokasi terbesar akan diarahkan kepada ketercapaian target SR5 dengan indikator ‘Nilai Kualitas Kebijakan Daerah’ sebesar Rp55.737.325.000,00 atau sebanyak 46,2%. Hal ini, disamping bahwa sasaran ini didukung oleh empat biro namun juga bahwa sasaran tersebut merupakan gambaran *core* tugas dan fungsi Setda dalam merumuskan dan mengendalikan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Alokasi terbesar kedua diarahkan pada ketercapaian SR1 dengan indikator ‘Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi’. Dari total anggaran teknis, biaya dialokasikan sebesar Rp 50.000.000.000,00 atau 41,4%.

Sementara itu, alokasi anggaran SR2 yang merupakan pendukung terhadap IUP ‘Tingkat Inflasi’ dialokasikan sebesar Rp 1.004.180.000,00 atau



0,83% dari total anggaran teknis. Anggaran pendukung IUP lainnya yaitu SR3 dengan indikator 'Persentase BUMD Sehat' yang ketercapaiannya didukung oleh RoA BUMD adalah sebesar Rp 480.260.000,00 atau 0,04% dari pagu total anggaran teknis. Sementara itu alokasi anggaran untuk IUP lainnya yaitu 'Indeks Pelayanan Publik' yang menjadi indikator ketercapaian SR8 adalah sebesar Rp 121.000.000,00 atau 0,15% dari total pagu anggaran teknis.

Jika dilihat dari pagu masing-masing biro, Biro Umum memiliki rencana alokasi terbesar untuk tahun 2026 yaitu sebesar Rp 378.038.628.000,00 atau 66,3% dari total keseluruhan anggaran. Besarnya alokasi tersebut disebabkan oleh komposisi belanja yang tercakup di dalamnya, terutama belanja pegawai serta belanja pemeliharaan gedung dan sarana prasarana, baik untuk kebutuhan perkantoran maupun untuk mendukung pelayanan publik. Selain mencakup pemeliharaan gedung perkantoran seperti Gedung Sate dan kantor gubernur yang berlokasi di 5 (lima) wilayah, alokasi anggaran Biro Umum juga digunakan untuk pemeliharaan sejumlah area layanan publik yang memerlukan dukungan berkelanjutan antara lain Masjid Al-Jabbar, Area Gasibu, Area Saparua, dan Area Monumen Perjuangan Jawa Barat. Rencana alokasi terbesar kedua ada pada Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu sebesar Rp112.166.688.000,00 atau 19,7% dari total pagu anggaran tahun 2026. Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan unit yang menjadi koordinator utama dalam pencapaian SR1 yang merupakan IUP.

Tabel 4.3. Rencana Alokasi Anggaran per Biro Tahun 2026 (dalam Rp000)

Biro	2025	2026
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	8,169,608	8,795,459
Biro Hukum dan HAM	3,529,335	3,434,085
Biro Kesejahteraan Rakyat	217,009,694	112,166,688
Biro Perekonomian	4,726,411	5,483,078
Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	6,079,188	6,843,305
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4,733,656	4,802,872
Biro Organisasi	1,388,570	2,468,081
Biro Administrasi Pimpinan	52,458,754	47,943,262



Biro Umum	459,434,381	378,038,628
Total Pagu Indikatif	757,529,597	569,975,460

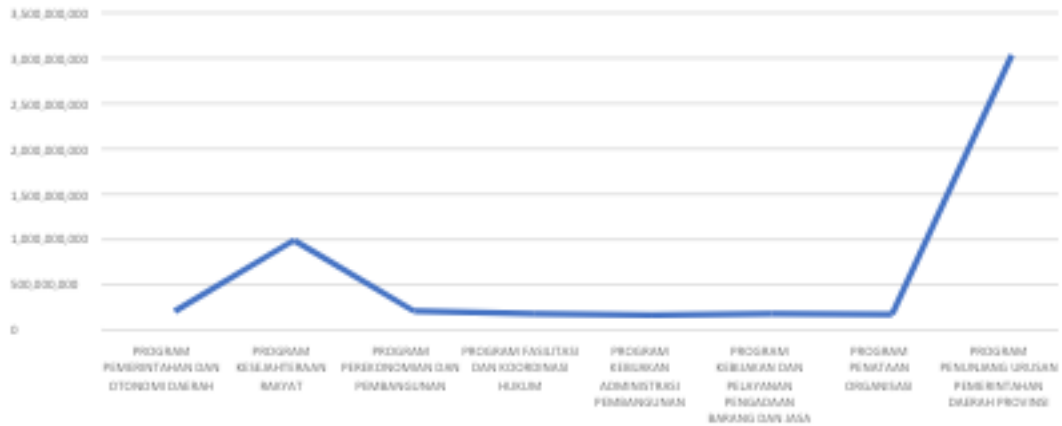
Apabila dilihat dari anggaran program, di antara tujuh program teknis, Program Kesejahteraan Rakyat merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar yaitu Rp 99.456.250.000,00 atau 17,45% dari total anggaran 2026. Angka ini memiliki gap yang cukup signifikan jika dibanding program-program lain, Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan dana hibah yang menjadi salah satu mekanisme pembiayaan dalam pencapaian sasaran kinerja yang diampu oleh Biro Kesejahteraan Rakyat.

Terbesar kedua adalah Program Perekonomian dan Pembangunan yang digunakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar Rp 8.795.459.464,00 atau 1,54% dari total anggaran tahun 2026. Kemudian sebesar 1,3% atau Rp 7.400.000.000,00 merupakan rencana alokasi anggaran Biro Perekonomian serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan.

Selanjutnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program dengan rencana alokasi anggaran terbesar yaitu Rp449.293.148.000,00 atau 78,8% dari total pagu tahun 2026. Program ini merupakan program yang digunakan oleh seluruh biro dalam membiayai pemenuhan kebutuhan internal biro dan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola di masing-masing biro. Di dalamnya pula terdapat anggaran yang diperuntukkan bagi fasilitasi pimpinan sebesar Rp47.943.262.000,00 atau 10,67% dari seluruh pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini pun merupakan satu-satunya program yang digunakan oleh Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum. Sementara biro lain paling tidak memiliki dua program disamping program ini.



Gambar 4.1 Rencana Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah per Program



Tabel 4. 4

Rencana Kerja Dan Pendanaan Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

1	Bidang Urusan/ Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran /Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	2026		2027	
					Target	Pagu	Target	Pagu
					9	10	11	12
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						8.795.459.464		9.081.368.653
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif		Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif	Persentase Capaian RB General	Persen	86,47	8.795.459.464	86,50	9.081.368.653
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	77,43	365.515.296	78,20	419.633.496
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	41,67	227.254.698	42,50	254.313.798
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Perencanaan Kebijakan Pemerintahan Berkualitas	Persentase Kebijakan Pemerintahan yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	100	227.254.698	100	254.313.798
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	3	227.254.698	3	254.313.798
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	35,72	138.260.598	36,20	165.319.698
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Berkualitas	Persentase Kebijakan Pemerintahan yang Diimplementasi secara Tepat	Persen	100	138.260.598	100	165.319.698



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	1	138.260.598	1	165.319.698
					Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori	Tinggi	8.429.944.168	Tinggi	8.661.735.157
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Meningkat	Persen	46,49	706.715.696	50,88	733.774.796
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah				Meningkatnya Penerapan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	590.500.696	100	599.559.796
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	2	590.500.696	2	599.559.796
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah				Tertatanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Penataan Urusan Pemerintahan Provinsi yang Ditindaklanjuti	Persen	100	51.000.000	100	60.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				Terselenggaranya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	1	51.000.000	1	60.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah				Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Memenuhi Standar	Kategori Pencapaian SPM Provinsi Jawa Barat	Kategori	Tuntas Paripurna	65.215.000	Tuntas Paripurna	74.215.000
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	1	65.215.000	1	74.215.000
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang Mengalami Peningkatan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	62,96	874.137.400	66,67	901.196.500



	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah				Meningkatnya Penerapan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persen	51,85	260.827.850	55,56	267.886.950
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	1	260.827.850	1	267.886.950
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah				Meningkatnya Dukungan Pemerintah Provinsi dalam Penataan Urusan Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Yang Dipertimbangkan Untuk Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	100	113.559.550	100	118.559.550
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				Terselenggaranya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	1	113.559.550	1	118.559.550
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah				Meningkatnya Penerapan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Persen	100	447.750.000	100	457.750.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				Terselenggaranya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	1	372.000.000	1	377.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	1	75.750.000	1	80.750.000
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah				Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Memenuhi Standar	Persentase Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Pencapaian SPM Minimal Kategori "Tuntas Utama"	Persen	100	52.000.000	100	57.000.000
	Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	1	52.000.000	1	57.000.000



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah			Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dan Administratif dalam Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah dan Penataan Desa yang Dipertimbangkan Untuk Ditindaklanjuti	Persen	100	1.024.495.637	100	1.051.554.737
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			Meningkatnya Kualitas Dokumen Persiapan Penataan Daerah	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Daerah yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100	549.942.518	100	559.001.618
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah			Terselenggaranya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	1	549.942.518	1	559.001.618
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kapasitas Daerah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru	Persentase Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru yang Meningkatkan Nilai Kapasitas Daerahnya	Persen	33,33	55.000.000	44,44	64.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah			Terselenggaranya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	1	55.000.000	1	64.000.000
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			Meningkatnya Kualitas Dokumen Persiapan Penataan Desa	Persentase Dokumen Persiapan Penataan Desa yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100	419.553.119	100	428.553.119
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah			Terselenggaranya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	1	419.553.119	1	428.553.119
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah			Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP yang Terimplementasi	Persen	100	11.690.000	100	49.749.100
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			Meningkatnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP di Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP	Persen	100	11.690.000	100	49.749.100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	1	11.690.000	1	49.749.100
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang Efektif	Persen	50	883.727.068	55	910.786.168
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kerja Sama Dalam Negeri yang Terimplementasi	Persen	35	493.554.905	40	507.614.005



	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				Terselenggaranya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	6	493.554.905	6	507.614.005
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah				Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Pihak Ketiga	Persentase Kerja Sama Pihak Ketiga yang Terimplementasi	Persen	35	390.172.163	40	403.172.163
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta				Terselenggaranya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha / Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	28	390.172.163	29	403.172.163
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah				Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Internasional	Persentase Kerja Sama Internasional yang Efektif	Persen	50	2.514.321.506	55	2.528.293.062
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah				Meningkatnya Implementasi Kerja Sama Internasional	Persentase Kerja Sama Internasional yang Terimplementasi*)	Persen	35	2.514.321.506	40	2.528.293.062
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				Terselenggaranya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	63	2.514.321.506	64	2.528.293.062
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah				Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Sesuai Standar	Persen	100	619.397.397	100	655.012.141
	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah				Pelayanan Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai Standar	Persentase pelayanan administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terlayani sesuai standar	Persen	100	417.580.315	100	426.945.059
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	1	417.580.315	1	426.945.059
	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				Meningkatnya Kualitas Penataan Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Persentase Usulan Penataan Batas Wilayah Administrasi yang ditangani sesuai Ketentuan	Persen	100	72.657.082	100	81.407.082
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	1	72.657.082	1	81.407.082



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			Usulan Penamaan Rupabumi memenuhi Persyaratan	Persentase Usulan Penamaan Rupabumi yang Memenuhi Persyaratan	Persen	100	73.000.000	100	81.750.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	1	73.000.000	1	81.750.000
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			Pelayanan penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase permohonan penerbitan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Anggota DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlayani sesuai standar	Persen	100	56.160.000	100	64.910.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah			Terselenggaranya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	1	56.160.000	1	64.910.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	100	1.795.459.464	100	1.831.368.653
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	150.000.000	100	165.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	150.000.000	1	165.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dipenuhi	Persen	100	200.000.000	100	220.000.000



	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	150.000.000	4	165.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	55.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Realisasi Belanja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	89,12	1.345.459.464	89,82	1.336.368.653
					Layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Berkualitas	IKM Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	90,78		91,28	
					Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	51		52	
					Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	49		51	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.345.459.464	12	1.336.368.653
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Poin	95,42	50.000.000	95,66	55.000.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Implementasi SPBE Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	68	50.000.000	75	55.000.000



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	50.000.000	6	55.000.000
BIRO HUKUM DAN HAM											
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif		Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif			Persentase Capaian RB General	Persen	86,47	3.434.085.465	86,5	3.665.731.976	
		Regulasi Daerah Adaptif			Indeks Reformasi Hukum*)	Poin	90,23	3.434.085.465	90,75	3.665.731.976	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			Meningkatnya Kualitas Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Deregulasi Kebijakan	Poin	20,61	466.545.466	20,81	513.200.013	
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan			Peraturan Daerah Sesuai Standar	Indeks Kepatuhan Daerah*)	Poin	84,00	466.545.466	84,5	513.200.013	
				Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sesuai standar	Persentase Produk hukum Daerah yang sesuai standar	Persen	100		100		
	Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			Terfasilitasinya Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	30	466.545.466	30	513.200.013	
				Meningkatnya Harmonisasi Regulasi Daerah	Nilai Harmonisasi Regulasi	Poin	24,34	1.570.515.938	24,46	1.727.567.421	
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan			Meningkatnya Kualitas Layanan Kajian Hukum	Persentase Permohonan Kajian Hukum yang terlayani sesuai Standar	Persen	83,50	7.200.000	100	7.900.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan			Terfasilitasinya Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	800	7.200.000	800	7.900.000	



	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan			Meningkatnya penyebaran layanan produk hukum dan informasi hukum kepada masyarakat	Persentase produk hukum dan informasi hukum yang disebarluaskan kepada masyarakat	Persen	100	193.237.200	100	203.237.200
				Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi hukum	Persentase anggota JDIIH yang pengelolaan informasi hukumnya berkategori baik	Persen	100		100	
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	120	193.237.200	120	203.237.200
	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan			Meningkatnya kesesuaian produk hukum Kab/Kota dengan ketentuan PERUU	Persentase produk hukum daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Persen	100	193.237.200	100	203.237.200
	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	500	193.237.200	500	203.237.200
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum			Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara	Persentase Perkara yang Tertangani Sesuai Ketentuan	Persen	100	472.191.245	100	507.142.729
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			Terlaksananya Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	15	472.191.245	15	507142728,98
	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum			Meningkatnya Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat	Persentase Desa/Kelurahan sadar hukum di Jawa Barat yang di bina	Persen	72	704.650.292	80	806.050.292
				Penghormatan. Perlindungan. Pemajuan. Penegakan dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Terimplementasi secara Tepat oleh Perangkat Daerah	Persentase Rencana Aksi Penghormatan. Perlindungan. Pemajuan. Penegakan dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Terimplementasi oleh Perangkat Daerah	Persen	100		100	
				Meningkatnya Kualitas Penanganan pengaduan dan Perlindungan Hukum	Persentase pengaduan dan perlindungan hukum yang ditangani sesuai ketentuan	Persen	100		100	
				Meningkatnya layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Persentase permohonan bantuan hukum masyarakat miskin yang terlayani sesuai ketentuan	Persen	100		100	



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Balon Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				Terlaksananya Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	25	704.650.292	25	806050292,02
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Hukum dan HAM	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda Lingkup Biro Hukum dan HAM	Persen	100	1.397.024.061	100	1.424.964.542
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	564.395.382	100	576.335.863
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	564.395.382	1	576.335.863
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	75,17	6.000.000	77,63	6.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	6.000.000	10	6.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	100	359.905.799	100	375.905.799
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	329.905.799	12	345.905.799
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	30.000.000	5	30.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	99,56	465.422.880	99,57	465.422.880



				Layanan Biro Berkualitas	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro	Poin	96,1		96,3	
				Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	83,13		84,93	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	93,75		93,98	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	465.422.880	12	465.422.880
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Hukum dan HAM	Persen	68,22	1.300.000	75,06	1.300.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	1.300.000	6	1.300.000
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT								112.166.687.733.00 #####		122.178.896.486.00 #####
Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berawawasan		Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berawawasan			Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun	Tahun	9,43	50.000.000.000	9,54	60.000.000.000
		Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi			Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*)	Persen	9,75	50.000.000.000	9,86	60.000.000.000
	Program Kesejahteraan Rakyat			Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi	Persentase Partisipasi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang melanjutkan ke pendidikan tinggi	Persen	9,75	50.000.000.000	9,86	60.000.000.000
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			Meningkatnya Bantuan Pendidikan Tinggi	Persentase Pemerlu Bantuan Yang Mendapat Bantuan	Persen	100	50.000.000.000	100	60.000.000.000



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Balasiber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				Terlaksananya Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	1	50.000.000.000	1	60.000.000.000
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif		Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif			Persentase Capaian RB General	Persen	86,47	62.166.687.733	86,5	62.178.896.486	
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan			Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	77,43	49.456.250.000	78,20	49.414.249.999	
	Program Kesejahteraan Rakyat		Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dalam Mendukung Pembangunan			Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Poin	35,95	47.464.033.853	36,22	47.222.812.238
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Berkualitas			Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	71,41	691.786.696	72,82	760.965.366
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan. Olahraga. Kebudayaan. dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan. Olahraga. Kebudayaan. dan Pariwisata	Dokumen	2	220.838.098	2	242.921.908



	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	4	250.000.000	4	275.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi. Informatika. Statistik. Persandian. dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi. Informatika. Statistik. Persandian. dan Perhubungan	Dokumen	2	220.948.598	2	243.043.458
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Berkualitas	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	71,41	25.352.247.157	72,82	22.899.846.872
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan				Terlaksananya Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	2	24.402.247.157	2	21.854.846.872



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Balasiber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Rakyat Bidang Pendidikan										
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				Terlaksananya Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi . Evaluasi . dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	4	500.000.000	4	550.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				Terlaksananya Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi . Evaluasi . dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	4	450.000.000	4	495.000.000
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				Kebijakan Keagamaan Berkualitas	Persentase Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	71,41	21.420.000.000	72,82	23.562.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	3	15.780.000.000	3	17.358.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	3	5.640.000.000	3	6.204.000.000
	Program Kesejahteraan Rakyat				Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Poin	43,57	1.992.216.147	43,68	2.191.437.761
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Terimplementasi secara Tepat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	71,41	440.000.000	72,82	484.000.000



	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan. Olahraga. Kebudayaan. dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan. Olahraga. Kebudayaan. dan Pariwisata	Dokumen	2	120.000.000	2	132.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	2	200.000.000	2	220.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi. Informatika. Statistik. Persandian. dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi. Informatika. Statistik. Persandian. dan Perhubungan	Dokumen	2	120.000.000	2	132.000.000
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Terimplementasi secara Tepat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	71,41	972.216.147	72,82	1.069.437.761



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Balap, Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				Terlaksananya Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	2	402.216.147	2	442.437.761
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				Terlaksananya Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	2	250.000.000	2	275.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				Terlaksananya Fasilitasi. Koordinasi. Sinkronisasi. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	2	320.000.000	2	352.000.000
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				Kebijakan Keagamaan Terimplementasi secara tepat	Persentase Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang Diimplementasi secara Tepat	Persen	71,41	580.000.000	72,82	638.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	3	220.000.000	3	242.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	3	360.000.000	3	396.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	12.710.437.733	100	12.764.646.487



	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	71.500.000	100	78.650.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	71.500.000	1	78.650.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	100	237.508.464	100	261.259.310
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	237.508.464	12	261.259.310
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	95,68	1.273.946.089	95,69	1.201.340.697
					Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	Poin	77,734		77,801	
					Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	48,97		53,97	
					Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	57,3		57,6	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.273.946.089	12	1.201.340.697
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	92,53	362.481.600	92,99	452.909.900
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	3	362.481.600	3	452.909.900



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Balas Cyber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	Persen	68	54.850.000	75	60.335.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	54.850.000	6	60.335.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah			Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Persen	100	10.710.151.580	100	10.710.151.580
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	12	10.710.151.580	12	10.710.151.580
BIRO PEREKONOMIAN								5.483.077.945		5.718.714.305
Terkendalnya Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalnya Stabilitas Ekonomi Makro		Tingkat Inflasi*)	Persen	1,5-3,5	1.004.180.000	1,5-3,5	1.058.460.000	
		Terkendalnya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat		Tingkat Inflasi*)	Persen	1,5-3,5	1.004.180.000	1,5-3,5	1.058.460.000	
	Program Perekonomian dan Pembangunan			Kebijakan Pengendalian Inflasi Responsif terhadap Isu Peningkatan Harga Barang di Masyarakat	Persentase Kebijakan Pengendalian Inflasi yang dirumuskan	Persen	100	490.483.527	100	513.696.473
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			Meningkatnya ketepatan perumusan rekomendasi pengendalian inflasi	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi yang Dirumuskan Berbasis Data dan Bukti	Persen	100	490.483.527	100	513.696.473
	Program Perekonomian dan Pembangunan			Hasil Evaluasi terhadap Implementasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi Mutakhir yang Ditindaklanjuti	Persen	100	513.696.473	100	544.763.527
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Pengendalian Inflasi yang Mutakhir	Persentase Rekomendasi Pengendalian Inflasi yang Mutakhir	Persen	100	513.696.473	100	544.763.527



	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	12	1.004.180.000	12	1.058.460.000
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif		Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif			Persentase Capaian Reformasi Birokrasi (RB General)	Persen	86,47	4.478.897.945	86,5	4.660.254.305	
		Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan			Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	77,43	2.695.080.000	78,20	2.840.760.000	
	Program Perekonomian dan Pembangunan		Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Pembangunan			Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	Poin	44,2	2.053.500.000	44,3	1.453.385.000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Perencanaan Kebijakan Sarana Perekonomian Berkualitas			Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	100	311.300.000	100	338.800.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan ekonomi Makro		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	3	36.300.000	3	36.300.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	2	275.000.000	2	302.500.000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Perencanaan Kebijakan Sumber Daya Alam Berkualitas			Persentase Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	100	471.093.216	100	1.114.585.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Terlaksananya Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan	Dokumen	3	395.913.716	3	1.032.910.000



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				Terlaksananya Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	33.000.000	1	36.300.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				Tersedianya dukungan data. informasi. dan analisis yang akurat untuk penyusunan kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	1	42.179.500	1	45.375.000
	Program Perekonomian dan Pembangunan				Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah	Poin	45	641.580.000	47	1.387.375.000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Sarana Perekonomian Berkualitas	Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian yang Diimplementasi secara Tepat	Persen	100	390.679.040	100	151.250.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan ekonomi Makro				Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	2	145.910.000	2	90.750.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	2	55.000.000	2	60.500.000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam Berkualitas	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Diimplementasi secara Tepat	Persen	100	374.329.901	100	1.236.125.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				Terlaksananya Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan	Dokumen	3	158.379.101	3	1.100.000.000



	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				Terlaksananya Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	131.591.800	2	90.750.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				Tersedianya dukungan data. informasi. dan analisis yang akurat untuk penyusunan kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	1	42.179.500	1	45.375.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Perekonomian	Persen	100	1.783.817.945	100	1.819.494.305
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	199.644.323	100	100.579.926
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	199.644.323	1	100.579.926
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	100	96.187.890	100	155.806.679
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	96.187.890	4	155.806.679
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	90,01	958.520.994	90,02	1.054.373.095
					Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro Perekonomian	Poin	95,25		95,3	
					Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	100		100	



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Biro	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	93,87		94,11	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	69		71	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	958.520.994	12	1.054.373.095
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Implementasi SPBE Biro Perekonomian	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Perekonomian	Persen	68	191.905.823	75	64.190.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	191.905.823	6	64.190.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpenuhinya layanan jasa penunjang biro perekonomian	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	Persen	100	337.558.915	100	444.544.605
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	337.558.915	12	444.544.605
BIRO BUMD. INVESTASI. DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								6.843.305.399		7.096.196.707
Terkendalnya Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalnya Stabilitas Ekonomi Makro		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1,475	480.260.000	1,500	506.220.000	
		Meningkatnya Kinerja BUMD		Persentase BUMD Sehat	Persen	81,08	480.260.000	83,78	506.220.000	
	Program Perekonomian dan Pembangunan		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan BUMD	RoA BUMD Jabar*)	Persen	1,72	480.260.000	1,83	506.220.000	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Aset BUMD dimanfaatkan secara optimal	Persentase BUMD yang Memiliki Aset Produktif	Persen	54,05	480.260.000	56,76	506.220.000	



	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	1	186.882.361	1	196.984.110
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi				Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Dokumen	1	293.377.639	1	309.235.890
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif		Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif			Persentase Capaian RB General	Persen	86,47	6.363.045.399	86,50	6.589.976.707	
			Meningkatnya Efektivitas Dukungan Kebijakan terhadap Pembangunan		Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	Poin	77,43	3.220.480.000	78,20	3.394.560.000	
	Program Perekonomian dan Pembangunan		Meningkatnya Efektivitas Kebijakan BUMD. BLUD. dan Investasi Daerah dalam Mendukung Pembangunan		Nilai Kualitas Perencanaan Kebijakan BUMD. BLUD. dan Invenstasi Daerah	Poin	41,29	1.288.340.000	42,22	1.357.980.000	
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Perencanaan Kebijakan BUMD dan BLUD Berkualitas		Persentase Kebijakan BUMD dan BLUD yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	100	713.275.037	100	751.830.444	
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	3	277.338.910	3	292.330.203



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi				Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Dokumen	3	301.810.188	3	318.124.252
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	1	134.125.939	1	141.375.990
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				Perencanaan Kebijakan Investasi Berkualitas	Persentase Kebijakan Investasi yang Berbasis Data dan Bukti	Persen	100	575.064.963	100	606.149.556
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	2	575.064.963	2	606.149.556
	Program Perekonomian dan Pembangunan				Meningkatnya Efektivitas Kebijakan BUMD. BLUD. dan Investasi Daerah dalam Mendukung Pembangunan	Nilai Kualitas Evaluasi Pemanfaatan Kebijakan BUMD. BLUD. dan Investasi Daerah	Poin	40,47	1.932.140.000	41,40	2.036.580.000
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				Implementasi dan Evaluasi Kebijakan BUMD dan BLUD Berkualitas	Persentase Kebijakan BUMD. Investasi dan BLUD yang Dimplementasi secara Tepat	Persen	91	1.069.707.709	92,50	1.127.529.747
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	4	415.928.716	4	438.411.349



	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi				Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	Dokumen	4	452.628.604	4	477.095.015
	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				Hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	3	201.150.389	3	212.023.383
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Investasi Berkualitas	Persentase Kebijakan Investasi yang Diimplementasi secara Tepat	Persen	91	862.432.291	92,50	909.050.253
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	3	862.432.291	3	909.050.253
					Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja => 0%	Persen	63,51	500.000.000	63,75	500.000.000
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan				Progres kinerja perangkat Daerah sesuai Perencanaan	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi akselerasi Kinerja	Persen	100	500.000.000	100	500.000.000
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				Meningkatnya Pengendalian Kinerja Program Pembangunan	Persentase Rekomendasi Akselerasi Kinerja Program Pembangunan yang Mutakhir	Persen	100	500.000.000	100	500.000.000
	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	4	500.000.000	4	500.000.000



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro BUMD. Investasi. dan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro BUMD. Investasi. dan Administrasi Pembangunan	Persen	100	2.642.565.399	100	2.695.416.707
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	4.600.000	100	4.600.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang telah dikumpulkan dan di periksa lingkup Biro BUMD. Investasi dan Adminitrasi Pembangunan	Data	10	4.600.000	10	4.600.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang dipenuhi	Persen	100	276.550.970	100	276.550.970
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	182.597.778	12	182.597.778
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	93.953.192	4	93.953.192
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro BUMD. Investasi dan Administrasi Pembangunan	Persen	91,11	1.667.801.358	91,41	1.719.942.541
				Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro	Poin	90,74		91,35	
				Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	100		100	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	65,34		67,63	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	92,53		92,99	



	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.667.801.358	12	1.719.942.541
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Implementasi SPBE Biro BUMD. Investasi. dan Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro BUMD. Investasi. dan Administrasi Pembangunan	Persen	68	3.250.000	75	3.960.125
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	3.250.000	6	3.960.125
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Persen	100	690.363.071	100	690.363.071
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik				Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Laporan	2	21.680.000	2	21.680.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	668.683.071	12	668.683.071
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									4.887.828.521		4.931.585.091
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif		Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif			Persentase Capaian RB General	Persen	86,47			86,5	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	90,31	4.802.872.473		90,32	4.844.929.922
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Meningkatnya Kapabilitas Tata Kelola UKPBJ			Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3	2.700.000.000		3	2.700.000.000



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Meningkatnya kapasitas SDM PBJ	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	23,04	308.000.000	23,24	308.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	128	100.000.000	128	100.000.000
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Meningkatnya Kualitas Layanan Advokasi pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Permasalahan Barang dan Jasa yang D diselesaikan	Persen	100		100	
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	108.000.000	12	108.000.000
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Kematangan UKPBJ Dimensi Kelembagaan	Level	3		3	
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	100.000.000	12	100.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	Persen	100	621.000.000	100	621.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	108.000.000	12	108.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	243.000.000	12	243.000.000



	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan PBJ	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	29,26		29,27	
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	270.000.000	12	270.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sesuai Standar	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Sesuai Standar	Persen	100	1.771.000.000	100	1.771.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	12	250.000.000	12	250.000.000
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	12	221.000.000	12	221.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	2.102.872.473	100	2.144.929.922
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	13.908.000	100	13.908.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	13.908.000	1	13.908.000



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSN, Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	69,79	200.000.000	70,83	200.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	200.000.000	24	200.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	100	1.468.964.473	100	1.511.021.922
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	63.086.174	1	63.086.174
					Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	90,01		90,02	
					Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro PBJ	Poin	90,01		90,02	
					Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	100		100	
					Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	90,63		91,52	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.242.786.299	12	1.284.843.748
					Meningkatnya Implementasi SPBE Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	68		75	



	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	13.092.000	6	13.092.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah				Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Persen	100	420.000.000	100	420.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	420.000.000	12	420.000.000
BIRO ORGANISASI									2.468.080.925		3.082.912.544
Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif					Meningkatnya Pemerintahan yang Berintegritas. Adaptif. dan Inovatif	Persentase Capaian RB General	Persen	86,47	2.468.080.925	86,5	3.082.912.544
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik*)	Poin	4,77	121.000.000	4,77	176.250.000
	Program Penataan Organisasi				Pelayanan Publik Perangkat Daerah Memenuhi Ekspektasi Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan nilai IKM Minimal SANGAT BAIK	Persen	89,47	121.000.000	92,11	176.250.000
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Standar Pelayanan	Persen	100	121.000.000	100	176.250.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1	121.000.000	1	176.250.000
					Kelembagaan Agile	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Poin	73,093	1.105.000.000	73,093	1.256.250.000
	Program Penataan Organisasi				Kelembagaan Tepat Ukuran dan Tepat Fungsi	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Struktur	Poin	38,271	984.000.000	38,271	1.080.000.000
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Struktur dan Tupoksi sesuai dengan Ketentuan Pedoman Penataan Kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah dengan Struktur dan Tupoksi yang sesuai dengan Ketentuan Pedoman Penataan Kelembagaan	Persen	84,21	190.000.000	84,21	267.000.000



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSN Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi				Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	190.000.000	1	267.000.000
	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Jabatan sesuai Kebutuhan	Persentase Jabatan yang Sesuai Kebutuhan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Persen	100	604.000.000	100	552.000.000
	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan				Terlaksananya Analisis Jabatan. Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	1	604.000.000	1	552.000.000
	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan				Meningkatnya kualitas pelayanan penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase usulan kelembagaan Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti	Persen	100	190.000.000	100	261.000.000
	Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				Terlaksananya Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	190.000.000	1	261.000.000
	Program Penataan Organisasi				Organisasi Tepat Proses	Nilai Evaluasi Kelembagaan Dimensi Proses	Poin	34,821	121.000.000	34,821	176.250.000
	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				Peta Proses Bisnis Sesuai Kebutuhan Kinerja dan Mendorong Terbentuknya Organisasi Berbasis Kinerja	Persentase Proses Bisnis yang Sesuai Ketentuan Arsitektur SPBE	Persen	31,58	96.800.000	52,63	140.180.000
	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	1	96.800.000	1	140.180.000
					Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat terhadap Kebijakan Tata Laksana	Persentase Pemerintah Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang Patuh terhadap Kebijakan Tata Laksana	Persen	100	24.200.000	100	36.070.000
					Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	1	24.200.000	1	36.070.000
					Meningkatnya Praktek Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	Persen	92	242.000.000	95	352.500.000



	Program Penataan Organisasi			Meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi	Persen	100	242.000.000	100	352.500.000
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Diterapkan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Persen	100	121.000.000	100	176.250.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	121.000.000	1	177.149.430
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			Meningkatnya kualitas tata kelola budaya kerja	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan budaya kerja	Persen	100	121.000.000	100	176.250.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	38	121.000.000	38	175.350.570
				Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	Poin	13,61	121.000.000	13,65	201.250.000
	Program Penataan Organisasi			Pelaporan Kinerja Berkualitas dan Bermanfaat	Nilai Pemenuhan. Kualitas, dan Kebermanfaatan Pelaporan Kinerja	Poin	13,61	36.300.000	13,65	70.375.000
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			Pelaporan Kinerja Memenuhi Standar 7 Informasi	Persentase LKIP Pemda dan Perangkat Daerah yang Memenuhi Standar 7 Informasi	Persen	100	36.300.000	100	70.375.000
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	38	36.300.000	38	70.375.000
	Program Penataan Organisasi			Meningkatnya kualitas tatakelola SAKIP	Persentase Tindak Lanjut LHE SAKIP dari KemenPANRB	Persen	100	84.700.000	100	130.875.000



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSN Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			Terintegrasinya Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase komponen SAKIP yang terintegrasi	Persen	100	84.700.000	100	130.875.000
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	38	84.700.000	38	130.875.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Organisasi	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Organisasi	Persen	100	879.080.925	100	1.096.662.544
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	2.000.000	100	2.500.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	2.000.000	1	2.500.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	100	25.900.000	100	32.375.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.900.000	12	26.125.000
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	12	6.250.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	97	527.970.925	97	657.775.044
				Layanan Biro Berkualitas	IKM Biro	Poin	92,23		92,26	



				Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	100		100	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	93,25		93,71	
				Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	58		61	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	527.970.925	12	657.775.044
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Organisasi	Persen	68	323.210.000	75	404.012.500
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	323.210.000	6	404.012.500
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pimpinan	Persentase Kebutuhan Pimpinan yang Terpenuhi	Persen	100	35.628.367.929	100	36.340.935.288
	Kegiatan Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	100	19.076.982.395	100	19.255.124.235
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	%	100	12.262.257.972	100	12.351.328.892
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	%	100	6.814.724.423	100	6.903.795.343



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSN, Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Materi Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebutuhan Materi Komunikasi Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	100	10.343.729.685	100	10.610.942.445
	Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan				Terpenuhinya Kebutuhan Materi Pimpinan	Persentase Kebutuhan Dokumen Materi Pimpinan yang Dipenuhi	%	100	3.161.172.976	100	3.250.243.896
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebutuhan Komunikasi Pimpinan yang Dipenuhi	%	100	2.551.838.970	100	2.640.909.890
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				Terpenuhinya Kebutuhan Dokumentasi Pimpinan	Persentase Kebutuhan Dokumentasi Pimpinan yang Dipenuhi	%	100	4.630.717.739	100	4.719.788.659
	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan				Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan	Persentase Kebutuhan Layanan Keprotokolan yang Dipenuhi	Persen	100	6.207.655.849	100	6.474.868.608
	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				Terpenuhinya Kebutuhan Acara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Acara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	%	100	1.531.000.055	100	1.620.070.975
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Diterima Sesuai Standar	Persentase Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Diterima Sesuai Standar	%	100	1.969.353.655	100	2.058.424.575
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Keprotokolan	Persentase Kebutuhan Layanan Keprotokolan yang Dipenuhi	%	100	2.707.302.139	100	2.796.373.058
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Persen	100	12.314.894.345	100	12.561.192.232
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	39.238.957	100	80.288.609



	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Lingkup Biro yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	4	39.238.957	4	80.288.609
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	Persen	100	456.716.479	100	538.815.773
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	335.631.603	5	376.681.250
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	121.084.876	3	162.134.523
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Umum	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	95,1	2.766.172.809	95,2	2.807.222.456
					Layanan Biro Berkualitas	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro	Poin	92,1		92,2	
					Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	100		100	
					Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	96,38		96,62	
					Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	61		62	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2.766.172.809	12	2.807.222.456
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Administrasi Pimpinan	Persen	68	448.559.760	75	489.609.407



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSN Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	448.559.760	6	489.609.407
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah				Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Biro	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Disediakan	Persen	100	8.604.206.340	100	8.645.255.987
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	8.604.206.340	12	8.645.255.987
									378.038.628.144.00		385.599.400.708.00
BIRO UMUM									##### ###		##### ##
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Poin	83,4	375.764.320.186	84,1	383.279.606.591
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SETDA	Nilai SAKIP Setda	Poin	87,3	975.000.000	87,8	994.500.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	350.000.000	7	357.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	225.000.000	3	229.500.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	225.000.000	1	229.500.000



	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	175.000.000	18	178.500.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Meningkatnya Profesionalitas ASN Lingkup Setda	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setda	Poin	91,98	850.000.000	92,15	867.000.000
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	250.000.000	12	255.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Tersedianya Pendidikan dan Latihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	500	600.000.000	500	612.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Penyelenggaraan Kearsipan Sekretariat Daerah Efektif dan Efisien	Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI)	Poin	95,75	675.000.000	95,97	688.500.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	675.000.000	12	688.500.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	Poin	85,7	218.488.865.822	86,2	222.858.643.139
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	750	217.388.865.822	750	221.736.643.139
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	275.000.000	3	280.500.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	275.000.000	3	280.500.000



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	275.000.000	1	280.500.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	275.000.000	16	280.500.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	Persen	100	31.015.627.308	100	31.635.939.854
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2.215.627.308	2	2.259.939.854
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	28.800.000.000	2	29.376.000.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Barang Milik Daerah Tertib Administrasi	Persentase Barang Milik Daerah yang Tertib Administrasi	Persen	100	450.000.000	100	459.000.000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	450.000.000	12	459.000.000



	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Poin	85,7	10.535.216.098	86,2	10.745.920.420
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	850.000.000	4	867.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	200.000.000	25	204.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.955.079.300	12	9.134.180.886
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	530.136.798	15	540.739.534
					Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Ketatausahaan Sekretariat Daerah	Poin	85,7	100.000.000	86,2	102.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100.000.000	12	102.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Barang Milik Daerah Memadai	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	Persen	100	12.383.410.107	100	6.974.784.589
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0		0	0



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	3.838.024.107	5	3.914.784.589
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	3.000.000.000	12	3.060.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							9	5.545.386.000		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kebutuhan Pelayanan Kebersihan. Keamanan. Air. Listrik. Front Office. Driver. dan komunikasi terpenuhi	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan. Keamanan. Air. Listrik. Front Office. Driver. dan komunikasi terpenuhi	Persen	100	77.259.593.976	100	78.804.785.856
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4.855.271.728	12	4.952.377.163
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	72.404.322.248	12	73.852.408.693
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Barang Milik Daerah Berfungsi	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	21.931.606.875	100	28.026.532.733
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Terbayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	500	11.000.000.000	500	11.220.000.000



	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Terpeliharanya/Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	7.000.000.000	20	12.796.293.720
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Terpeliharanya/Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	23	3.931.606.875	23	4.010.239.013
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Meningkatnya Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Dipenuhi	Persen	100	1.100.000.000	100	1.122.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paket	12	1.100.000.000	12	1.122.000.000
	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				Meningkatnya Praktik Baik RB Lingkup Biro Umum	Persentase Capaian Kinerja Intervensi Reformasi Birokrasi Setda lingkup Biro Umum	Persen	100	2.274.307.958	100	2.319.794.117
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	Persen	100	225.000.000	100	229.500.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	2	225.000.000	2	229.500.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Biro	Persentase Realisasi Belanja Biro	Persen	100	1.999.307.958	100	2.039.294.117
					Meningkatnya Profesionalitas ASN Biro	Persentase Pegawai dengan IP ASN dalam Rentang 90-100	Persen	41,01		41,57	



1FCFCF7D7F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

				Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Perencanaan Pengadaan	Persen	87,9		88,2	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Biro	Poin	93,5		93,96	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.999.307.958	12	2.039.294.117
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Implementasi SPBE	Persentase Pemenuhan Implementasi SPBE Lingkup Biro Umum	Persen	68	50.000.000	75	51.000.000
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	50.000.000	6	51.000.000



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dengan berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Renja Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ini disusun untuk meningkatkan kinerja Setda sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam kerangka pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang telah disusun dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Renstra Setda tahun 2025-2029. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renja ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian harus menjadi komitmen bersama bahwa dokumen ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Setda Provinsi Jawa Barat. Karena itu dokumen ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat sesuai target kinerja sasaran yang akan dicapai.



Di dalam Renja Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ini dimuat 12 (dua belas) sasaran strategis yang pencapaiannya diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja utama. Kinerja ini dijabarkan secara operasional kepada 8 (delapan) program, 29 kegiatan, dan 93 sub kegiatan. Untuk mendukung ketercapaian kinerja indikasi anggaran yang dibutuhkan selama tahun 2026 adalah sebesar Rp 569.975.460.000,00. Dokumen ini juga telah menetapkan target kinerja dan indikasi kegiatan serta anggaran selama tahun 2026 untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan kinerja dalam mendukung visi Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Setda Provinsi Jawa Barat yang dijabarkan dalam RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang selanjutnya akan menjadi bukti pencapaian kinerja. Renja Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ini juga harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh biro di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing biro. Semua biro juga diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan secara bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan peningkatan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat diwujudkan.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Setda Provinsi Jawa Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan Renstra Setda Tahun 2025-2029.



5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renja Setda Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Setda Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penting dalam menjalankan program dan kegiatan tahunan untuk penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setda Provinsi Jawa Barat.

Setda Provinsi Jawa Barat termasuk setiap unit kerja di dalamnya, sesuai struktur perangkat daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan kegiatan yang ada di dalam Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kab/Kota, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 Setda dijabarkan dengan berorientasi pada komitmen dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kinerja Setda dijabarkan ke dalam 12 sasaran Renstra, yaitu: meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan tinggi, terkendalinya stabilitas harga daerah Jawa Barat, meningkatnya kinerja BUMD, regulasi daerah adaptif, meningkatnya efektivitas dukungan kebijakan terhadap pembangunan, kelembagaan *agile*, meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah, pelaporan kinerja pemda berdampak pada akselerasi kinerja pembangunan, kinerja perangkat daerah mencapai target, meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik Jawa Barat.

Seluruh Biro di bawah lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026 sesuai dokumen ini dengan sebaik baiknya serta berkewajiban untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada dokumen Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.



5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Selanjutnya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renja Setda tahun 2026, dilakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam kurun satu tahun perencanaan.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi termasuk diantaranya pengendalian dan evaluasi terhadap baik itu Renstra maupun Renja perangkat daerah. Pengendalian pelaksanaan Renja Setda yang mencakup indikator kinerja Setda, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran pada Renja Setda. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Setda. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Setda, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Setda telah dilaksanakan melalui Renja Setda.

Sekretaris Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja Setda dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya kepada gubernur melalui kepala Bappeda. Kebijakan serta target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renja Setda akan dievaluasi tahunan melalui LKIP, dan untuk Renstra Setda akan dievaluasi pada pertengahan (tahun 2027) dan pada akhir periode 5 tahun (Tahun 2029) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun demikian evaluasi, revisi dan koreksi tetap diperlukan serta harus menjadi perhatian agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat segera direalisasikan. Masih terdapat kelemahan di beberapa sisi dalam kesamaan persepsi di seluruh



biro dalam hal konsep perencanaan, akan tetapi tidak mengurangi semangat dari tim penyusun dalam hal perbaikan kedepannya. Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja kerasnya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1FCFCF7D7F>

1FCFCF7D7F